

*DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN MUNA*

*RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN 2021-2026*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah serta petunjukNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 dapat diselesaikan.

Renstra Kebakaran Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Muna periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat perubahan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja daerah, tujuan OPD, sasaran strategis OPD dan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sehingga arah pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat lebih terukur dan mencapai kinerja yang memuaskan.

Renstra Kebakaran Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Muna periode 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebakaran Dinas Pemadam dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Demikian Rencana Strategis ini disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara komprehensif tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 di Kabupaten Muna.

Raha, Februari 2023

KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN KABUPATEN MUNA

ARWIN, S.Pd
Pembina / IVa
NIP. 19680402200604 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	6
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	6
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	22
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	23
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	28
3.3. Telaahan Renstra K/L, Renstra Instansi yang membidangi sub urusan Kebakaran Prov. Sulawesi Tenggara dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna	32
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	47
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	47
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	50
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	52
BAB VIII PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (RenstraPD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra Organisasi Perangkat Daerah disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan OPD periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan melalui program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tugas dan fungsi Dinas Pemadam dan Kebakaran dapat berjalan secara sistematis, terukur, terarah, transparan dan akuntabel.

Adapun Fungsi dari Renstra adalah memudahkan kontrol terhadap semua aktifitas yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kinerja pelaksanaan tugas.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya yang meliputi keterkaitan visi dan misi, program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk

mengukurnya disamping alokasi anggaran yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi OPD.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan dilingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang undangan yang digunakan dala menyusun Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Muna Tahun 2014-2034;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna (lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Muna 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna adalah sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun mendatang sebagai implementasi misi SKPD.

2. Tujuan

Adapun penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna Tahun 2021 - 2026 ini ditujukan untuk :

1. Menjamin konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas serta kebutuhan daerah/lapangan;
2. Untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama lima tahun.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya Urusan Wajib yaitu Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
4. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas dan kinerja instansi (SKPD) sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, tujuan, sasaran dan kebijakan pembangunan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB	I	PENDAHULUAN
	1.1.	Latar Belakang
	1.2.	Landasan Hukum
	1.3.	Maksud dan Tujuan
	1.4.	Sistematika Penulisan
BAB	II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
	2.1.	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
	2.2.	Sumber Daya Perangkat Daerah
	2.3.	Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.4.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
BAB	III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
	3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
	3.2.	Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
	3.3.	Telaahan RenstraK/L dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna
	3.4.	Telaahan Rencana TataRuang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5.	Penentuan Isu-isu Strategis
BAB	IV	TUJUAN DAN SASARAN
	4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
BAB	V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB	VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB	VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB	VIII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Muna dan Peraturan Bupati Muna Nomor 30 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna.

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pencegahan
 - a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
 - c. Jabatan Fungsional
4. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana
 - a. Seksi Pemadam Kebakaran
 - b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi
 - c. Jabatan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna merupakan Pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan/didelegasikan kepada daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
- b. Penyelenggaraan Koordinasi Program dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. Penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
- d. Penyelenggaraan pengendalian dan pengawasan berbagai program ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebakaran;
- e. Penyelenggaraan evaluasi dan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah dan jabatan fungsional; dan

- f. Penyelenggaraan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan sasaran, mengordinasikan, membina, mengevaluasi dan melaporkan kebijakan daerah dibidang ketentraman, keteriban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan kebakaran meliputi pencegahan serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan, masyarakat sub urusan kebakaran yang meliputi pencegahan serta pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretaris mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengatur, mengordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas yang meliputi perencanaan, administratif ketatausahaan dan arsip, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah, pengelolaan keuangan serta pengordinasian penyusunan program dan pelaporan bidang-bidang.

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan program kerja, penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan keuangan, serta koordinasi penyusunan program dan pelaporan;

- b. pengordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- c. penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- d. penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang Ketentraman dan Ketertiban serta Perlindungan Masyarakat, sub urusan Kebakaran sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah
- e. penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian, aset dilingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- f. pengordinasian penyusunan produk hukum di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. pengelolaan data, evaluasi dan penyiapan laporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- h. penyiapan bahan pembinaan, pengendalian dibidang Kesekretariatan;
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai tugas dan fungsinya

Sekretariat Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan tugas melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

Sub bagian Perencanaan dan Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. penyusunan rencana kerja, program dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- d. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- e. pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- f. pelaksanaan urusan perbendaharaan gaji;
- g. pelaksanaan urusan verifikasi dan akuntansi;
- h. pelaksanaan urusan pelaporan keuangan;
- i. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;
- j. penyiapan bahan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan kegiatan;
- k. pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan program dan kegiatan terhadap bidang-bidang lingkup dinas dan perangkat daerah terkait;
- l. pelaksanaan monitoring, pemantauan, dan pelaporan;
- m. pelaksanaan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- n. pelaksanaan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- o. penyusunan laporan kinerja pertanggung jawaban sebagai bahan penyusunan LKPJ Bupati; dan

- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitasi barang milik negara/daerah dan administrasi jabatan fungsional.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan persuratan;
- b. pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan. Keamanan dan ketertiban kantor;
- d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan barang milik negara/daerah;
- e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural; dan
- f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional.

Bidang Pencegahan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pencegahan kebakaran serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional.

Bidang Pencegahan menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;

- d. pengordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pencegahan dipimpin oleh kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pencegahan terdiri atas :

- a. Seksi Pencegahan dan Inspeksi
- b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha
- c. Jabatan Fungsional

Seksi Pencegahan dan Inspeksi melaksanakan tugas :

- a. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
- b. Melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan; dan
- c. Melakukan pendataan inventarisasi, penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan.

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha melaksanakan tugas :

- a. Melakukan peningkatan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui pembentukan Barisan Relawan Kebakaran (BALAKAR) Satuan Relawan Kebakaran (SATLAKAR) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG);
- b. Melakukan program kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas BALAKAR, SATLAKAR dan MKKG

- c. Melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengelola mengendalikan mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan pemadaman, penyelamatan, dan sarana prasarana serta pembinaan dan pengawasan tenaga fungsional. Kepala Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bidang Pemadaman, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan layanan respon cepat (response time), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran;
- b. Penyelenggaraan layanan respon cepat (respons time), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evakuasi korban yang terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran;
- c. Penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Pengordinasian pelaksanaan tugas tenaga fungsional; dan
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana terdiri dari:

- a. Seksi Pemadam Kebakaran;
- b. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
- c. Jabatan Fungsional

masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Pemadam Kebakaran melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran serta pemadaman dan pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran; dan
- b. Menyelenggarakan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
- c. Menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran.

Seksi Penyelamatan dan Evakuasi melaksanakan tugas :

- a. Menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran;
- b. Menyelenggarakan layanan respon cepat operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya; dan
- c. Melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sub Koordinator pelaksana fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi

jabatan Pimpinan Tinggi Pratama masing-masing. Sub Koordinator membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian tugas. Sub koordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian dan pembagian tugas subkoordinator ditetapkan oleh Bupati yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

2.2 Sumber Daya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Sumber Daya Manusia Kepegawaian

Dalam rangka menjalankan tugas administrasi dan operasionalnya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terhitung bulan Oktober 2022 didukung oleh pegawai sebanyak 21 orang PNS, 29 orang Naban yang dituangkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi jumlah karyawan berdasarkan pangkat dan golongan

JABATAN	GOLONGAN/RUANG	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	-	-
Sekretaris	Pembina /IV a	1
Kabid Pencegahan	Penata /IIIc	1
Kabid Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana	Penata Tk 1/III d	1
Subag Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk 1/III d	1
Subag Umum Kepegawaian	-	-
Kasie Pencegahan dan Inspeksi	Penata Muda Tk I /IIIc	1
Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha	Penata /IIIc	1
Kasie Pemadam Kebakaran	Penata /IIIc	1

Kasie Penyelamatan dan Evakuasi	Penata Muda Tk I /III b	1
Kelompok jabatan fungsional		
Staf	Penata /IIIc	1
	Penata Muda Tk I/III b	1
	Penata Muda /III a	1
	Pengatur	1
	Pengatur Muda	7
	Pengatur Muda Tk I	1
	Pengatur	2
Tenaga Bantuan (Honorar)		29

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Oktober 2022

Tabel 1.2. Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2022

NO	JENJANG PENDIDIKAN	JUMLAH (Orang)
1	STRATA 2	-
2	Dokter Hewan	1
3	STRATA 1	8
4	DIPLOMA III	1
5	SLTA/SMK	11

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Oktober 2022

Tabel 1.3. Jumlah pegawai menurut latar belakang pendidikan Tahun 2022

NO	LATAR BELAKANG PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL	%
	GURU	1	4,76
	PERTANIAN	4	19,04
	TEKNIK	2	9,52
	PETERNAKAN	1	4,76
	DOKTER HEWAN	1	4,76
	LAINNYA	11	52,38

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2022

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 2.1 sarana dan prasarana kerja

NO	URAIAN	JUMLAH
I.	BANGUNAN	
	Gedung Kantor Dinas	1
	Gedung Hidran Kota (Tandon Pemadam)	5
II	KENDARAAN DAN PERALATAN	
	Kendaraan Roda 4	-
	Kendaraan Roda 6	5
	Kendaraan Roda 3	-
	Traktor	-
	Mesin Ketik	-
	Laptop	1
	Komputer Personal	-
	Printer	-
	Meja Kerja	2
	Meja Rapat	-
	Kursi Kerja	2
	Kursi Rapat	-
	Lemari Arsip	-
	Kursi Sofa (set)	-
	Proyektor	-
	TV	-
	AC	-
	Handy Cam	-
	Alkon Manual	3
	Alkon Apung	3

Alat Pelindung Diri (Helm,Jaket Tahan Panas,Sepatu,dan Kaos Tangan)	8
Scba	5
Alkon Pengisian Scba	1
Nozel Jet 2.5 Inch Machino	6
Nozel Jet 1.5 Inch Machino	6
Nozel Gun Spray 2.5 Inch Machino	2
Nozel Gun Spray 1.5 Inch Machino	8
Y Connetion 2,5 Inch x 1.5 Inch	4
Baju Pemadam Anti Api	2
Kotak P3K Damkar	2
Radio RIG dan Antena Set RIG	1
Radio HT	10
Respirator Penyaring Udara	6
Linggis Pemadam	2
Kampak Pemadam	6
Selang Pemadam 1.5 Inch Machino Rubber 30 m	3
Kunci Kit Set dan Lemari	1
Mesin Las	1

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Oktober 2022

Tabel 2.2 Data Tingkatan Sertifikasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna :

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1.	Pemadam I ASN	11
2.	Pemadam I Non ASN	12
3.	Pemadam II Non ASN	13
4.	Pemadam III	-
5.	Inspektur Muda Kebakaran	-
6.	Inspektur Madya Kebakaran	-

7.	Inspektur Utama Kebakaran	-
8.	Penyuluh Muda Kebakaran	-
9.	Penyuluh Madya Kebakaran	-
10.	Investigator Muda Kebakaran	-
11.	Investigator Madya Kebakaran	-
12.	Instruktur Muda Kebakaran	-
13.	Instruktur Madya Kebakaran	-
14.	Operator Mobil Kebakaran	-
15.	Montir Mobil Kebakaran	-
16.	Caraka Mobil Kebakaran	-
17.	Operator Komunikasi Kebakaran	-

Jika melihat sumber daya pemadam kebakaran dan keselamatan yang ada saat ini belum memenuhi standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran sesuai dengan permendagri Nomor 16 Tahun 2009 baik ASN maupun aparatur non ASN, standar kualifikasi aparatur pemadam kebakaran meliputi : persyaratan umum, persyaratan khusus dan kualifikasi.

Tabel 2.3 Data Sertifikasi Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna :

NO	KETERANGAN SERTIFIKAT PELATIHAN	JUMLAH
1.	Pendidikan dan Pelatihan Pemadam I Program 45 Jam pelajaran	23
2.	Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pemadam II Program 24 Jam Pelajaran (in house training)	13
3.	Pendidikan dan pelatihan operator Tk I Program 24 Jam Pelajaran (in house training)	-
4.	Pendidikan dan pelatihan Fire Rescue Program 200 Jam Pelajaran	-
5.	Pendidikan dan pelatihan Inspektur Pemadam Tk I Program	-

200 Jam Pelajaran	
6. Bimbingan Teknis Fire Fighter I Kemendagri	-
7. Pendidikan dan Pelatihan Pemadam I Program 45 Jam pelajaran	-
8. Bimbingan Teknis Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran di wilayah perkotaan Kemendagri	-

Kuantitas PNS dengan NON PNS masih berbanding sangat jauh, hal tersebut menjadi masalah yang konkret untuk diselesaikan secara intern dan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Muna. Masalah ini dapat teratasi apabila jumlah beban dan tanggung jawab kerja berbanding lurus dengan jumlah Sumber Daya Manusia yang berkualifikasi khusus dan kompetensi keahlian pemadam kebakaran. Beban kerja yang ditanggung oleh aparatur Pemadam Kebakaran sangat berat dan beresiko tinggi maka diperlukan kejelasan dan peningkatan status kepegawaiannya, karena setiap aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna merupakan aset yang sangat berharga dan bernilai dalam memberikan pelayanan pada urusan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran di Kabupaten Muna.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Salah satu ukuran tingkat keberhasilan Organisasi Perangkat daerah adalah efektifitas pelayanan publik berbasis kinerja yang merupakan instrument pengukur kuantitatif dari target yang telah ditentukan sehingga dapat mencerminkan kualitas kinerja dalam kurun waktu tertentu. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk pada tahun 2021 sesuai dengan Perda Kabupaten Muna Nomor 2 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Terbentuknya Dinas

Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna diharapkan mampu bekerja lebih optimal dalam melakukan urusan wajib ketertiban dan ketentraman serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran secara terukur, berorientasi pada target yang telah ditetapkan dalam dokumen renstra OPD guna mendukung kinerja Kepala daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Muna.

Untuk menunjukkan tingkatcapaiankinerjatersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna dengan kinerja yang dibutuhkan, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja dalam periode Renstra yang sama.

Realisasi kinerja dan target kinerja OPD Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna periode tahun 2021 belum dapat disajikan karena Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan baru terbentuk pada tahun 2021 dimana tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tetap dilakukan melalui Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Muna. Namun demikian bahwa pelayanan tugas pemadaman kebakaran tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik walaupun dengan keterbatasan personil kesiapsiagaan, sarana prasarana serta alokasi anggaran yang minim.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

1. Tantangan

Berdasarkan situasi dan kondisi Kabupaten Muna yang semakin berkembang, maka gambaran tantangan dan peluang bagi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna dalam pengembangan pelayanannya, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Cakupan Layanan Bencana Kebakaran cukup luas.

2. Masih belum memadainya aksesibilitas.
3. Kurangnya komunikasi korban/masyarakat di sekitar wilayah TKP.
4. Kesulitan menghadapi wilayah masyarakat rawan kebakaran dan potensi kebakaran.
5. Terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi.
6. Terbatasnya Diklat Aparatur

2. Peluang

Peluang yang perlu dimanfaatkan dalam rangka pengembangan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna pada periode 2021-2026, adalah sebagai berikut :

1. Rencana penambahan pos sektor untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Muna
2. Dukungan untuk Pencapaian SPM urusan kebakaran
3. Potensi peran serta masyarakat dalam bentuk Barisan Relawan Pemadam Kebakaran (Balakar) dan Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar)
4. Teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran yang semakin berkembang
5. Peningkatan kualitas dan keterampilan SDM
6. Semakin berkembangnya teknologi peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran.
7. Adanya rencana sistem pencegahan kebakaran Kabupaten Muna
8. Adanya Pengembangan mutu layanan melalui studi mengenai Konsep Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) dan penentuan lokasi Pos Pemadam.

BAB III

PERMASALAHAN DANI SU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam kerangka pelaksanaan tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tidak terlepas permasalahan yang muncul dan mempengaruhi kinerja organisasi yang berdampak pada orientasi hasil yang akan dicapai. Permasalahan bukanlah kendala yang menjadikan menurunnya kualitas dan kuantitas pelayanan, melainkan dengan adanya masalah akan membuka peluang solusi dalam memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang bermanfaat bagi peningkatan mutu dan kinerja yang lebih produktif. Permasalahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan secara garis besar adalah tidak berimbangannya antara sarana prasarana yang tersedia terhadap cakupan wilayah sektor serta kuantitas dan kualitas personil yang tersedia sehingga mempengaruhi kinerja Dinas Damkar dan Penyelamatan secara keseluruhan. Terdapat beberapa permasalahan dalam mencapai target tersebut, yaitu :

1. Belum tersedianya pos pos Damkar di kecamatan
2. Sarana dan Prasarana belum memadai untuk mendukung peningkatan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
3. Terbatasnya tandon air atau pasokan air
4. Kebutuhan Fasilitas hydrant Kota untuk fasilitas umum
5. Terbatasnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi kualifikasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
6. Terbatasnya Diklat Aparatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna.

Kabupaten Muna memiliki luas wilayah 2.057,69 km² yang terbagi atas 22 Kecamatan dimana Kecamatan Tongkuno merupakan Kecamatan terluas yaitu 440,98 km² atau 21,43% dari luas wilayah Kabupaten Muna secara keseluruhan. Sedangkan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Duruka dengan luas 11,52 km² atau 0,56% dari wilayah Kabupaten Muna. Secara administratif, setelah pisah dengan Kabupaten Muna Barat, wilayah Kabupaten Muna pada tahun 2016 terdiri dari 22 Kecamatan dengan 124 Desa, 26 Kelurahan dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) serta 1 Unit Pemukiman. Dari 22 Kecamatan tersebut, terdapat 18 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Pesisir dan 55 Desa Pesisir. Serta terdapat 4 Kecamatan yang merupakan Kecamatan Non Pesisir dan 68 Desa Non Pesisir. Dari gambaran karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Muna dan sebaran penduduk serta pemukiman permanen yang sangat bervariasi. Kondisi inilah yang cukup menyulitkan pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna saat terjadi kebakaran atau pelayanan non kebakaran untuk wilayah kecamatan daratan dan wilayah kecamatan kepulauan.

Kondisi yang ada saat ini Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna hanya memiliki 3 unit mobil yang hanya berada pada Mako Damkar di Kota Raha serta 5 unit tandor air yang tersebar hanya di 2 kecamatan yaitu kecamatan Katobu dan Kecamatan Batalaiworu. Dari kondisi ini menggambarkan bahwa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna belum mencapai standar pelayanan minimal (SPM) dimana idealnya Kabupaten Muna memiliki 5 pos pemadam daratan dan 2 pos pemadam kepulauan dengan masing masing 1 unit kendaraan pemadam kebakaran setiap pos pemadam serta 1 Markas Komando Damkar dengan 5 unit kendaraan pemadamnya.

Adapun beberapa kebutuhan pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna adalah :

1. Kebutuhan pos sektor dan pos pemadam

Dalam menjalankan tugas aparaturnya pemadam kebakaran membutuhkan pos sektor dan pos pemadam untuk memudahkan pelayanan pemadam kebakaran pada lokasi kebakaran terdekat sehingga diharapkan dapat memenuhi response time serta memberikan rasa aman dan tentram masyarakat Kabupaten Muna.

2. **Kebutuhan Armada**

Dalam menghadapi kebakaran, dibutuhkan armada kendaraan Damkar pada setiap pos sektor dan pos pemadam yang merupakan kebutuhan utama dalam melayani kejadian kebakaran dan memenuhi response time pada setiap kejadian kebakaran

3. **Kebutuhan Alat Pelindung Diri**

Alat pelindung Diri adalah perisai yang digunakan petugas pemadam kebakaran pada setiap kejadian kebakaran. APD mutlak diperlukan petugas untuk melindungi diri dari api dan benda lain yang bisa melukai petugas pemadam kebakaran

4. **Kebutuhan Tandon air/Pasokan Air**

Pasokan air dalam setiap kejadian kebakaran adalah kebutuhan dasar yang wajib dipenuhi untuk membantu pemadaman kebakaran. Tandon air wajib terpenuhi dengan ukuran 24.000 liter untuk pos sektor dan 12.000 liter untuk pos pemadam

5. **Kebutuhan Hydrant Kota untuk menunjang fasilitas umum**

6. **Kebutuhan peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran**

7. **Kebutuhan Kualifikasi bagi Aparatur DisDamkar dan Penyelamatan Kabupaten Muna**

Permasalahan utama yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya diidentifikasi berdasarkan beberapa aspek

1. Minimnya infastruktur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna berupa kurangnya ketersediaan sarana yang memadai sesuai dengan standar pelayanan minimum seperti

- kurangnya armada operasional dan alat pelindung diri serta peralatan dan perlengkapan bagi aparatur pemadam
2. Kurangnya ketersediaan prasarana yang memadai sesuai standar pelayanan minimum seperti belum tersedianya pos sektor dan pos pemadam, perbaikan markas komando, tidak adanya tempat workshop pemadam, minimnya diklat aparatur
 3. Belum tercapainya tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit berdasarkan permendagri nomor 114 tahun 2018 tentang standar pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah kabupaten/kota bahwa pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tangggap (response time). Beberapa masalah yang dihadapi terkait response time yaitu kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar SPM, terhambatnya akses jalan ke lokasi kejadian kebakaran, kurangnya akurasi pelaporan kejadian kebakaran berupa ketepatan berita dan titik lokasi kebakaran termasuk berita palsu kejadian kebakaran dan kurangnya kualifikasi personil pemadam
 4. Belum adanya pengawasan dan pengendalian Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Muna seperti belum adanya regulasi pengawasan dan regulasi pencegahan kebakaran, kurangnya kompetensi personil internal baik kompetensi pengujian dan evakuasi, kurangnya keterlibatan masyarakat yaitu satlakar/balakar serta kurangnya sosialisasi kebakaran dan penyelamatan.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan

mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi Pembangunan Kabupaten Muna Periode tahun 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Muna yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**

Dalam penjabaran visi Pemerintah Kabupaten Muna yang berhubungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dapat diterjemahkan sebagai berikut :

Maju berarti memiliki kemampuan, tujuan dan semangat dalam mengembangkan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan sumber daya aparatur pemadam kebakaran dan meningkatkan pelayanan dan pencegahan kebakaran demi terciptanya keamanan dan ketentraman masyarakat; mandiri dapat diartikan mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya pemadam yang dimiliki secara mandiri dan berkelanjutan; Berdaya saing memiliki makna mampu meningkatkan kewaspadaan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan non kebakaran secara cepat dan tepat; dan sejahtera yang dapat dimaknai mampu meningkatkan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan minimal sehingga mampu melindungi masyarakat dari bahaya kebakaran dan menciptakan suasana yang aman dan tentram.

Untuk mewujudkan Visi akan ditempuh dengan 5 misi pembangunan Kabupaten Muna periode tahun 2021-2026 yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia;
2. Mengembangkan inovasi pembangunan dan pelayanan publik;
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah;
4. Meningkatkan kapasitas dan pemerataan infrastruktur;
5. Pembangunan sosial budaya;

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi kelima yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya“ dengan tujuan kesembilan yaitu Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima dengan sasaran ke 40 yaitu Terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan rakyat.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna dalam menunjang misi tersebut sesuai dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian urusan daerah dibidang kebakaran dan bencana lainnya dengan memberikan pelayanan dasar sub urusan kebakaran daerah yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan, dan evakuasi. Pemenuhan layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana pemadam kebakaran, sarana dan prasarana penyelamatan dan evakuasi. Pemenuhan mutu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan capaian tingkat waktu tanggap (*response time*), penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran terhadap bahaya kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan *response time* dan meningkatkan kebutuhan infrastruktur pemadaman kebakaran yang dapat memberikan pelayanan prima agar masyarakat kabupaten Muna merasa aman dan nyaman.

Pemenuhan peralatan dan perlengkapan modern serta petugas pemadam kebakaran yang handal dan profesional dalam menangani bahaya kebakaran ikut berperan dalam penyelamatan jiwa manusia dan menurunkan kerugian harta yang dilakukan dengan kesiapsiagaan dan terpola dengan kegiatan pencegahan, penanggulangan pada saat kejadian, penanganan setelah kejadian dan penanggulangan kebakaran dengan mengedepankan prinsip pengurangan risiko kebakaran dengan mengutamakan pencegahan kebakaran

Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :

Visi :Terwujudnya Kabupaten Muna yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera				
No	Misi	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatkan pembangunan sosial budaya	1. Belum optimalnya penyediaan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pos sektor dan pos pemadam di kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Muna • Belum tersedianya tempat workshop pemadam kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya dukungan anggaran untuk membangun pos sektor dan pos pemadam di kecamatan dan kelurahan strategis dengan risiko kebakaran tinggi • Belum adanya dukungan anggaran membangun workshop pemadam kebakaran
		2. Belum tercapainya response time 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi dan komunikasi terkait pengaduan kebakaran yang masih lambat • Cakupan bencana kebakaran yang cukup luas • Kondisi akses jalan yang belum memadai dilokasi terjadinya kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai terbentuknya forum koordinasi pengaduan kebakaran dan bencana lainnya • Dukungan anggaran pelayanan pemadaman kebakaran cukup memadai • Terbangun komunikasi dan kerjasama stakeholder DISHUB dan POLRI dalam pengamanan jalan
		3. Belum memadainya sarana dan prasarana Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab.	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah armada kendaraan pemadam kebakaran yang terbatas • Jumlah peralatan APD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran cukup memadai untuk rencana penambahan unit armada baru • Dukungan anggaran cukup

		Muna	<p>dan alat rescue Pemadam Kebakaran yang terbatas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya tandon air diwilayah luas kota Raha 	<p>memadai untuk rencana penambahan alat APD dan alat rescue</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran untuk penambahan tandon air
		4. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan terhadap pencegahan, penanganan bahaya kebakaran dan bencana lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya regulasi pengawasan dan pengendalian yang kuat pada Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Muna • Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pembuatan regulasi untuk Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab Muna • Dukungan rencana pelaksanaan sosialisai dan edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran
		5. Masih minimnya SDM yang berkualifikasi dan bersertifikat dalam pencegahan, penanganan bahaya kebakaran dan bencana lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penerimaan ASN Damkar belum sesuai dengan amanat permendagri No. 16 Tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kemampuan aparatur yang profesional melalui pendidikandan pelatihan aparatur Damkar

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Instansi yang membidangi Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Tenggara dan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Dalam Renstra Kemendagri tahun 2019-2024 tentang arah kebijakan dan strategi kementerian Dalam Negeri pencapaian visi misi tujuan dan sasaran strategis kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024 yang sejalan dengan visi misi serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, kementerian dalam negeri telah menetapkan arah kebijakan dan strategi dalam mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah melalui peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan satuan polisi pamong praja dan satuan perlindungan masyarakat serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai standar pelayanan minimum (SPM).

Pencapaian visi misi tujuan dan sasaran strategis kementerian dalam negeri dilaksanakan melalui program dan kegiatan salah satunya adalah program yang berkaitan dengan bahaya kebakaran yaitu program bina administrasi kewilayahan dengan sasaran program untuk meningkatkan konsolidasi dan koordinasi kebijakan penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah, peningkatan pelayanan publik dan kerjasama daerah serta penataan wilayah administrasi dan kawasan serta meningkatnya standarisasi dan kualitas implementasi teknis kebijakan bidang polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat serta pencegahan dan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran.

Berdasarkan undang undang nomor 23 Tahun 2004, pemadam kebakaran merupakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan sub urusan kebakaran, maka arah penanganannya dilaksanakan dengan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun, kebakaran dalam

daerah kabupaten/kota inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakarandan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan kebakaran, baik tingkat pemerintah pusat, daerah hingga lapisan masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi bahaya kebakaran secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik yang menampung kebijakan, strategi, program, kegiatan, subkegiatan, yang komprehensif secara terpadu, guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bahaya kebakaran selama 5 (lima) tahun kedepan secara bertahap.

1.3.2 Telaahan Renstra Dinas/Instansi yang membidangi Pemadam Kebakaran Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

Berdasarkan tinjauan terhadap RPJMD kabupaten Muna Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan masuk dalam urusan wajib sebagai pelayanan dasar pada urusan keamanan, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat. Pada RPJMD Kabupaten Muna Tahun 2021-2026 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan termasuk dalam misi kelima yaitu “Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya“ dengan tujuan kesembilan yaitu Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima dengan sasaran ke 40 yaitu Terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan rakyat.

. Kelemahan pada organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah tidak memiliki organisasi vertikal yang lebih tinggi pada tingkat provinsi sedangkan pada tingkat Kementerian Dalam Negeri yang hanya diurus oleh sub bidan kebakaran berfungsi sebatas regulator, pembuat standar peraturan, pembinaan dan penyelenggara diklat.

3.3.3 Telaahan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dalam mencapai visi dan misi Kepala Daerah melalui RPJMD periode 2021-2026 maka rencana strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan guna mencapai target dan realisasi kegiatan yang telah ditetapkan demi keamanan, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna didaulat untuk menjalankan misi keempat yaitu “Meningkatkan Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur“ dengan tujuan kedelapan yaitu Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektifitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemukiman masyarakat dengan sasaran ke 35 yaitu Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak dan produktif serta penurunan persentase kawasan kumuh Kota Raha yang signifikan berdasarkan tujuh indikator kekumuhan : kondisi bangunan, jalan lingkungan ,penyediaan air minum , drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran.

Sasaran Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran Faktor – faktor penghambat dan faktor – faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis : Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan pemadam kebakaran				
No	Indikator Sasaran	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Persentase jumlah terpenuhinya	1. Belum optimalnya penyediaan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya pos sektor dan pos 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya dukungan anggaran untuk

	peralatan dan perlengkapan Pemadam Kebakaran	infrastruktur	<p>pemadam di kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Muna</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum tersedianya tempat workshop pemadam kebakaran 	<p>membangun pos sektor dan pos pemadam di kecamatan dan kelurahan strategis dengan risiko kebakaran tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Belum adanya dukungan anggaran membangun workshop pemadam kebakaran
		2. Belum tercapainya response time 15 menit	<ul style="list-style-type: none"> • Sistem informasi dan komunikasi terkait pengaduan kebakaran yang masih lambat • Cakupan bencana kebakaran yang cukup luas • Kondisi akses jalan yang belum memadai dilokasi terjadinya kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> • Mulai terbentuknya forum koordinasi pengaduan kebakaran dan bencana lainnya • Dukungan anggaran pelayanan pemadaman kebakaran cukup memadai • Terbangun komunikasi dan kerjasama stakeholder DISHUB dan POLRI dalam pengamanan jalan
		3. Belum memadainya sarana dan prasarana Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Muna	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah armada kendaraan pemadam kebakaran yang terbatas • Jumlah peralatan APD dan alat rescue Pemadam Kebakaran yang terbatas • Belum tersedianya tandon air diwilayah luas kota Raha 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan anggaran cukup memadai untuk rencana penambahan unit armada baru • Dukungan anggaran cukup memadai untuk rencana penambahan alat APD dan alat rescue • Dukungan anggaran untuk penambahan tandon air
		4. Belum Optimalnya kesadaran masyarakat dalam keterlibatan terhadap	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kurangnya regulasi pengawasan dan pengendalian yang kuat pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan pembuatan regulasi untuk Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab Muna

		<p>pencegahan, penanganan bahaya kebakaran dan bencana lainnya</p>	<p>Dinas Damkar dan Penyelamatan Kab. Muna</p> <ul style="list-style-type: none"> Masih kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang Kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Dukungan rencana pelaksanaan sosialisai dan edukasi masyarakat tentang bahaya kebakaran
		<p>5. Masih minimnya SDM yang berkualifikasi dan bersertifikat dalam pencegahan, penanganan bahaya kebakaran dan bencana lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dalam penerimaan ASN Damkar belum sesuai dengan amanat permendagri No. 16 Tahun 2009 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemampuan aparatur yang profesional melalui pendidikandan pelatihan aparatur Damkar

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Tujuan penyelenggaraan penataan ruang wilayah sesuai dengan amanat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional dengan :

- a. terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia; dan
- c. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Selanjutnya secara lebih operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, penatan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan :

- a. ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia;
- e. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
- f. pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- g. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
- h. keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional

Kabupaten Muna sebagai daerah pengembangan kota yang terintegrasi sebagai kota perdagangan dan jasa membutuhkan proteksi terhadap ancaman bahaya kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Perlindungan terhadap kebakaran mutlak diperlukan dengan perencanaan yang seksama sehingga meminimalkan risiko atau dampak yang terjadi jika terjadi kebakaran.

Rencana tata ruang pengembangan peternakan meliputi rencana penyediaan jalur evakuasi bencana kebakaran; rencana cakupan pelayanan WMK dan linkage system; rencana pengembangan pos pemadam kebakaran, yaitu membangun pos sektor di 6 wilayah strategis pemadaman kebakaran, membangun pos pemadam dan mako pemadam kebakaran; rencana kebutuhan pasokan air dan rencana hydran yaitu membangun hydran-hydran air yang tersebar merata

diwilayah padat pemukiman penduduk, membangun tandon air, serta meingkatkan sarpas distribusi air pemadam kebakaran; rencana sarana dan prasarana pemadam kebakaran; rencana sitem informasi kebakaran; dan rencana sitem pencegahan kebakaran.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2016 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP).

Pada prinsipnya, KLHS adalah suatu *self assessment* untuk melihat sejauh mana KRP yang diusulkan oleh pemerintah daerah dalam mempertimbangkan prinsip Pembangunan Berkelanjutan. Melalui KLHS ini, diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah menjadi lebih memperhatikan permasalahan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan.

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna dalam kerangka tugas dan fungsi pemadam kebakaran guna keamanan, ketentraman umum dan perlindungan masyarakat mengacu pada sinergitas dan keselarasan bahwa kegiatan pemadam kebakaran dan penyelamatan harus berwawasan lingkungan dan menjamin kelestarian lingkungan hidup secara arif. Maknadari Kajian lingkungan hidup strategis adalah pemanfaatan lahan yang tidak bertentangan dengan rencana tata ruang dalam mendukung kelestarian ekosistem guna kesejahteraan manusia dan kelestarian lingkungan hidup.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Hal ini untuk melihat daya dukung dan daya tampung suatu wilayah sudah terlampaui atau tidak. Dengan memperhatikan

fungsi KLHS, analisis terhadap dokumen hasil KLHS ditujukan untuk mengidentifikasi apakah program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup. Jika ada program dan kegiatan pelayanan PD kabupaten/kota yang berimplikasi negatif terhadap lingkungan hidup, maka program dan kegiatan tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan rekomendasi KLHS.

Kebijakan nasional penataan ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang yang kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh undang-undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Namun, setelah lebih dari 25 tahun diberlakukannya kebijakan tersebut, kualitas tata ruang masih belum memenuhi harapan. Bahkan cenderung sebaliknya, justru yang belakangan ini sedang berlangsung adalah indikasi dengan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Pencemaran dan kerusakan lingkungan bahkan makin terlihat secara kasat mata baik di kawasan perkotaan maupun di kawasan perdesaan.

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten merupakan alat untuk implementasi ruang, regulasi atau kebijakan, pengembangan penduduk, perencanaan pemanfaatan ruang wilayah, rencana struktur tingkat pelayanan publik, rencana sistem transportasi, rencana sistem jaringan utilitas wilayah, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana pemanfaatan air baku, rencana penanganan lingkungan wilayah, tahapan pelaksanaan pembangunan wilayah dan indikasi unit pelayanan wilayah.

Dengan diberlakukannya kebijakan nasional penataan ruang tersebut, maka tidak ada lagi tata ruang wilayah yang tidak direncanakan. Tata ruang menjadi produk dari rangkaian proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh karena itu, penegasan sanksi

atas pelanggaran tata ruang sebagaimana diatur dalam UU 26/2007 menuntut proses perencanaan tata ruang harus diselenggarakan dengan baik agar penyimpangan pemanfaatan ruang bukan disebabkan oleh rendahnya kualitas rencana tata ruang wilayah.

Pemerintah Kabupaten Muna akhirnya telah menyelesaikan RTRWKabupaten pada awal Tahun 2014 setelah tertunda selama tiga tahun danditetapkan melalui sidang Paripurna DPRD Muna. Berlarutnya pembahasandokumen RTRW Kabupaten Muna ini karena terbentur oleh petunjuk teknis yakni Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Pengesahan RTRW Kabupaten Muna mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muna Tahun 2014–2034. Regulasi RTRW Kabupaten Muna tersebut sebagai pedoman pembangunan ruang kewilayahan.

Salah satu bentuk penataan wilayah yang diatur di dalam RTRW tersebut adalah perencanaan pemanfaatan lahan dan kawasan. Sesuai dengan RTRWKabupaten Muna, rencana pemanfaatan lahan dan penataan kawasan di Kabupaten Muna terbagi ke dalam dua kawasan, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kepatuhan pelaksanaan penggunaan lahan terhadap RTRWKabupaten Muna baru mencapai 80% yang diakibatkan oleh banyaknya alihfungsi lahan. Disamping itu, arah pembangunan kewilayahan juga mempertimbangkan adanya kawasan rawan bencana, yaitu : (1) Rawan Banjir, (2) Rawan tanah longsor, (3) Rawan gelombang pasang, (4) Rawan abrasi, (5) Rawan kebakaran

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk pada identifikasi permasalahan urusan pemadam kebakaran dan penyelamatan maka visi misi dan arah kebijakan Kepala Daerah terpilih, serta dengan memperhatikan isu-isu global, terdapat beberapa isu penting di Kabupaten Muna yang harus mendapat perhatian lebih, yang harus segera

ditindaklanjuti dalam perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil forum Group Discussion dan serangkaian metode dari identifikasi permasalahan pelayanan perangkat daerah atau hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD dan Renstra periode tahun sebelumnya. Berikut isu-isu strategis terkait pencegahan, pengendalian, penanggulangan bahaya kebakaran dan bencana lainnya pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna yaitu :

1. Belum tercapainya target tingkat waktu tanggap (response time) 15 menit diluar kecamatan Katobu dan Batalaiworu
2. Kebutuhan akan sistem terkait pelayanan pemadaman dan penyelamatan
3. Kualitas dan sertifikasi keahlian sumber daya manusia belum memadai
4. Dukungan sarana dan prasarana belum memadai

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna di presentasikan dalam tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Edukasi Informasi dan Pengetahuan Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	30%	30%	30%	30%	30%	30%
			Persentase Peningkatan Response Time	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Meningkatnya sarana dan prasarana, kualitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran	40%	40%	40%	40%	40%	40%
			Persentase Kelompok/Masyarakat Satlakar/Balakar yang diberdayakan	20%	25%	30%	35%	40%	45%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pengembangan sistem Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna akan terpenuhi apabila adanya suatu kebijakan serta program yang tepat dan berkesinambungan. Pengembangan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan juga dilakukan dengan peningkatan kuantitas sumber daya manusia dan kemanfaatan sarana dan prasarana yang telah ada dan penambahan sarana prasarana serta kualitas sumber daya manusianya. Dalam mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Muna Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merumuskan strategi dan kebijakan yang bertujuan mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan bahaya kebakaran dan bencana lainnya. Strategi untuk mendukung tujuan dan sasaran Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Dalam menjalankan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna memiliki strategi dan arah kebijakannya yaitu :

1. Meningkatkan response time yang belum tercapai
2. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung
3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Meningkatkan pelayanan penanganan bencana kebakaran
5. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terkait pengaduan kebakaran
6. Mengoptimalkan pembentukan satlakar dan balakar

Arah kebijakan :

1. Mengoptimalkan mitigasi bencana kebakaran
2. Revitalisasi membuat peta lokasi rawan kebakaran

3. Membangun jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas kabupaten Muna
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan layanan
5. Peningkatan kualifikasi aparatur melalui pendidikan dan latihan internal maupun eksternal
6. Penyediaan sistem pelayanan penanganan bencana kebakaran berbasis wilayah
7. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran
8. Peningkatan pengawasan dan pengendalian alat proteksi kebakaran

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (Output)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase cakupan layanan administrasi perkantoran
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana ASN
d.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan dan Perangkat Umum Kantor
f.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah pendukung kantor
g.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang pendukung kantor
h.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang kantor
2.	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN	Persentase pencegahan, pengendalian, penyelamatan kebakaran dan Non Kebakaran
a.	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pencegahan Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan kebakaran
b.	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Terlaksananya Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran
c.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran

Kerangka Pendanaan program dan kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Muna tersaji pada tabel 6.1 (*terlampir*)

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas Kebakaran dan Penyelamatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, sesuai pada tabel 7.1.

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima	Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelaksanaan Edukasi Informasi dan Pengetahuan Pencegahan Kebakaran dan Non Kebakaran	30%	30%	30%	30%	30%	30%
			Persentase Peningkatan Response Time	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit	15 menit
		Meningkatnya sarana dan prasarana, kualitas Aparatur Pemadam Kebakaran	Persentase Peningkatan Prasarana dan Sarana Pemadam Kebakaran	40%	40%	40%	40%	40%	40%
			Persentase Kelompok/Masyarakat Satlakar/Balakar yang diberdayakan	20%	25%	30%	35%	40%	45%

Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Kebakaran Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Muna periode 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan yang memuat perubahan rencana strategis Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai target kinerja sesuai dengan indikator kinerja daerah, tujuan OPD, sasaran strategis OPD dan indikator kinerja program dan indikator kinerja kegiatan sehingga arah pembangunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan disisa periode dapat lebih terukur dan mencapai kinerja yang memuaskan.

Renstra Kebakaran Dinas Pemadam dan Penyelamatan Kabupaten Muna periode 2016-2021 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Dinas Kebakaran Dinas Pemadam dan Penyelamatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Raha, Februari 2023

Plt KEPALA DINAS
PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
KABUPATEN MUNA

ARWIN, S.Pd
Pembina/Gol IV A
NIP. 19680402200604 1 001

LAMPIRAN

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Pendidikan Yang Baik dan Bermutu																			
	Meningkatkan cakupan layanan pendidikan Dasar			Angka rata-rata lama sekolah Angka melek huruf penduduk berusia > 15 Tahun Rasio Siswa per Kelas (S/K) Pendidikan SD APK SD/MI/Paket A	8,83 Tahun 96,17 % 32 S/K 112,65 %	8,83 Tahun 96,20 % 32 S/K 112 %	8,90 Tahun 96,40 % 32 S/K 112,80 %	9,00 Tahun 96,60 % 32 S/K 113 %	9,10 Tahun 96,80 % 34 S/K 113,20 %	9,20 Tahun 97 % 34 S/K 113,40 %	9,30 Tahun 97,20 % 34 S/K 113,60 %								
		1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Terselenggaranya Workshop Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Guru	75 %	80 %	55,900,000,000	82 %	57,684,000,000	86 %	63,452,400,000	88 %	69,797,640,000	90 %	76,777,404,000	100 %	0		
		1.01.02.2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar				0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatkan cakupan layanan pendidikan Usia Dini dan Non Formal			APK PAUD	52,88 %	52,88 %		52,90 %	53 %		53,10 %		53,20 %		53,30 %				
		1.01.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Presentasi Cakupan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Anak Usia Dini yang diadakan	75 %	78 %	1,280,000,000	80 %	1,408,000,000	84 %	1,548,800,000	87 %	1,703,680,000	90 %	1,874,048,000	100 %	0		
		1.01.03.2.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal				0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatnya Profesionalisme dan Kompetensi Pendidik			Persentase Guru, kepala sekolah, dan pengawas layak (yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV)	90 %	90 %		91 %	91 %		91 %		91 %		91 %				
		1.01.04	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Presentase Pengawasan Pendidikan	73 %	75 %	2,150,000,000	80 %	2,200,000,000	85 %	2,500,000,000	90 %	2,700,000,000	95 %	3,000,000,000	100 %	0		
		1.01.04.2.01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan				0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
Terlaksananya inventarisasi aspek-aspek tradisi untuk menggali kearifan tradisional yang dimiliki oleh masyarakat kab.muna serta inventarisasi masyarakat adat, tempat spritual dan reinventarasasi kepercayaan terhadap tuhan yang maha esa																			
	Meningkatkan pelestarian seni dan budaya			Persentase sekolah yang menerapkan Mata Pelajaran Muatan Lokal bahasa Muna	100 %	100 %		100 %	100 %		100 %		100 %		100 %				
		2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Jumlah Sanggar Seni dan Budaya Pendidikan yang di bina	73 %	75 %	1,200,000,000	80 %	1,320,000,000	85 %	1,452,000,000	90 %	1,597,200,000	95 %	1,756,920,000	100 %	0		
		2.22.02.2.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatkan pelestarian naskah sejarah dan budaya daerah			Tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap tata nilai lokal (pointao)	3 Skala	3 Skala		3 Skala	3 Skala		3 Skala		3 Skala		3 Skala				
		2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Presentase Penyusunan Buku Bahan Ajar Sejarah dan Budaya Daerah	70 %	73 %	1,500,000,000	76 %	1,700,000,000	80 %	1,900,000,000	85 %	2,100,000,000	90 %	2,300,000,000	100 %	0		
		2.22.04.2.01	Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
	Meningkatkan penyelenggaraan dan partisipasi pentas seni dan budaya daerah			Jumlah kekayaan budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	4 Jenis	4 Jenis		4 Jenis	4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis		4 Jenis				
		2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Presentase Pagelaran Seni dan Budaya	75 %	80 %	1,700,000,000	82 %	2,000,000,000	85 %	2,400,000,000	88 %	2,700,000,000	90 %	3,100,000,000	100 %	0		
		2.22.03.2.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0		0		0		0		0	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompetitif				Tercapainya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
	Peningkatan mutu Pelayanan, penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sertifikasi kompetensi			Tercapainya program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
		1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tercapainya program peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	100 %	100 %	4,525,000,000	100 %	4,525,000,000	100 %	4,525,000,000	100 %	4,525,000,000	100 %	4,800,000,000	100 %	0		
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengendalian Perizinan Praktek Tenaga Kesehatan	97 %	97 %	100,000,000	97 %	100,000,000	97 %	100,000,000	97 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03.2.01	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	98 %	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03.2.02	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jasa SDM Kesehatan	0 Orang	Orang	4,000,000,000	Orang	4,000,000,000	Orang	4,000,000,000	Orang	4,000,000,000	Orang	4,250,000,000	0 Orang	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.03.2.03	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknik Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	95 %	95 %	275,000,000	95 %	275,000,000	95 %	275,000,000	95 %	275,000,000	97 %	300,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	
Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima				Tercapainya Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	70 % 100 %	75 % 100 %		80 % 100 %		85 % 100 %		90 % 100 %		100 % 100 %					
	Meningkatkan Pendidikan yang Baik dan Bermutu			Tercapainya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat Peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	70 % 100 %	75 % 100 %		80 % 100 %		85 % 100 %		90 % 100 %		100 % 100 %					
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Tercapainya Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	70 %	75 %	171,853,572,300	80 %	171,853,572,300	85 %	171,994,000,000	90 %	181,299,000,000	100 %	189,816,000,000	100 %	0		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	200,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pengadaan Bahan Habis Pakai	1 Paket	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	13,000,000,000	1 Paket	13,000,000,000	1 Paket	13,000,000,000	1 Paket	13,000,000,000	1 Paket	15,000,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	19,000,000,000	1 Paket	19,000,000,000	1 Paket	19,000,000,000	1 Paket	21,000,000,000	1 Paket	21,000,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengadaan Obat Vaksin	1 Paket	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	10,000,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	1 Paket	20,500,000,000	1 Paket	20,500,000,000	1 Paket	20,500,000,000	1 Paket	20,500,000,000	1 Paket	21,500,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Paket	1 Paket	10,000,000,000	1 Paket	10,000,000,000	1 Paket	10,000,000,000	1 Paket	12,000,000,000	1 Paket	12,000,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis	95 %	95 %	350,000,000	95 %	350,000,000	95 %	350,000,000	97 %	450,000,000	97 %	450,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	90 %	90 %	100,000,000	90 %	100,000,000	90 %	100,000,000	95 %	125,000,000	95 %	125,000,000	95 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan /atau berpotensi Bencana	95 %	95 %	145,000,000	95 %	145,000,000	97 %	155,000,000	97 %	155,000,000	97 %	160,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	95 %	95 %	250,000,000	95 %	250,000,000	95 %	250,000,000	98 %	285,000,000	98 %	285,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	95 %	95 %	200,000,000	95 %	200,000,000	95 %	200,000,000	98 %	250,000,000	98 %	250,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	97 %	97 %	250,000,000	97 %	250,000,000	97 %	250,000,000	97 %	250,000,000	97 %	275,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	98 %	98 %	550,000,000	98 %	550,000,000	98 %	575,000,000	98 %	575,000,000	98 %	575,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	85 %	85 %	177,572,300	85 %	177,572,300	90 %	210,000,000	90 %	210,000,000	95 %	250,000,000	95 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	97 %	97 %	300,000,000	97 %	300,000,000	97 %	320,000,000	97 %	320,000,000	98 %	345,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	87 %	87 %	175,000,000	87 %	175,000,000	90 %	200,000,000	90 %	200,000,000	95 %	220,000,000	95 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	90 %	90 %	75,000,000	90 %	75,000,000	92 %	78,000,000	92 %	78,000,000	95 %	80,000,000	95 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	95 %	95 %	150,000,000	95 %	150,000,000	95 %	150,000,000	97 %	175,000,000	97 %	175,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	98 %	98 %	3,750,000,000	98 %	3,750,000,000	98 %	3,750,000,000	98 %	3,750,000,000	98 %	4,000,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Penduduk yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional	98 %	98 %	40,000,000,000	98 %	40,000,000,000	98 %	40,000,000,000	100 %	45,000,000,000	100 %	45,000,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100 %	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	60,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Kabupaten/Kota Sehat	98 %	98 %	175,000,000	98 %	175,000,000	98 %	175,000,000	98 %	175,000,000	98 %	200,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Penelitian Kesehatan	97 %	97 %	50,000,000	97 %	50,000,000	97 %	50,000,000	97 %	50,000,000	98 %	75,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Paket	1 Paket	48,000,000,000	1 Paket	48,000,000,000	1 Paket	48,000,000,000	1 Paket	48,000,000,000	1 Paket	50,000,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Paket	1 Paket	1,400,000,000	1 Paket	1,400,000,000	1 Paket	1,400,000,000	1 Paket	1,400,000,000	1 Paket	1,600,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang terakreditasi	30 Puskesmas	30 Puskesmas	2,000,000,000	30 Puskesmas	2,000,000,000	30 Puskesmas	2,000,000,000	30 Puskesmas	2,000,000,000	15 Puskesmas	1,000,000,000	15 Puskesmas	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	98 %	98 %	70,000,000	98 %	70,000,000	98 %	70,000,000	98 %	70,000,000	98 %	100,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96 %	96 %	145,000,000	96 %	145,000,000	96 %	145,000,000	96 %	145,000,000	98 %	175,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	95 %	95 %	2,000,000,000	95 %	2,000,000,000	95 %	2,000,000,000	95 %	2,000,000,000	97 %	2,500,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Kesehatan Balita	97 %	97 %	315,000,000	97 %	315,000,000	97 %	315,000,000	97 %	315,000,000	97 %	345,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	98 %	98 %	216,000,000	98 %	216,000,000	98 %	216,000,000	98 %	216,000,000	98 %	216,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	98 %	98 %	100,000,000	98 %	100,000,000	98 %	100,000,000	98 %	100,000,000	98 %	200,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	98 %	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	100 %	175,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	98 %	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	98 %	150,000,000	98 %	170,000,000	98 %	170,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Militus	98 %	98 %	100,000,000	98 %	100,000,000	98 %	100,000,000	98 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	98 %	98 %	50,000,000	98 %	50,000,000	98 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	75,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersedianya Sistem Informasi Kesehatan	100 %	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Dokumen Profil	6 Dokumen	6 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	150,000,000	6 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.02.2.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	90 %	90 %	250,000,000	90 %	250,000,000	95 %	275,000,000	95 %	275,000,000	95 %	275,000,000	95 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Peningkatan sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	100 %	100 %	505,000,000	100 %	505,000,000	100 %	560,000,000	100 %	587,000,000	100 %	590,000,000	100 %	0		
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Fasilitasi Pemenuhan, Komitmen Izin Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	95 %	95 %	75,000,000	95 %	75,000,000	97 %	78,000,000	97 %	80,000,000	97 %	80,000,000	98 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.01	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotik, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90 %	90 %	200,000,000	90 %	200,000,000	95 %	250,000,000	95 %	250,000,000	95 %	250,000,000	95 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.02	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	90 %	90 %	80,000,000	90 %	80,000,000	93 %	82,000,000	93 %	82,000,000	95 %	85,000,000	95 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.03	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga				0		0		0		0		0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.04	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)				0		0		0		0		0	0	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.04.2.06	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Terlaksananya Pemeriksaan Pos Market Pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	95 %	95 %	150,000,000	95 %	150,000,000	95 %	150,000,000	97 %	175,000,000	97 %	175,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	
		1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Tercapainya Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	100 %	100 %	1,050,000,000	100 %	1,050,000,000	100 %	1,050,000,000	100 %	1,050,000,000	100 %	1,100,000,000	100 %	0		
		1.02.05.2.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	98 %	98 %	475,000,000	98 %	475,000,000	98 %	475,000,000	98 %	475,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.02.05.2.02	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	95 %	95 %	575,000,000	95 %	575,000,000	95 %	575,000,000	95 %	575,000,000	100 %	600,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
Presentase pelaksanaan pelayanan urusan pemerintahan yang tepat waktu																			
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelaksanaan Pelayanan Urusan Pemerintahan yang Tepat Waktu	100 %	100 %	75,214,509,500	100 %	75,318,509,500	100 %	75,737,509,500	100 %	75,943,509,500	100 %	76,218,009,500	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RAK -SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	60,000,000	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RAK, RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	150,000,000	5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	168,000,000	5 Dokumen	168,000,000	5 Dokumen	168,000,000	5 Dokumen	168,000,000	5 Dokumen	168,000,000	5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	30,000,000	3 Dokumen	35,000,000	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	52,000,000	3 Dokumen	52,000,000	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Jasa Administrasi ASN	100 %	100 %	4,950,000,000	100 %	4,950,000,000	100 %	4,975,000,000	100 %	4,975,000,000	100 %	4,985,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	10,000,000	5 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	15,000,000	5 Dokumen	17,500,000	5 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	8 Dokumen	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	25,000,000	8 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	30,000,000	8 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan dan Analisis Pronogsis Realisasi Anggaran	4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	28,000,000	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	53,523,509,500	100 %	53,523,509,500	100 %	53,523,509,500	100 %	53,523,509,500	100 %	53,523,509,500	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen LAKIP	6 Dokumen	6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	60,000,000	6 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peraturan Perundang-undangan dengan baik	100 %	100 %	46,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	52,000,000	100 %	52,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pemenuhan Kebutuhan ASN	100 %	100 %	450,000,000	100 %	450,000,000	100 %	475,000,000	100 %	475,000,000	100 %	475,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	100 %	50,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	75,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terwujudnya SDM Kesehatan Yang berkualitas	100 %	100 %	350,000,000	100 %	375,000,000	100 %	400,000,000	100 %	400,000,000	100 %	420,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Implementasi Peraturan Perundang-undangan	100 %	100 %	46,000,000	100 %	46,000,000	100 %	46,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tercapainya Peningkatan Pelayanan Perkantoran	100 %	100 %	310,000,000	100 %	310,000,000	100 %	310,000,000	100 %	350,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terciptanya sistem Manajemen Perkantoran yang Terpadu	95 %	95 %	360,000,000	95 %	360,000,000	97 %	375,000,000	97 %	375,000,000	97 %	375,000,000	97 %	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4 Dokumen	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	25,000,000	4 Dokumen	30,000,000	4 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	100,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	150,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0 Kwh	Kwh	10,000,000	Kwh	10,000,000	Kwh	12,500,000	Kwh	12,500,000	Kwh	15,000,000	0 Kwh	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	1 Paket	1 Paket	310,000,000	1 Paket	310,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhiya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	18 Unit	18 Unit	550,000,000	20 Unit	600,000,000	20 Unit	600,000,000	25 Unit	750,000,000	25 Unit	750,000,000	25 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 Paket	1 Paket	600,000,000	1 Paket	600,000,000	1 Paket	750,000,000	1 Paket	750,000,000	1 Paket	750,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Perkantoran	1 Paket	1 Paket	250,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	5,550,000,000	1 Paket	5,550,000,000	1 Paket	5,550,000,000	1 Paket	5,550,000,000	1 Paket	5,750,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Paket	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	7,000,000,000	1 Paket	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 Unit	5 Unit	100,000,000	5 Unit	100,000,000	7 Unit	150,000,000	7 Unit	150,000,000	7 Unit	175,000,000	7 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3 Unit	3 Unit	10,000,000	3 Unit	10,000,000	5 Unit	15,000,000	5 Unit	15,000,000	5 Unit	17,000,000	5 Unit	0	DINAS KESEHATAN	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Adanya Dokumen SOP	3 Dokumen	3 Dokumen	46,000,000	3 Dokumen	46,000,000	3 Dokumen	47,500,000	3 Dokumen	47,500,000	3 Dokumen	50,000,000	3 Dokumen	0	DINAS KESEHATAN	
1. Meningkatkan Fasilitas Sarana dan Prasarana Rumah Sakit				Persentase Capaian Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Sakit	70 %	72 %		75 %		80 %		90 %		100 %		100 %			
	1. Meningkatnya Fasilitas Sarana dan Prasarana yang sesuai dengan standar Tipe Rumah Sakit			Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai Standar Tipe Rumah Sakit Capaian Penilaian Akreditasi Rumah Sakit	75 % Perdana	80 % Utama		85 % Paripurna		90 % Paripurna		95 % Paripurna		100 % Paripurna		100 % Paripurna			
		1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	80 %	82 %	49,010,000,000	87 %	61,015,000,000	90 %	67,116,500,000	93 %	73,828,150,000	100 %	81,210,965,000	100 %	0		
		1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai standar kelas dan mutu Pelayanan Rumah Sakit	55 %	58 %	31,000,000,000	75 %	40,500,000,000	83 %	44,550,000,000	91 %	49,005,000,000	100 %	53,905,500,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pelayanan Kesehatan yang Paripurna sesuai standar Akreditasi Rumah Sakit	65 %	66 %	18,000,000,000	75 %	20,500,000,000	83 %	22,550,000,000	91 %	24,805,000,000	100 %	27,285,500,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		1.02.02.2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Tersajinya Informasi Data Kesehatan setiap tahunnya	45 %	50 %	10,000,000	75 %	15,000,000	83 %	16,500,000	91 %	18,150,000	100 %	19,965,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
2. Meningkatkan Mutu Pelayanan Rumah Sakit				Capaian Persentase Indikator SPM Rumah Sakit	70 %	78 %		80 %		84 %		90 %		95 %		95 %			
	1. Meningkatnya Mutu Pelayanan Rumah Sakit			Persentase Capaian Indikator SPM Rumah Sakit Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Rumah Sakit	70 % Puas	78 % Sangat Puas		80 % Sangat Puas		84 % Sangat Puas		90 % Sangat Puas		95 % Sangat Puas		95 % Sangat Puas			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Peningkatan pelaksanaan urusan Perangkat Daerah	60 %	66 %	49,909,101,100	75 %	56,930,000,000	83 %	62,623,000,000	91 %	68,885,300,000	100 %	75,773,830,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja Rumah Sakit	60 %	65 %	135,000,000	75 %	155,000,000	83 %	170,500,000	91 %	187,550,000	100 %	206,305,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Rumah Sakit	65 %	68 %	12,734,101,100	75 %	14,025,000,000	83 %	15,427,500,000	91 %	16,970,250,000	100 %	18,667,275,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian di Lingkungan Rumah Sakit	55 %	60 %	40,000,000	75 %	50,000,000	83 %	55,000,000	91 %	60,500,000	100 %	66,550,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60 %	63 %	500,000,000	75 %	600,000,000	83 %	660,000,000	91 %	726,000,000	100 %	798,600,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Penunjang Urusan Rumah Sakit	60 %	63 %	500,000,000	75 %	600,000,000	83 %	660,000,000	91 %	726,000,000	100 %	798,600,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Rumah Sakit	50 %	50 %	1,000,000,000	75 %	1,500,000,000	83 %	1,650,000,000	91 %	1,815,000,000	100 %	1,996,500,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
		X.XX.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit	41 %	66 %	35,000,000,000	75 %	40,000,000,000	83 %	44,000,000,000	91 %	48,400,000,000	100 %	53,240,000,000	100 %	0	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
Tersedianya akses air bersih dan pelayanan jaringan air minum yang merata melalui pembangunan SPAM yang berkelanjutan				Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	88 %	90 %		92 %		94 %		96 %		98 %		98 %			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Meningkatnya Infrastruktur Pengelolaan Lahan, Air Bersih dan Air Minum			Persentase Akses Air Minum Layak dan berkelanjutan	88 %	90 %		92 %		94 %		96 %		98 %		98 %			
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	70 %	75 %	30,250,000,000	80 %	87,857,000,000	85 %	96,642,700,000	90 %	106,306,970,000	100 %	116,937,667,000	100 %	0		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan jaringan air minum	60 %	60 %	30,250,000,000	65 %	33,275,000,000	70 %	36,602,500,000	75 %	40,262,750,000	80 %	44,289,025,000	80 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan mengedepankan aspek pemerataan diseluruh kecamatan wilayah Kabupaten Muna				Persentase kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	77 %	82 %		87 %		92 %		97 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya Kuantitas Jalan dan Jembatan yang dibangun/ditingkatkan/dipelihara			Persentase kualitas jalan dan jembatan dalam kondisi mantap	77 %	82 %		87 %		92 %		97 %		100 %		100 %			
		1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase kualitas jalan dalam kondisi mantap	50 %	50 %	221,000,000,000	55 %	243,100,000,000	60 %	267,410,000,000	70 %	294,151,000,000	75 %	323,566,100,000	75 %	0		
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase Jalan dengan Kondisi Mantap	40 %	40 %	221,000,000,000	45 %	243,100,000,000	50 %	267,410,000,000	55 %	294,151,000,000	60 %	323,566,100,000	60 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Pengembangan Jasa Konstruksi	95 %	95 %	200,000,000	95 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	200,000,000	100 %	0		
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase pelatihan tenaga terampil konstruksi	60 %	60 %	200,000,000	65 %	250,000,000	70 %	300,000,000	75 %	350,000,000	80 %	400,000,000	80 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi	60 %	60 %	200,000,000	65 %	250,000,000	70 %	300,000,000	75 %	350,000,000	80 %	400,000,000	80 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	Persentase tenaga terampil konstruksi yang terlatih	60 %	60 %	200,000,000	65 %	250,000,000	70 %	300,000,000	75 %	350,000,000	80 %	400,000,000	80 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi	60 %	60 %	200,000,000	65 %	250,000,000	70 %	300,000,000	75 %	350,000,000	80 %	400,000,000	80 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Terwujudnya tata ruang yang baik melalui pemerataan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan cita-cita RTRW Kabupaten Muna				Terlaksananya Penyusunan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	73 %	76 %		79 %		82 %		86 %		90 %		90 %			
	Terlaksananya penyusunan pengendalian pemanfaatn ruang			Persentase pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya	73 %	76 %		79 %		82 %		86 %		90 %		90 %			
		1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase lahan siap guna bagi kegiatan pembangunan infrastruktur strategis	86 %	88 %	22,540,000,000	90 %	24,794,000,000	92 %	27,273,400,000	94 %	30,000,740,000	96 %	33,000,814,000	96 %	0		
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kemajuan Pengembangan dan Penataan Kawasan Ibu Kota Kabupaten Muna	100 %	100 %	22,540,000,000	100 %	24,794,000,000	100 %	27,273,400,000	100 %	30,000,740,000	100 %	33,000,814,000	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Terlaksananya Penyusunan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	100 %	100 %	150,000,000	100 %	165,000,000	100 %	181,500,000	100 %	199,650,000	100 %	219,615,000	100 %	0		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR)	100 %	100 %	180,000,000	100 %	200,000,000	100 %	220,000,000	100 %	240,000,000	100 %	260,000,000	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	190,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	180,000,000	1 Dokumen	195,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	170,000,000	1 Dokumen	190,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	230,000,000	1 Dokumen	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Upaya peningkatan konservasi sumber daya air melalui revitalisasi dan optimalisasi fungsi sungai dan jaringan irigasi				Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi secara optimal	58 %	60 %		64 %		75 %		80 %		90 %		90 %			
	Meningkatnya daerah irigasi yang teraliri air secara kontinyu			Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi secara optimal	58 %	60 %		64 %		75 %		80 %		90 %		90 %			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Jumlah Jaringan Irigasi yang berfungsi secara optimal	60 %	60 %	39,000,000,000	64 %	42,900,000,000	75 %	47,190,000,000	80 %	51,909,000,000	90 %	57,099,900,000	90 %	0		
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai	50 %	50 %	26,000,000,000	55 %	28,600,000,000	60 %	31,460,000,000	65 %	34,606,000,000	70 %	38,066,600,000	0 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi	50 %	50 %	13,000,000,000	55 %	14,300,000,000	60 %	15,730,000,000	65 %	17,303,000,000	70 %	19,033,300,000	0 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak dan produktif serta penurunan persentase kawasan kumuh Kota Raha yang signifikan berdasarkan tujuh indikator kekumuhan : kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran				Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi	75 %	75 %		80 %		85 %		90 %		100 %		100 %			
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH																
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang memiliki sanitasi	65 %	65 %	29,000,000,000	70 %	31,900,000,000	75 %	35,090,000,000	80 %	38,599,000,000	85 %	42,458,900,000	85 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Terwujudnya tata ruang yang baik melalui pemerataan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan cita-cita RTRW Kabupaten Muna				Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah dan Ganti Rugi Tanah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																
		2.10.04.2.01	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sengketa tanah garapan yang terselesaikan	100 %	100 %	600,000,000	100 %	700,000,000	100 %	800,000,000	100 %	900,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN																
		2.10.05.2.01	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah ganti kerugian dan santunan tanah	100 %	100 %	600,000,000	100 %	700,000,000	100 %	800,000,000	100 %	900,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel				Persentase pelaksanaan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang baik	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Terlaksannya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel			Persentase Terlaksannya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksannya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	100 %	100 %	2,974,000,000	100 %	3,271,400,000	100 %	3,356,540,000	100 %	3,692,194,000	100 %	4,061,413,400	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100 %	167,000,000	100 %	183,700,000	100 %	202,070,000	100 %	222,277,000	100 %	244,504,700	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100 %	13,000,000	100 %	14,300,000	100 %	15,730,000	100 %	17,303,000	100 %	19,033,300	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	85,000,000	100 %	93,500,000	100 %	102,850,000	100 %	113,135,000	100 %	124,448,500	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	600,000,000	100 %	660,000,000	100 %	726,000,000	100 %	798,600,000	100 %	878,460,000	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	696,000,000	100 %	765,600,000	100 %	842,160,000	100 %	926,376,000	100 %	1,019,013,600	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	568,000,000	100 %	624,800,000	100 %	687,280,000	100 %	756,008,000	100 %	831,608,800	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	845,000,000	100 %	929,500,000	100 %	980,450,000	100 %	1,058,495,000	100 %	1,144,344,500	100 %	0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak dan produktif serta penurunan persentase kawasan kumuh Kota Raha yang signifikan berdasarkan tujuh indikator kekumuhan : kondisi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran																			
	Meningkatnya penataan kawasan permukiman kumuh			Persentase Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	73 % 75 %	75 % 78 %		80 % 80 %		85 % 85 %		90 % 90 %		95 % 95 %		100 % 100 %			
		1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Jumlah kawasan kumuh yang tertangani	75 %	78 %	3,100,000,000	80 %	6,820,000,000	85 %	7,502,000,000	90 %	8,252,200,000	95 %	9,077,420,000	100 %	0		
		1.04.03.2.02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	75 %	78 %	1,000,000,000	80 %	1,100,000,000	85 %	1,210,000,000	90 %	1,331,000,000	95 %	1,464,100,000	100 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.03.2.03	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Persentase Penyusunan Rencana Site Plan dan DED/Permukiman Kumuh	71 %	75 %	2,100,000,000	80 %	2,310,000,000	85 %	2,541,000,000	90 %	2,795,100,000	95 %	3,074,610,000	100 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	73 %	75 %	2,100,000,000	80 %	2,310,000,000	85 %	2,541,000,000	90 %	2,795,100,000	95 %	3,074,610,000	100 %	0		
		1.04.04.2.01	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	73 %	75 %	2,100,000,000	80 %	2,310,000,000	85 %	2,541,000,000	90 %	2,795,100,000	95 %	3,074,610,000	100 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
	Menurunkan Luasan Kawasan Kumuh			Persentase Rumah Layak huni	63 %	68 %		73 %		78 %		83 %		88 %		100 %			
		1.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Rumah Layak huni	63 %	68 %	4,420,000,000	73 %	4,125,000,000	78 %	4,537,500,000	83 %	4,991,250,000	88 %	5,490,375,000	100 %	0		
		1.04.02.2.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Data Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	63 %	68 %	1,800,000,000	73 %	1,980,000,000	78 %	2,178,000,000	83 %	2,395,800,000	88 %	2,635,380,000	100 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.02.2.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	1 Thn	1 Thn	550,000,000	1 Thn	605,000,000	1 Thn	665,500,000	1 Thn	732,050,000	1 Thn	805,255,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.02.2.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota dan operasional dan pemeliharaan Lingkungan Perumahan	1 Thn	1 Thn	1,400,000,000	1 Thn	1,540,000,000	1 Thn	1,694,000,000	1 Thn	1,863,400,000	1 Thn	2,049,740,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.02.2.04	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten /Kota	1 Thn	1 Thn	500,000,000	1 Thn	550,000,000	1 Thn	605,000,000	1 Thn	665,500,000	1 Thn	732,050,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.02.2.05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase Penatausahaan Pemanfaatan Rumah susun umum dan atau Rumah khusus	73 %	75 %	50,000,000	80 %	55,000,000	85 %	60,500,000	90 %	66,550,000	95 %	73,205,000	100 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		1.04.02.2.07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1 Thn	1 Thn	120,000,000	1 Thn	132,000,000	1 Thn	145,200,000	1 Thn	159,720,000	1 Thn	175,692,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Meningkatnya penanganan kondisi jalan lingkungan yang mengalami rusak ringan dan berat serta Meningkatkan kepemilikan sanitasi yang layak di setiap rumah melalui pembagunan limbah terpadu			Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	75 %	78 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %								
		1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang didukung dengan PSU	75 %	78 %	6,870,000,000	80 %	7,557,000,000	85 %	8,312,700,000	90 %	9,143,970,000	95 %	10,058,367,000	100 %	0		
		1.04.05.2.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Persentase Penyediaan PSU Perumahan untuk menunjang fungsi hunian	75 %	78 %	6,870,000,000	80 %	7,557,000,000	85 %	8,312,700,000	90 %	9,143,970,000	95 %	10,058,367,000	100 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
Meningkatkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel																			
	Terwujudnya Sistem Kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel			Persentase Peningkatan Sistem Kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel	100 %	100 %		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Sistem Kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel	100 %	100 %	1,270,000,000	100 %	1,997,000,000	100 %	2,196,700,000	100 %	2,416,370,000	100 %	2,658,007,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja, Dokumen RKA, Dokumen Perubahan RKA, Dokumen DPA SKPD, Dokumen Perubahan DPA SKPD, Dokumen LAKIP SKPD, Dokumen LPPD SKPD, Dokumen LKPI SKPD	1 Thn	1 Thn	210,000,000	1 Thn	231,000,000	1 Thn	254,100,000	1 Thn	279,510,000	1 Thn	307,461,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya administrasi keuangan perangkat daerah	1 Thn	1 Thn	81,000,000	1 Thn	89,100,000	1 Thn	98,010,000	1 Thn	107,811,000	1 Thn	118,592,100	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Laporan Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Thn	1 Thn	5,000,000	1 Thn	5,500,000	1 Thn	6,050,000	1 Thn	6,655,000	1 Thn	7,320,500	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Administrasi Perangkat Daerah	1 Thn	1 Thn	80,000,000	1 Thn	20,000,000	1 Thn	22,000,000	1 Thn	24,200,000	1 Thn	26,620,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Bahan Logistis Kantor	100 %	100 %	567,004,900	100 %	623,705,390	100 %	686,075,929	100 %	754,683,522	100 %	830,151,874	100 %	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Kendaraan Dinas Operasional, Mebel Kantor, Mesin dan Peralatan Kerja	1 Thn	1 Thn	620,000,000	1 Thn	982,000,000	1 Thn	1,080,200,000	1 Thn	1,188,220,000	1 Thn	1,307,042,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, Jasa Komunikasi, air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Thn	1 Thn	606,000,000	1 Thn	660,000,000	1 Thn	726,000,000	1 Thn	798,600,000	1 Thn	878,460,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Pejabat	1 Thn	1 Thn	420,000,000	1 Thn	981,000,000	1 Thn	1,129,100,000	1 Thn	1,242,010,000	1 Thn	1,366,211,000	1 Thn	0	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
1. Pengelolaan sarana dan prasarana pelayanan dasar pendidikan dan keamanan serta ketertiban umum																			
	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat																		
		1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase tingkat penurunan jumlah gangguan keamanan dan tindak kriminal	90 %	100 %	1,613,000,000	100 %	1,621,800,000	100 %	1,632,600,000	100 %	2,210,300,000	100 %	1,663,000,000	100 %	0		
		1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	70 %	75 %	742,300,000	80 %	748,600,000	85 %	1,321,800,000	90 %	760,000,000	95 %	772,400,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda dan Perkada	70 %	75 %	777,500,000	80 %	780,000,000	85 %	782,500,000	90 %	795,000,000	95 %	800,000,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan Aparatur	90 %	100 %	102,000,000	100 %	104,000,000	100 %	104,000,000	100 %	106,000,000	100 %	108,000,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supermasi hukum																			
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Pengelolaan Urusan Pemerintahan	90 %	100 %	17,488,700,000	100 %	17,860,350,000	100 %	17,883,410,000	100 %	17,912,700,000	100 %	17,942,800,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70 %	75 %	161,500,000	80 %	167,650,000	85 %	174,250,000	90 %	181,600,000	95 %	197,000,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah presentase pengelolaan Keuangan perangkat Daerah	70 %	75 %	4,092,600,000	80 %	4,094,900,000	85 %	4,097,200,000	90 %	4,099,800,000	95 %	4,105,900,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Presentase Jumlah Administrasi Barng Milik Daerah	70 %	75 %	11,000,000	80 %	12,000,000	85 %	13,000,000	90 %	14,000,000	95 %	16,000,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah	70 %	75 %	1,456,500,000	80 %	1,459,500,000	85 %	1,463,000,000	90 %	1,467,000,000	95 %	1,451,300,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase jumlah pengelolaan administrasi umum perangkat daerah	70 %	75 %	1,077,100,000	80 %	1,082,700,000	85 %	1,085,960,000	90 %	1,093,900,000	95 %	1,120,700,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Jumlah pemenuhan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	70 %	75 %	2,601,000,000	80 %	2,602,000,000	85 %	2,603,000,000	90 %	2,604,000,000	95 %	2,606,000,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentse jumlah pemenuhan penunjang urusan pelaksanaan tupoksi perangkat Daerah	70 %	75 %	7,644,000,000	80 %	7,991,600,000	85 %	7,992,000,000	90 %	7,992,400,000	95 %	7,992,900,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Terpeliharanya Barang Milik Daerah	70 %	75 %	433,000,000	80 %	436,000,000	85 %	439,000,000	90 %	442,000,000	95 %	447,000,000	100 %	0	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
"Meningkatnya kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak dan produktif serta penurunan persentase kawasan kumuh Kota Raha yang signifikan berdasarkan tujuh indikator kekumuhan : kondisi bangunan, jalan lingkungan ,penyediaan air minum , drainase, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran"				Meningkatnya Kualitas proteksi kebakaran	78 %	78 %		82 %		86 %		93 %		96 %		96 %			
	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran			Persentase Jumlah Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	78 %	78 %		82 %		86 %		93 %		96 %		96 %			
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Presentase Jumlah terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran	78 %	82 %	0	86 %	1,150,000,000	90 %	1,265,000,000	93 %	1,391,500,000	96 %	1,350,650,000	100 %	0		
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100 %	100 %	0	100 %	900,000,000	100 %	990,000,000	100 %	1,089,000,000	100 %	1,197,900,000	100 %	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	100 %	0	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,500,000	100 %	66,550,000	100 %	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	100 %	0	100 %	200,000,000	100 %	220,000,000	100 %	242,000,000	100 %	266,200,000	100 %	0	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
	Terlaksananya Jaminan Sosial bagi masyarakat yang usia lanjut yang tidak potensia maupun penyandang disabilitas																		
		1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase Penyandang cacat fisik dan mental serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	83 %	86 %	1,299,339,000	89 %	1,429,273,000	94 %	1,572,200,000	96 %	1,729,420,000	100 %	1,902,362,000	100 %	0		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Tersedianya Kebutuhan PMKS dalam Panti dan Luar Panti	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,449,339,200	1 Kegiatan	1,594,273,120	1 Kegiatan	1,753,700,432	1 Kegiatan	1,929,070,475	1 Kegiatan	2,121,977,523	1 Kegiatan	0	DINAS SOSIAL	
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Tersedianya Rehabilitasi Sosial PMKS	1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000	1 Kegiatan	220,000,000	1 Kegiatan	242,000,000	1 Kegiatan	266,200,000	1 Kegiatan	292,820,000	1 Kegiatan	0	DINAS SOSIAL	
		1.06.07	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase partisipasi acara-acara kestiakawanan Sosial dan kepahlawanan	83 %	86 %	1,350,000,000	89 %	1,485,000,000	94 %	1,633,500,000	96 %	1,796,850,000	100 %	1,976,535,000	100 %	0		
		1.06.07.2.01	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Tersedianya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,350,000,000	1 Kegiatan	1,485,000,000	1 Kegiatan	1,633,500,000	1 Kegiatan	1,796,850,000	1 Kegiatan	1,976,535,000	1 Kegiatan	0	DINAS SOSIAL	
Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan dan Penegakan Supremasi Hukum																			
	Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Efisien, Efektif, Transparan, Profesional dan Akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	5,306,500,000	100 %	5,837,150,000	100 %	6,420,865,000	100 %	7,062,951,500	100 %	7,769,246,650	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	158,000,000	100 %	173,800,000	100 %	191,180,000	100 %	210,298,000	100 %	231,327,800	100 %	0	DINAS SOSIAL	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	3,157,000,000	1 Tahun	3,472,700,000	1 Tahun	3,819,970,000	1 Tahun	4,201,967,000	1 Tahun	4,622,163,700	1 Tahun	0	DINAS SOSIAL	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	301,500,000	1 Tahun	331,650,000	1 Tahun	364,815,000	1 Tahun	401,296,500	1 Tahun	441,426,150	1 Tahun	0	DINAS SOSIAL	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Paket	1 Paket	500,000,000	1 Paket	550,000,000	1 Paket	605,000,000	1 Paket	665,500,000	1 Paket	732,050,000	1 Paket	0	DINAS SOSIAL	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	275,000,000	1 Tahun	302,500,000	1 Tahun	332,750,000	1 Tahun	366,025,000	1 Tahun	402,627,500	1 Tahun	0	DINAS SOSIAL	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	815,000,000	1 Tahun	896,500,000	1 Tahun	986,150,000	1 Tahun	1,084,765,000	1 Tahun	1,193,241,500	5 Tahun	0	DINAS SOSIAL	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000	100 %	121,000,000	100 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0	DINAS SOSIAL	
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan dan tanggap bencana																			
	Meningkatnya akuntabilitas dan tata kelola penanggulangan bencana			Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar fisik dan psikis	0											0			
		1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Presentase Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	80 %	80 %	4,660,000,000	87 %	5,126,000,000	90 %	5,638,600,000	95 %	6,202,460,000	100 %	6,822,706,000	100 %	0		
		1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1 Tahun	1 Tahun	220,000,000	1 Tahun	242,000,000	1 Tahun	266,200,000	1 Tahun	292,820,000	1 Tahun	322,102,000	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1 Tahun	1 Tahun	1,310,000,000	1 Tahun	1,441,000,000	1 Tahun	1,585,100,000	1 Tahun	1,743,610,000	1 Tahun	1,917,971,000	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1 Tahun	1 Tahun	2,400,000,000	1 Tahun	2,640,000,000	1 Tahun	2,904,000,000	1 Tahun	3,194,400,000	1 Tahun	3,513,840,000	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Terbentuknya Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1 Tahun	1 Tahun	730,000,000	1 Tahun	803,000,000	1 Tahun	883,300,000	1 Tahun	971,630,000	1 Tahun	1,068,793,000	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP	1 Tahun	1 Tahun	3,012,000,000	1 Tahun	3,313,200,000	1 Tahun	3,644,190,000	1 Tahun	4,008,609,000	1 Tahun	4,449,469,900	5 Tahun	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	7 Dokumen	97,000,000	7 Dokumen	106,700,000	7 Dokumen	117,370,000	7 Dokumen	129,107,000	7 Dokumen	182,017,700	35 Dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja keuangan	1 Tahun	1 Tahun	1,661,000,000	1 Tahun	1,827,100,000	1 Tahun	2,009,810,000	1 Tahun	2,210,791,000	1 Tahun	2,431,870,100	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya Sistem Administrasi Barang Milik Daerah di SKPD	2 dokumen	2 dokumen	6,000,000	2 dokumen	6,600,000	2 dokumen	6,930,000	2 dokumen	7,623,000	2 dokumen	8,385,300	10 dokumen	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	1 Tahun	1 Tahun	240,000,000	1 Tahun	264,000,000	1 Tahun	290,000,000	1 Tahun	319,440,000	1 Tahun	351,384,000	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	423,000,000	1 Tahun	465,300,000	1 Tahun	511,830,000	1 Tahun	563,013,000	1 Tahun	619,314,300	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana pemerintah daerah	1 Tahun	1 Tahun	260,000,000	1 Tahun	286,000,000	1 Tahun	314,600,000	1 Tahun	346,060,000	1 Tahun	380,666,000	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Tahun	1 Tahun	195,000,000	1 Tahun	214,500,000	1 Tahun	235,950,000	1 Tahun	259,545,000	1 Tahun	285,499,500	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	130,000,000	1 Tahun	143,000,000	1 Tahun	157,300,000	1 Tahun	173,070,000	1 Tahun	190,333,000	5 Tahun	0	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
Meningkatkan kesetaraan gender dan perlindungan perempuan	Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender			Indeks Pemberdayaan Gender	65 %	70 %		75 %		80 %		85 %		90 %		90 %			
		2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Pemahaman dalam perencanaan dan penganggaran yang responsif gender	85 %	85 %	98,593,000	87 %	108,453,000	89 %	119,298,000	91 %	131,228,000	93 %	144,351,000	93 %	0		
		2.08.02.2.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pelaksanaan PUG	100 %	100 %	98,593,500	100 %	108,452,850	100 %	119,298,135	100 %	131,227,949	100 %	144,350,743	100 %	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan pelayanan P2TP2A pada perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan	84 %	84 %	100,000,000	87 %	110,000,000	90 %	121,000,000	93 %	133,100,000	96 %	146,410,000	96 %	0		
		2.08.03.2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan dan pendampingan P2TP2A pada perlindungan perempuan dan anak yang mengalami kasus kekerasan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	110,000,000	1 Kegiatan	121,000,000	1 Kegiatan	133,100,000	1 Kegiatan	146,410,000	1 Kegiatan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan keluarga	75 %	75 %	185,000,000	80 %	203,500,000	85 %	223,850,000	90 %	246,235,000	95 %	270,858,000	95 %	0		
		2.08.04.2.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	45,000,000	1 Kegiatan	49,500,000	1 Kegiatan	54,450,000	1 Kegiatan	59,895,000	1 Kegiatan	65,884,500	1 Kegiatan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.04.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kapasitas sumberdaya lembaga penyedia layanan untuk peningkatan kualitas keluarga	1 Kegiatan	1 Kegiatan	140,000,000	1 Kegiatan	154,000,000	1 Kegiatan	169,400,000	1 Kegiatan	186,340,000	1 Kegiatan	204,974,000	1 Kegiatan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak				Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
	Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender			Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				
		2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Terlaksananya peningkatan perencanaan pengarusutamaan gender	80 %	80 %	50,000,000	82 %	55,000,000	84 %	60,500,000	86 %	66,550,000	88 %	73,205,000	88 %	0		
		2.08.05.2.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Data gender dan anak	2 Kegiatan	2 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	55,000,000	1 Kegiatan	60,500,000	1 Kegiatan	66,550,000	1 Kegiatan	73,205,000	1 Kegiatan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Partisipasi keikutsertaan anak dalam kegiatan anak nasional	81 %	81 %	140,000,000	84 %	154,000,000	90 %	169,400,000	96 %	186,340,000	100 %	204,974,000	100 %	0		
		2.08.06.2.01	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan hak anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, MEdia dan dunia usaha	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	55,000,000	1 Kegiatan	60,500,000	1 Kegiatan	66,550,000	1 Kegiatan	73,205,000	1 Kegiatan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		2.08.06.2.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Terselenggaranya pendampingan, penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak	1 Kegiatan	1 Kegiatan	90,000,000	1 Kegiatan	99,000,000	1 Kegiatan	108,900,000	1 Kegiatan	119,790,000	1 Kegiatan	131,769,000	1 Kegiatan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
Mewujudkan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																			
	Terlaksananya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		0		0		0		0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	50,000,000	8 Dokumen	55,000,000	8 Dokumen	60,500,000	8 Dokumen	66,550,000	8 Dokumen	73,205,000	8 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan tunjangan ASN	12 Bulan	12 Bulan	1,303,000,000	12 Bulan	1,433,300,000	12 Bulan	1,576,630,000	12 Bulan	1,734,293,000	12 Bulan	1,907,722,300	12 Bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya pakaian dinas beserta atributnya	1 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	20,000,000	1 Paket	22,000,000	1 Paket	24,200,000	1 Paket	26,620,000	1 Paket	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	323,000,000	12 Bulan	355,300,000	12 Bulan	390,830,000	12 Bulan	429,913,000	12 Bulan	472,904,300	12 Bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan	4 Unit	4 Unit	70,000,000	4 Unit	77,000,000	4 Unit	84,700,000	4 Unit	93,170,000	4 Unit	102,487,000	4 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa komunikasi, air dan listrik	12 Bulan	12 Bulan	140,500,000	12 Bulan	154,550,000	12 Bulan	170,005,000	12 Bulan	187,005,500	12 Bulan	205,706,050	12 Bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	50,000,000	12 Bulan	55,000,000	12 Bulan	60,500,000	12 Bulan	66,550,000	12 Bulan	73,205,000	12 Bulan	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Tersusunnya dokumen SOP dan ANJAB	2 Dokumen	2 Dokumen	32,500,000	2 Dokumen	35,750,000	2 Dokumen	39,325,000	2 Dokumen	43,257,500	2 Dokumen	47,583,250	2 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Mengembangkan Sumber Daya Alam Berkelanjutan				Persentase Pengembangan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
	Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Melalui Perluasan Areal Budidaya yang Berwawasan Lingkungan			Persentase Adanya Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Melalui Perluasan Areal yang Berwawasan Lingkungan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
		2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penanganan daerah rawan pangan.	75 %	80 %	550,000,000	85 %	579,500,000	90 %	585,000,000	85 %	592,000,000	85 %	601,000,000	100 %	0		
		2.09.04.2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan Pangan dan Kerentanan Pangan	1 Paket	1 Paket	200,000,000	1 Paket	225,500,000	1 Paket	227,000,000	1 Paket	230,000,000	1 Paket	235,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Singkronisasi Penanganan Kerawanan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	132,000,000	1 Laporan	134,000,000	1 Laporan	136,000,000	1 Laporan	138,000,000	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.04.2.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan, Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam Satu Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	220,000,000	1 Paket	222,000,000	1 Paket	224,000,000	1 Paket	226,000,000	1 Paket	228,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berorientasi Kerakyatan				Persentase Penguatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berorientasi Kerakyatan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
	Adanya Peningkatan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) dan Peternakan			Persentase Adanya Peningkatan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian dan Peternakan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
		2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Ketersediaan pangan utama	75 %	80 %	2,150,000,000	85 %	1,722,000,000	85 %	2,615,000,000	90 %	2,950,250,000	90 %	3,335,500,000	100 %	0		
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat	1 Paket	1 Paket	550,000,000	1 Paket	600,000,000	1 Paket	650,000,000	1 Paket	700,000,000	1 Paket	750,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyedia Infrastruktur Lantai Jemur	1 Paket	1 Paket	300,000,000	1 Paket	325,000,000	1 Paket	350,000,000	1 Paket	360,000,000	1 Paket	420,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	1 Paket	1 Paket	200,000,000	1 Paket	225,000,000	1 Paket	250,000,000	1 Paket	275,000,000	1 Paket	300,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Singkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	112,000,000	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	115,250,000	1 Laporan	115,500,000	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.02.2.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	1 Paket	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	1,000,000,000	1 Paket	125,000,000,000	1 Paket	1,500,000,000	1 Paket	1,750,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Kelompok Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari	75 %	80 %	2,359,000,000	80 %	2,508,500,000	75 %	2,565,000,000	80 %	2,602,500,000	80 %	3,413,500,000	100 %	0		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	1 Dokumen	1 Dokumen	37,000,000	1 Dokumen	39,500,000	1 Dokumen	42,000,000	1 Dokumen	44,500,000	1 Dokumen	47,000,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	131,500,000	1 Paket	133,000,000	1 Paket	134,500,000	1 Paket	136,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	127,500,000	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan	1 Laporan	1 Laporan	12,000,000	1 Laporan	13,000,000	1 Laporan	14,000,000	1 Laporan	15,000,000	1 Laporan	16,000,000	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	5 Kelompok	5 Kelompok	50,000,000	5 Kelompok	52,500,000	6 Kelompok	57,500,000	7 Kelompok	60,000,000	8 Kelompok	62,500,000	8 Kelompok	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Pengembangan, Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	10 Kelompok	10 Kelompok	200,000,000	10 Kelompok	215,000,000	10 Kelompok	217,500,000	11 Kelompok	220,000,000	11 Kelompok	225,000,000	11 Kelompok	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	130,000,000	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	8 Ton	8 Ton	100,000,000	9 Ton	115,000,000	10 Ton	120,000,000	10 Ton	125,000,000	11 Ton	130,000,000	11 Ton	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	112,000,000	1 Laporan	114,000,000	1 Laporan	116,000,000	1 Laporan	118,000,000	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Perkapita Tahunan	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	215,000,000	1 Dokumen	217,000,000	1 Dokumen	218,000,000	1 Dokumen	219,000,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Paket	1 Paket	1,260,000,000	1 Paket	1,270,000,000	1 Paket	1,280,000,000	1 Paket	1,290,000,000	1 Paket	2,000,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.03.2.04	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Perkapita Tahunan	1 Laporan	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	115,000,000	1 Laporan	125,000,000	1 Laporan	127,000,000	1 Laporan	200,000,000	1 Laporan	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	70 %	70 %	375,000,000	85 %	429,500,000	90 %	444,000,000	90 %	455,500,000	90 %	481,000,000	100 %	0		
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penguatan, Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	15 Kelompok	15 Kelompok	100,000,000	20 Kelompok	115,500,000	25 Kelompok	116,000,000	25 Kelompok	117,500,000	25 Kelompok	130,000,000	25 Kelompok	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	110,000,000	1 Paket	115,000,000	1 Paket	120,000,000	1 Paket	125,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	50,000,000	1 Paket	57,000,000	1 Paket	59,000,000	1 Paket	60,000,000	1 Paket	63,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	25,000,000	1 Paket	27,000,000	1 Paket	29,000,000	1 Paket	31,000,000	1 Paket	33,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		2.09.05.2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Paket	1 Paket	100,000,000	1 Paket	120,000,000	1 Paket	125,000,000	1 Paket	127,000,000	1 Paket	130,000,000	1 Paket	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Supremasi Hukum				Persentase Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Supremasi Hukum	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel			Persentase Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	900,900,000	100 %	976,000,000	100 %	1,041,350,000	100 %	1,110,650,000	100 %	1,176,470,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	14,600,000	1 Dokumen	14,640,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,000,000	1 Dokumen	14,600,000	1 Dokumen	14,640,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	7,500,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	52,500,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	56,000,000	1 Dokumen	57,000,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	95,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	120,000,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	7,000,000	1 Dokumen	8,000,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	4,000,000	1 Dokumen	4,500,000	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,250,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	50 Set	50 Set	55,000,000	50 Set	60,000,000	50 Set	62,500,000	50 Set	65,000,000	60 Set	67,500,000	60 Set	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	2 Orang	2 Orang	50,000,000	3 Orang	55,000,000	4 Orang	57,500,000	5 Orang	60,000,000	6 Orang	62,500,000	6 Orang	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	2,500,000	1 Tahun	3,000,000	1 Tahun	3,500,000	1 Tahun	4,000,000	1 Tahun	4,500,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1 Tahun	1 Tahun	42,000,000	1 Tahun	45,000,000	1 Tahun	48,000,000	1 Tahun	51,000,000	1 Tahun	54,000,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	1 Tahun	1 Tahun	8,500,000	1 Tahun	9,000,000	1 Tahun	9,500,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	10,500,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	1 Tahun	1 Tahun	5,400,000	1 Tahun	6,000,000	1 Tahun	6,600,000	1 Tahun	7,200,000	1 Tahun	7,800,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Tahun	1 Tahun	200,000,000	1 Tahun	220,000,000	1 Tahun	240,000,000	1 Tahun	260,000,000	1 Tahun	280,000,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah penyediaan jasa surat-menyurat	1 Tahun	1 Tahun	2,500,000	1 Tahun	3,000,000	1 Tahun	3,250,000	1 Tahun	3,500,000	1 Tahun	3,750,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	1 Tahun	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	25,000,000	1 Tahun	27,500,000	1 Tahun	30,000,000	1 Tahun	32,500,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	57,500,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	62,500,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahun	80,000,000	1 Tahun	90,000,000	1 Tahun	100,000,000	1 Tahun	110,000,000	1 Tahun	120,000,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Gedung Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	40,000,000	1 Tahun	42,500,000	1 Tahun	45,000,000	1 Tahun	47,500,000	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1 Tahun	1 Tahun	50,000,000	1 Tahun	52,500,000	1 Tahun	55,000,000	1 Tahun	57,500,000	1 Tahun	60,000,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Tahun	1 Tahun	7,000,000	1 Tahun	8,000,000	1 Tahun	9,000,000	1 Tahun	10,000,000	1 Tahun	11,000,000	1 Tahun	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	57,500,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	62,500,000	1 Dokumen	0	DINAS KETAHANAN PANGAN	
Mengembangkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan																			
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	76,85 Poin	76,85 Poin		77,41 Poin		78,11 Poin		78,79 Poin		79,47 Poin		79,47 Poin			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	55 %	65 %	80,000,000	70 %	100,000,000	75 %	120,000,000	80 %	140,000,000	85 %	160,000,000	100 %	0		
		2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Masyarakat dan Lembaga Pendidikan yang Mengikuti Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan sampai Tahun n	5 Kegiatan	5 Kegiatan	80,000,000	7 Kegiatan	100,000,000	9 Kegiatan	120,000,000	11 Kegiatan	140,000,000	13 Kegiatan	160,000,000	13 Kegiatan	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Meningkatnya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Efisien, Efektif, Transparan, Transparan dan Akuntabel																			
	Terwujudnya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang Bersih, Efisien, Efektif, Transparan, Transparan dan Akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	7,898,748,280	100 %	7,811,548,280	100 %	7,947,428,280	100 %	8,098,156,280	100 %	8,471,319,080	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan (CK) dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja	100 %	100 %	140,000,000	100 %	167,000,000	100 %	199,300,000	100 %	230,750,000	100 %	267,289,000	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dokumen administrasi keuangan yang disusun	100 %	100 %	3,628,298,280	100 %	3,636,298,280	100 %	3,645,098,280	100 %	3,654,778,280	100 %	3,665,426,289	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Fasilitas Administrasi Kepegawaian	100 %	100 %	210,000,000	100 %	210,000,000	100 %	210,000,000	100 %	210,000,000	100 %	210,000,000	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sarana Prasarana Pendukung Pengadministrasian Umum yang Disediakan	100 %	100 %	458,000,000	100 %	503,800,000	100 %	554,180,000	100 %	609,598,000	100 %	670,557,800	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang yang Diadakan	100 %	100 %	520,000,000	100 %	630,000,000	100 %	762,000,000	100 %	850,800,000	100 %	953,520,000	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jasa Penunjang Pelayanan Umum yang Disediakan	100 %	100 %	3,317,450,000	100 %	3,323,450,000	100 %	3,330,650,000	100 %	3,339,290,000	100 %	3,349,658,000	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang yang Dipelihara	100 %	100 %	105,000,000	100 %	131,000,000	100 %	168,200,000	100 %	213,740,000	100 %	268,388,000	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Tertatanya Kelembagaan Organisasi	100 %	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	40,000,000	100 %	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	
Terciptanya pelayanan publik pada setiap unit pelayanan pemerintah yang didasarkan pada standar pelayanan.																			
	Terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik administrasi kependudukan dan pencatatan sipil			Presentase penduduk yang memiliki Akta Pencatatan Sipil Presentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP-eL.	95 % 96.58 %	82,42 % 96.58 %		84 % 98,46 %		86 % 99 %		88 % 99,30 %		90 % 99,60 %		95 % 100 %			
		2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Terlaksananya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	90 %	99 %	656,000,000	99 %	758,000,000	99 %	789,000,000	99 %	833,000,000	99 %	922,000,000	100 %	0		
		2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Presentase dokumen pendaftaran penduduk KTP, KK, KIA yang diterbitkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	3,098,000,000	1 Kegiatan	3,407,800,000	1 Kegiatan	3,748,580,000	1 Kegiatan	4,123,438,000	1 Kegiatan	4,535,781,800	5 Kegiatan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Terlaksananya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	95 %	99 %	613,000,000	99 %	742,000,000	99 %	750,000,000	99 %	815,000,000	99 %	902,000,000	100 %	0		
		2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Presentase Dokumen Pencatatan Sipil Akta kelahiran, Akta Kematian dan Akta lainnya yang diterbitkan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	232,264,250	1 Kegiatan	232,264,250	1 Kegiatan	232,264,250	1 Kegiatan	232,264,250	1 Kegiatan	232,264,250	5 Kegiatan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Terlaksananya Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan	99 %	99 %	688,000,000	99 %	616,800,000	99 %	748,480,000	99 %	883,328,000	99 %	921,660,000	99 %	0		
		2.12.04.2.02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Buku dan data administrasi Kependudukan yang dikelola	1 Kegiatan	1 Kegiatan	288,000,000	1 Kegiatan	316,800,000	1 Kegiatan	348,480,000	1 Kegiatan	383,328,000	1 Kegiatan	421,660,800	5 Kegiatan	0	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	92,500,000	4 Dokumen	101,750,000	4 Dokumen	111,925,000	4 Dokumen	123,117,500	4 Dokumen	135,429,250	4 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	5 Dokumen	5 Dokumen	39,000,000	5 Dokumen	42,900,000	5 Dokumen	47,190,000	5 Dokumen	51,909,000	5 Dokumen	57,099,900	5 Dokumen	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Paket	2 Paket	40,000,000	2 Paket	110,000,000	2 Paket	44,000,000	2 Paket	48,400,000	2 Paket	53,240,000	2 Paket	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum yang Akuntabel	1 Tahun	1 Tahun	312,000,000	1 Tahun	343,200,000	1 Tahun	377,520,000	1 Tahun	415,272,000	1 Tahun	456,799,200	1 Tahun	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	10 Unit	10 Unit	518,000,000	8 Unit	399,800,000	6 Unit	263,780,000	8 Unit	370,158,000	8 Unit	319,173,800	8 Unit	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	390,000,000	1 Tahun	429,000,000	1 Tahun	471,900,000	1 Tahun	519,090,000	1 Tahun	570,999,000	1 Tahun	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	1 Tahun	1 Tahun	318,000,000	1 Tahun	349,800,000	1 Tahun	324,280,000	1 Tahun	356,708,000	1 Tahun	392,378,800	1 Tahun	0	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan Gender																			
	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk serta meningkatnya upaya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat dan keadilan gender																		
		2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Terwujudnya Program Pengendalian Penduduk	0 %	100 %	1,975,000,000	100 %	2,490,000,000	100 %	2,565,000,000	100 %	2,629,500,000	100 %	2,693,000,000	100 %	0		
		2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	865,000,000	100 %	1,060,000,000	100 %	1,085,000,000	100 %	109,000,000,000	100 %	1,105,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.02.2.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terwujudnya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah	100 %	100 %	1,240,000,000	100 %	1,545,000,000	100 %	1,575,000,000	100 %	1,609,500,000	100 %	1,638,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Terselenggaranya Program Keluarga Berencana (KB)	0 %	100 %	7,145,000,000	100 %	7,190,000,000	100 %	7,805,000,000	100 %	8,499,000,000	100 %	8,943,000,000	100 %	0		
		2.14.03.2.01	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Terwujudnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan Budaya Lokal	0 %	100 %	2,410,000,000	100 %	2,730,000,000	100 %	3,020,000,000	100 %	3,462,000,000	100 %	3,585,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.02	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Terwujudnya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	100 %	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	375,000,000	100 %	380,000,000	100 %	385,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.03	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pengendalian dan Pendistribusian kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	3,360,000,000	100 %	2,810,000,000	100 %	2,965,000,000	100 %	3,117,000,000	100 %	3,243,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.03.2.04	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan Ber-KB	Terselenggaranya Pemberdayaan dan Peningkatan peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesetaraan ber-KB	0 %	100 %	1,075,000,000	100 %	1,300,000,000	100 %	1,445,000,000	100 %	1,540,000,000	100 %	1,630,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Terlaksananya Bina Keluarga Balita	0 %	100 %	2,175,000,000	100 %	2,630,000,000	100 %	3,040,000,000	100 %	3,365,000,000	100 %	3,865,000,000	100 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		2.14.04.2.01	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	0 %	100 %	1,875,000,000	100 %	2,230,000,000	100 %	2,565,000,000	100 %	2,855,000,000	100 %	3,325,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		2.14.04.2.02	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Terselenggaranya Pelaksanaan dan peningkatan peran serta Organisasi masyarakat Tingkat Daerah kabupaten/kota dalam Pembangunan keluarga melalui Pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	0 %	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	475,000,000	100 %	510,000,000	100 %	540,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
terciptanya sistem kelembagaan dan ketataalaksanaan pemerintah yang bersih,efisien,efektif,transparan ,profesional dan akuntabel				Persentase peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih,rfisien, efektif,transparan,profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersih,efisien,efektif,transparan,profesional dan akuntabel			Persentase peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,efisien,efektif,transparan,profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Mewujudkan Pelayanan Perkantoran yang baik	100 %	100 %	5,180,823,600	100 %	5,757,825,800	100 %	5,984,825,800	100 %	6,010,325,800	100 %	6,035,825,800	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	215,000,000	100 %	280,000,000	100 %	290,000,000	100 %	293,000,000	100 %	300,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tertibnya Adinistrasi keuangan perangkat daerah	100 %	100 %	2,440,411,800	100 %	2,681,412,900	100 %	2,781,412,900	100 %	2,781,412,900	100 %	2,781,412,900	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tertibnya Pengadministrasian Barang Milik Daerah	100 %	100 %	50,000,000	100 %	65,000,000	100 %	72,000,000	100 %	77,500,000	100 %	83,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tertibnya pengadministrasian Kepegawaian Perangkat daerah	100 %	100 %	125,000,000	100 %	165,000,000	100 %	175,000,000	100 %	185,000,000	100 %	195,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	403,000,000	100 %	467,500,000	100 %	472,500,000	100 %	487,500,000	100 %	487,500,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1,235,000,000	100 %	1,500,000,000	100 %	1,525,000,000	100 %	1,650,000,000	100 %	1,725,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemda	100 %	100 %	65,000,000	100 %	82,500,000	100 %	88,000,000	100 %	88,500,000	100 %	89,000,000	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	420,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,750,000	100 %	16,517,500	100 %	0	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	
Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemukiman masyarakat																			
	Peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana dasar pendukung aksesibilitas kawasan perkotaan dan perdesaan																		
		2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Tersedianya Rambu-Rambu Lalu Lintas	75 %	78 %	4,200,000,000	82 %	4,620,000,000	85 %	5,082,000,000	90 %	6,149,220,000	95 %	6,764,142,000	100 %	0		
		2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Induk Jaringan Jalan LLAJ Kabupaten Kota ten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	292,820,000	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	4 Kegiatan	4 Kegiatan	500,000,000	4 Kegiatan	550,000,000	4 Kegiatan	605,000,000	4 Kegiatan	665,500,000	4 Kegiatan	732,050,000	4 Kegiatan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Tersedianya Terminal Penumpang Tipe C yang sesuai standar Kemenhub	5 Unit	5 Unit	10,700,000,000	5 Unit	11,770,000,000	5 Unit	12,947,000,000	5 Unit	14,241,700,000	5 Unit	15,665,870,000	5 Unit	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Ketersediaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir/izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	3 Kegiatan	1,200,000,000	3 Kegiatan	1,320,000,000	3 Kegiatan	1,452,000,000	3 Kegiatan	1,597,200,000	3 Kegiatan	1,756,920,000	3 Kegiatan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Ketersediaan Gedung Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dan Peralatan Mekanisnya yang Tersedia	1 Paket	1 Paket	2,930,000,000	1 Paket	3,223,000,000	1 Paket	3,545,300,000	1 Paket	3,899,830,000	1 Paket	4,289,813,000	1 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.06	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Terlaksananya Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	4 Laporan	4 Laporan	750,000,000	4 Laporan	825,000,000	4 Laporan	907,500,000	4 Laporan	998,250,000	4 Laporan	1,098,075,000	4 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.07	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Ketersediaan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	4 Dokumen	4 Dokumen	360,000,000	4 Dokumen	396,000,000	4 Dokumen	435,600,000	4 Dokumen	479,160,000	4 Dokumen	527,076,000	4 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.08	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	5 Laporan	5 Laporan	600,000,000	5 Laporan	660,000,000	5 Laporan	726,000,000	5 Laporan	798,600,000	5 Laporan	878,460,000	5 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	292,820,000	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.11	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	292,820,000	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.12	Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	292,820,000	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.13	Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Ketersediaan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	1 Dokumen	146,410,000	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	121,000,000	1 Dokumen	133,100,000	1 Dokumen	146,410,000	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.02.2.15	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2 Laporan	2 Laporan	200,000,000	2 Laporan	220,000,000	2 Laporan	242,000,000	2 Laporan	266,200,000	2 Laporan	292,820,000	2 Laporan	0	DINAS PERHUBUNGAN	
Meningkatkan jangkauan dan kualitas infrastruktur pendukung konektivitas wilayah pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pemukiman masyarakat																			
	Terwujudnya sarana dan prasarana dermaga/pelabuhan rakyat yang sesuai standar																		
		2.15.03	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Presentase Tersedianya Sarana Prasarana Pelayaran	65 %	70 %	0	75 %	0	80 %	0	90 %	0	95 %	0	95 %	0		
		2.15.03.2.10	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/ Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal	1 Dokumen	1 Dokumen	500,000,000	1 Dokumen	550,000,000	1 Dokumen	605,000,000	1 Dokumen	665,500,000	1 Dokumen	732,050,000	1 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	5 Paket	5 Paket	9,500,000,000	5 Paket	10,450,000,000	5 Paket	11,495,000,000	5 Paket	12,644,500,000	5 Paket	13,908,950,000	5 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.2.13	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Terlaksananya Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	5 Paket	5 Paket	7,500,000,000	5 Paket	8,250,000,000	5 Paket	9,075,000,000	5 Paket	9,982,500,000	5 Paket	10,980,750,000	5 Paket	0	DINAS PERHUBUNGAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.15.03.2.14	Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	302,500,000	2 Dokumen	332,750,000	2 Dokumen	366,025,000	2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.2.15	Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Izin Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	1,250,000,000	2 Dokumen	1,375,000,000	2 Dokumen	1,512,500,000	2 Dokumen	1,663,750,000	2 Dokumen	1,830,125,000	2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.2.16	Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	302,500,000	2 Dokumen	332,750,000	2 Dokumen	366,025,000	2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		2.15.03.2.18	Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Tersedianya Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Lokal	2 Dokumen	2 Dokumen	250,000,000	2 Dokumen	275,000,000	2 Dokumen	302,500,000	2 Dokumen	332,750,000	2 Dokumen	366,025,000	2 Dokumen	0	DINAS PERHUBUNGAN	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		0		0		0		0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan LKIP, Renja, RKA, DPALaporan Keuangan, dan laporan Aset OPD tepat waktu	100 %	100 %	195,000,000	100 %	214,500,000	100 %	235,950,000	100 %	247,445,000	100 %	262,872,500	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	3,767,661,400	100 %	4,144,427,540	100 %	4,558,870,294	100 %	5,014,757,323	100 %	5,516,233,056	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata pelayanan kebutuhan pegawai yang efektif dan efisien	100 %	100 %	610,000,000	100 %	671,000,000	100 %	738,100,000	100 %	811,910,000	100 %	893,101,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien	100 %	100 %	740,000,000	100 %	814,000,000	100 %	895,400,000	100 %	984,940,000	100 %	1,083,434,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur n yang Disediakan	100 %	100 %	2,750,000,000	100 %	3,025,000,000	100 %	3,327,500,000	100 %	3,660,250,000	100 %	3,999,655,000	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata pelayanan jasa penunjang perkantoran yang efektif dan efisien	100 %	100 %	1,466,500,000	100 %	1,613,150,000	100 %	1,774,465,000	100 %	1,951,911,500	100 %	2,147,102,650	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100 %	855,000,000	100 %	940,500,000	100 %	1,034,550,000	100 %	1,138,005,000	100 %	1,251,805,500	100 %	0	DINAS PERHUBUNGAN	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi				0		0		0		0		0		0	DINAS PERHUBUNGAN	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan Publik	C Tingkat Kepuasan	B Tingkat Kepuasan		B Tingkat Kepuasan		B Tingkat Kepuasan		A Tingkat Kepuasan		A Tingkat Kepuasan		A Tingkat Kepuasan			
	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika			Persentase Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika	84 %	90 %		97 %		99 %		100 %		100 %		100 %			
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika	84 %	90 %	11,480,000,000	97 %	13,230,000,000	99 %	15,350,000,000	100 %	17,400,000,000	100 %	19,350,000,000	100 %	0		
		2.16.03.2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain diLingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	50 %	100 %	4,080,000,000	100 %	4,700,000,000	100 %	5,750,000,000	100 %	6,800,000,000	100 %	7,850,000,000	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Muna	100 %	100 %	7,400,000,000	100 %	8,530,000,000	100 %	9,600,000,000	100 %	10,600,000,000	100 %	11,500,000,000	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Muna	33 %	100 %	5,400,000,000	100 %	6,005,000,000	100 %	6,455,000,000	100 %	6,900,000,000	100 %	7,360,000,000	100 %	0	DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN	
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik				Tingkat Kepuasan Masyarakat Terkait Layanan Publik	C Tingkat Kepuasan	B Tingkat Kepuasan		B Tingkat Kepuasan		B Tingkat Kepuasan		A Tingkat Kepuasan		A Tingkat Kepuasan		A Tingkat Kepuasan			
	Tercapainya Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral			Persentase Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	70 %	76 %		81 %		83 %		87 %		100 %		100 %			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	semakin mantapnya struktur perekonomian daerah yang di dukung oleh semakin meningkatnya peran dan fungsi UMKM dan Koperasi																		
		2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Dokumen Penyusunan Profil UMKM	1 Dokumen	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0	1 Dokumen	0		
		2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Terlaksananya Pendataan UMKM	100 UMKM	100 UMKM	700,000,000	120 UMKM	770,000,000	150 UMKM	847,000,000	180 UMKM	931,700,000	250 UMKM	1,024,870,000	250 UMKM	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kerakyatan																			
	Meningkatnya penciptaan peluang usaha dan start-up, serta melakukan pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi.																		
		2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Koperasi yang ditata kelembagaannya	75 %	75 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0		
		2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	500,000,000	1 Kegiatan	550,000,000	1 Kegiatan	605,000,000	1 Kegiatan	665,500,000	1 Kegiatan	732,050,000	1 Kegiatan	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kerakyatan																			
	Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk UMKM dan koperasi																		
		2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Jumlah Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam	90 %	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		2.17.02.2.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam	100 %	100 %	200,000,000	100 %	220,000,000	100 %	242,000,000	100 %	266,200,000	100 %	292,820,000	100 %	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Prosentase Peningkatan penilaian kesehatan, KSP/USP	72 %	75 %	0	80 %	0	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0		
		2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP	2 Kegiatan	2 Kegiatan	300,000,000	Kegiatan	330,000,000	Kegiatan	363,000,000	Kegiatan	399,300,000	Kegiatan	439,230,000	5 Kegiatan	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi kerakyatan																			
	semakin mantapnya struktur perekonomian daerah yang di dukung oleh semakin meningkatnya peran dan fungsi UMKM dan Koperasi																		
		2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Peningkatan Tenaga Perkoperasian	90 %	95 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	2 Kegiatan	2 Kegiatan	270,000,000	2 Kegiatan	297,000,000	2 Kegiatan	326,700,000	2 Kegiatan	359,370,000	2 Kegiatan	395,307,000	2 Kegiatan	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
		2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Produk UMKM yang di promosikan	100 %	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		2.17.08.2.01	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100,000,000	1 Kegiatan	110,000,000	1 Kegiatan	121,000,000	1 Kegiatan	133,100,000	1 Kegiatan	146,410,000	1 Kegiatan	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
Meningkatkan iklim investasi daerah yang kompetitif																			
	Meningkatnya investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan																		
		2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah penerima Dana Bantuan Pemerintah	85 %	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		2.17.03.2.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	100 Koperasi	110 Koperasi	300,000,000	120 Koperasi	325,000,000	130 Koperasi	352,250,000	140 Koperasi	381,962,500	150 Koperasi	414,370,625	160 Koperasi	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	Terciptanya pelayanan publik pada setiap unit pelayanan pemerintah yang didasarkan pada standar pelayanan.																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		0		0		0		0		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,083,000,000	100 %	1,161,300,000	100 %	1,187,230,000	100 %	1,389,953,000	100 %	1,522,548,300	100 %	0	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	
meningkatnya investasi secara bertahap terutama di kawasan prioritas sehingga peranannya terhadap PDRB meningkat dengan penyebaran yang semakin merata																			
	Indeks kepuasan publik terhadap pelayanan perizinan																		
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	65 %	70 %	800,000,000	75 %	890,000,000	80 %	1,010,000,000	85 %	1,130,000,000	90 %	1,200,000,000	100 %	0		
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	70 %	75 %	800,000,000	85 %	890,000,000	90 %	1,010,000,000	95 %	1,130,000,000	98 %	1,200,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
	Meningkatnya investor baru																		
		2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Jumlah Nilai Investasi PMDN dan PMA	75 %	80 %	785,000,000	83 %	860,000,000	86 %	960,000,000	89 %	1,070,000,000	92 %	1,170,000,000	100 %	0		
		2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan pemberian fasilitas/ insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah	70 %	75 %	335,000,000	80 %	370,000,000	85 %	430,000,000	90 %	500,000,000	95 %	570,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah laporan peta potensi investasi	70 %	75 %	450,000,000	85 %	490,000,000	90 %	530,000,000	94 %	570,000,000	98 %	600,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Tersedianya sitem	80 %	87 %	350,000,000	94 %	370,000,000	96 %	390,000,000	99 %	430,000,000	100 %	500,000,000	100 %	0		
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pameran penanaman modal	70 %	75 %	350,000,000	80 %	370,000,000	85 %	390,000,000	90 %	430,000,000	95 %	500,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Informasi Penanaman Modal	70 %	75 %	750,000,000	80 %	820,000,000	85 %	900,000,000	90 %	950,000,000	95 %	1,050,000,000	100 %	0		
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan movev penanaman modal	70 %	75 %	750,000,000	80 %	830,000,000	85 %	900,000,000	90 %	950,000,000	95 %	1,050,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase laporan pengaduan yang ditindak lanjuti	65 %	70 %	250,000,000	75 %	270,000,000	80 %	290,000,000	85 %	300,000,000	90 %	320,000,000	100 %	0		
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah dokumen yang di terbitkan	65 %	70 %	250,000,000	75 %	270,000,000	80 %	290,000,000	85 %	300,000,000	97 %	320,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supermasi hukum																			
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pelaksanaan tatakelola administrasi dan pelaporan OPD yang akuntabel	65 %	70 %	5,301,000,000	80 %	6,194,500,000	85 %	7,103,200,000	90 %	7,643,500,000	95 %	8,281,500,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terlaksana	65 %	70 %	179,000,000	75 %	202,500,000	80 %	225,500,000	85 %	250,000,000	90 %	258,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	65 %	70 %	2,512,000,000	75 %	3,013,000,000	80 %	3,513,200,000	85 %	3,614,000,000	95 %	3,815,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi kepegawain yang efektif	65 %	70 %	115,000,000	75 %	125,000,000	80 %	135,000,000	85 %	145,000,000	90 %	160,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase cakupan administrasi umum perangkat daerah yang tepat waktu	70 %	75 %	965,000,000	80 %	1,078,000,000	85 %	1,190,500,000	90 %	1,303,000,000	95 %	1,415,500,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan kebutuhan barang milik daerah	75 %	80 %	350,000,000	85 %	450,000,000	90 %	550,000,000	93 %	650,000,000	98 %	750,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan cakupan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	65 %	75 %	380,000,000	80 %	416,000,000	85 %	489,000,000	90 %	543,000,000	95 %	599,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya cakupan pemeliharaan barang milik daerah	70 %	80 %	800,000,000	85 %	910,000,000	90 %	1,000,000,000	95 %	1,130,000,000	98 %	1,260,000,000	100 %	0	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
Meningkatkan daya saing masyarakat dan pemuda serta kesetaraan gender				Persentase peningkatan Pembinaan Kreatifitas Kepemudaan	80 Persen	83 Persen		85 Persen		87 Persen		90 Persen		95 Persen		95 Persen			
	Peningkatan kesejahteraan dan keadilan gender			Indeks Pemberdayaan Gender	4 Persen	4 Persen		4 Persen		4 Persen		4 Persen		4 Persen		4 Persen			
		2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Presentase meningkatnya keterampilan dan produktifitas kerja pemuda Presentase pelaksanaan pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan	100 % 100 %	100 % 100 %	536,637,500 536,637,500	100 % 100 %	650,000,000 650,000,000	100 % 100 %	670,000,000 670,000,000	100 % 100 %	690,000,000 690,000,000	100 % 100 %	700,000,000 700,000,000	100 % 100 %	0 0		
		2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten Muna	100 %	100 %	536,637,500	100 %	950,000,000	100 %	1,030,000,000	100 %	1,220,000,000	100 %	1,300,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Presentase cakupan pembinaan olahraga Presentase pelaksanaan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaan	25 % 100 %	30 % 100 %	7,988,361,000 26,627,870,000	30 % 100 %	3,150,000,000 10,500,000,000	40 % 100 %	4,280,000,000 10,700,000,000	40 % 100 %	4,320,000,000 10,800,000,000	50 % 100 %	5,500,000,000 11,000,000,000	100 % 100 %	0 0		
		2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah	100 %	100 %	22,940,000,000	100 %	100,000,000	100 %	155,000,000	100 %	160,000,000	100 %	180,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Olah Raga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	0	100 %	300,000,000	100 %	330,000,000	100 %	350,000,000	100 %	400,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olah Raga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	100 %	100 %	3,687,870,000	100 %	800,000,000	100 %	850,000,000	100 %	920,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	100 %	100 %	0	100 %	175,000,000	100 %	200,000,000	100 %	223,000,000	100 %	250,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang tepat waktu	100 Persen	100 Persen	1,939,046,824	100 Persen	2,100,000,000	100 Persen	2,150,000,000	100 Persen	2,200,000,000	100 Persen	2,250,000,000	100 Persen	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	17,699,000	100 %	113,400,000	100 %	123,000,000	100 %	133,000,000	100 %	144,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,794,111,074	100 %	3,705,500,000	100 %	3,805,800,000	100 %	4,500,000,000	100 %	4,700,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	0	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	70,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,675,000	100 %	339,000,000	100 %	425,000,000	100 %	445,000,000	100 %	450,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	9,555,750	100 %	110,000,000	100 %	155,000,000	100 %	350,000,000	100 %	450,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	0	100 %	80,000,000	100 %	95,000,000	100 %	110,000,000	100 %	135,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	11,186,000	100 %	355,000,000	100 %	360,000,000	100 %	375,000,000	100 %	380,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Terlaksananya Kegiatan Penataan Organisasi	100 %	100 %	5,820,000	100 %	10,000,000	100 %	15,000,000	100 %	15,000,000	100 %	25,000,000	100 %	0	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
meningkatkan pendidikan yang baik dan bermutu																			
	Meningkatnya gemar budaya membaca																		
		2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase pengembangan perpustakaan dan pembudayaan jumlah membaca	70 %	75 %	11,171,000,000	80 %	1,259,500,000	85 %	1,299,800,000	90 %	1,351,200,000	95 %	1,490,500,000	100 %	0		
		2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan perpustakaan tingkat daerah kabupaten /kota	20 perpustakaan	20 perpustakaan	555,400,000	25 perpustakaan	681,000,000	30 perpustakaan	726,100,000	35 perpustakaan	743,800,000	45 perpustakaan	764,700,000	50 perpustakaan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota tahun berjalan	500 pengunjung	670 pengunjung	417,000,000	715 pengunjung	490,000,000	770 pengunjung	535,400,000	750 pengunjung	556,000,000	900 pengunjung	655,000,000	1000000 pengunjung	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
meningkatkan pendidikan yang baik dan bermutu																			
	Meningkatnya SDM kearsipan																		
		2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase pengelolaan arsip	75 %	80 %	500,000,000	85 %	523,000,000	90 %	535,000,000	95 %	571,000,000	100 %	593,400,000	100 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan arsip dinamis daera kabupaten kota	250 Arsip	300 Arsip	175,000,000	350 Arsip	190,000,000	350 Arsip	190,000,000	400 Arsip	210,000,000	450 Arsip	215,400,000	500 Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan arsip statis daerah kabupaten /kota tahun berjalan	250 Dokumen Arsip	450 Dokumen Arsip	175,000,000	458 Dokumen Arsip	181,000,000	500 Dokumen Arsip	187,000,000	600 Dokumen Arsip	197,000,000	700 Dokumen Arsip	210,000,000	750 Dokumen Arsip	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.24.02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan simpul jaringan informasi kearsipan Nasional tingkat kabupaten/kotatert	200 informasi	258 informasi	112,000,000	300 informasi	150,000,000	300 informasi	152,000,000	400 informasi	154,000,000	450 informasi	164,000,000	500 informasi	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Penyelamatan, pelestarian dan penyelenggaraan kearsipan	75 %	80 %	189,290,000	85 %	206,590,000	90 %	253,084,000	95 %	226,242,000	100 %	256,140,000	100 %	0		
		2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah dokumen pemusnahan arsip di lingkungan pemerintah daerah daerah yang memiliki retensi dibawah 10(sepuluh)tahun,tahun berjalan	400 Dokumen	500 Dokumen	227,100,000	550 Dokumen	189,290,000	600 Dokumen	206,590,000	600 Dokumen	253,084,000	800 Dokumen	226,424,500	850 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		2.24.03.2.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	Jumlah Kecamatan/Sekolah/De sa yang dikunjungi tahun berjalan	10 Kegiatan	19 Kegiatan	50,400,000	21 Kegiatan	59,940,000	22 Kegiatan	64,470,000	21 Kegiatan	68,904,500	21 Kegiatan	77,560,000	25 Kegiatan	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	terciptanya sistim kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih,efisien,efektif,transparan,profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presntase pelaksanaan tata kelola administrasi dan pelaporan OPD yang Akuntabl	100 %	100 %	800,000,000	100 %	900,000,000	100 %	1,000,000,000	100 %	1,010,000,000	100 %	1,020,000,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	80,000,000	100 %	90,000,000	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000	100 %	120,000,000	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya jasa administrasi keuangan	3 Dokumen	4 Dokumen	1,426,431,200	5 Dokumen	1,807,323,400	7 Dokumen	1,989,469,700	8 Dokumen	2,088,943,185	10 Dokumen	2,193,390,344	12 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2 Dokumen	3 Dokumen	37,500,000	4 Dokumen	43,000,000	5 Dokumen	46,003,000	6 Dokumen	45,650,000	7 Dokumen	51,473,500	8 Dokumen	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	20,000,000	100 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	ersentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Setda	100 %	100 %	40,000,000	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan Jasa Urusan Penunjang Pemerintahan Setda yang tepat Waktu	100 %	100 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Setda Tepat Waktu	100 %	100 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
Mengembangkan pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan																			
	Adanya peningkatan pengelolaan/ pemanfaatan sumber daya lahan dan air melalui perluasan areal budidaya yang berwawasan lingkungan																		
		3.25.03	PROGRAM PENGÉLOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	18267,81 Ton	18267,81 Ton	8,278,625,000	18541,82 Ton	9,106,487,000	18819,95 Ton	10,017,136,000	19102,25 Ton	11,018,850,000	19388,79 Ton	12,120,735,000	19388,79 Ton	0		
		3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tersedianya Dokumen Statistik, Sarana dan Prasarana Kegiatan Penangkapan dan Pendukung Penangkapan Ikan	85 %	85 %	3,572,763,500	85 %	3,930,039,850	90 %	4,323,043,835	95 %	4,755,348,219	95 %	5,230,883,040	95 %	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kelembagaan Nelayan Kecil Yang Dibina	60 %	60 %	248,861,900	80 %	273,748,090	80 %	301,122,899	85 %	3,313,235,189	95 %	364,358,708	95 %	0	DINAS PERIKANAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Dokumen Pelayanan Administrasi dan Jumlah Sarana Yang Dibangun dan Direhabilitasi	80 %	80 %	1,150,000,000	80 %	1,265,000,000	85 %	1,391,500,000	90 %	1,530,650,000	95 %	1,683,715,000	95 %	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.03.2.04	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kapal Perikanan Dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT yang terdaftar	50 Buah	50 Buah	32,000,000	55 Buah	35,200,000	60 Buah	38,720,000	65 Buah	42,592,000	70 Buah	46,851,200	70 Buah	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.03.2.05	Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Kapal Perikanan dengan Ukuran Sampai Dengan 10 GT Yang telah Terbit Izinnya	50 Buah	50 Buah	32,000,000	55 Buah	35,200,000	60 Buah	38,720,000	65 Buah	42,592,000	70 Buah	46,851,200	70 Buah	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.03.2.06	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang Beroperasi di Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kapal Yang berukuran sampai 100GT yang telah terdaftar	100 Buah	100 Buah	45,000,000	150 Buah	49,500,000	200 Buah	54,450,000	250 Buah	59,895,000	300 Buah	65,884,500	300 Buah	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya	97057,82 Ton	97057,82 Ton	8,800,000,000	99484 Ton	9,680,000,000	101971.37 Ton	10,648,000,000	104520,66 Ton	11,712,800,000	107133,67 Ton	12,884,080,000	107133,67 Ton	0		
		3.25.04.2.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Memiliki Izin	50 Buah	50 Buah	100,000,000	65 Buah	110,000,000	75 Buah	121,000,000	85 Buah	133,100,000	95 Buah	146,410,000	95 Buah	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembudidaya Yang Dibina kelebagaannya	2 Kelompok	2 Kelompok	375,000,000	4 Kelompok	412,500,000	6 Kelompok	453,750,000	8 Kelompok	499,125,000	10 Kelompok	549,037,500	10 Kelompok	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.03	Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) yang Terbit	200 Buah	200 Buah	115,000,000	250 Buah	126,500,000	300 Buah	139,150,000	350 Buah	153,065,000	400 Buah	168,371,500	400 Buah	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Persentase Tersedianya Data dan Informasi, Pengadaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen Kajian Kawasan Budidaya	80 %	80 %	7,950,000,000	80 %	8,745,000,000	85 %	9,619,500,000	90 %	10,581,450,000	95 %	11,639,595,000	95 %	0	DINAS PERIKANAN	
							0		0		0		0		0	0	DINAS PERIKANAN		
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	80 %	80 %	100,000,000	85 %	110,000,000	85 %	121,000,000	85 %	133,100,000	85 %	146,410,000	85 %	0		
		3.25.05.2.01	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Usaha Perikanan Tangkap dan Budidaya	80 %	80 %	100,000,000	85 %	110,000,000	85 %	121,000,000	85 %	133,100,000	85 %	146,410,000	85 %	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Produksi Olahan Hasil Perikanan	4368,7069 Ton	4368,7069 Ton	5,910,000,000	4477,92 Ton	6,501,000,000	4589,87 Ton	7,151,100,000	4704,62 Ton	7,866,210,000	4822,23 Ton	8,652,831,000	4822,23 Ton	0		
		3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Persentase Dokumen Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan	50 %	50 %	200,000,000	80 %	220,000,000	85 %	242,000,000	90 %	266,200,000	100 %	292,820,000	100 %	0	DINAS PERIKANAN	
		3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase Tingkat Konsumsi Ikan dan Jumlah Sarana Prasarana Pengolahan Yang Berfungsi Baik	50 %	50 %	150,000,000	65 %	165,000,000	75 %	181,500,000	85 %	199,650,000	95 %	21,961,500	95 %	0	DINAS PERIKANAN	
Terwujudnya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan Yang Bersih Efisien, Efektif, Transparan, Profesional dan Akuntabel																			
	Meningkatnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran Yang Tepat Waktu	95 %	95 %	5,376,462,400	95 %	6,374,108,640	95 %	6,956,519,504	98 %	7,652,171,454	98 %	8,467,388,600	98 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel			Persentase Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %					
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi dan Pelaporan OPD yang Akuntabel	90 %	93 %	2,959,950,000	95 %	2,321,950,000	98 %	2,378,145,000	100 %	2,915,959,500	100 %	2,957,555,450	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8 Dokumen	259,000,000	8 Dokumen	284,900,000	8 Dokumen	313,390,000	8 Dokumen	344,729,000	8 Dokumen	379,201,900	8 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan keuangan dan aset Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen	16,000,000	2 Dokumen	17,600,000	2 Dokumen	19,360,000	2 Dokumen	21,296,000	2 Dokumen	23,425,600	2 Dokumen	0	DINAS PARIWISATA	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Penyediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	160,000,000	100 %	138,500,000	100 %	152,350,000	100 %	167,585,000	100 %	184,343,500	100 %	0	DINAS PARIWISATA	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	400,000,000	100 %	440,000,000	100 %	484,000,000	100 %	532,400,000	100 %	585,640,000	100 %	0	DINAS PARIWISATA	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	888,000,000	100 %	476,800,000	100 %	348,480,000	100 %	683,328,000	100 %	501,660,800	100 %	0	DINAS PARIWISATA	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	634,500,000	100 %	697,950,000	100 %	767,745,000	100 %	844,519,500	100 %	928,971,450	100 %	0	DINAS PARIWISATA	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Unit	4 Unit	242,000,000	4 Unit	266,200,000	4 Unit	292,820,000	4 Unit	322,102,000	4 Unit	354,312,200	4 Unit	0	DINAS PARIWISATA	
Meningkatkan Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Melalui Perluasan Areal Budidaya yang berwawasan Lingkungan				Persentase Peningkatan Pengelolaan/Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air melalui perluasan Areal Budidaya	80,50 %	83 %		86 %		89 %		92 %		95 %		95 %			
	Meningkatnya Prasarana, Sarana dan Penyuluhan			Persentase Jumlah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	80,5 %	83 %		86 %		89 %		92 %		95 %		95 %			
		3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	95 %	95 %	100,000,000	95 %	110,000,000	100 %	121,000,000	100 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0		
		3.27.05.2.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	20 Ha	20 Ha	100,000,000	20 Ha	110,000,000	20 Ha	121,000,000	20 Ha	133,100,000	20 Ha	146,410,000	20 Ha	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Jumlah Peningkatan Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	80 %	80 %	300,000,000	80 %	330,000,000	85 %	363,000,000	85 %	399,300,000	90 %	439,230,000	90 %	0		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	5 Unit	5 Unit	300,000,000	5 Unit	330,000,000	5 Unit	363,000,000	5 Unit	399,300,000	5 Unit	439,230,000	5 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Unit	5 Unit	200,000,000	5 Unit	220,000,000	5 Unit	242,000,000	5 Unit	266,200,000	5 Unit	292,820,000	5 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Unit	5 Unit	200,000,000	5 Unit	220,000,000	5 Unit	242,000,000	5 Unit	266,200,000	5 Unit	292,820,000	5 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk	5 Unit	5 Unit	100,000,000	5 Unit	110,000,000	5 Unit	121,000,000	5 Unit	133,100,000	5 Unit	146,410,000	5 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	3 Unit	3 Unit	100,000,000	3 Unit	110,000,000	3 Unit	121,000,000	3 Unit	133,100,000	3 Unit	146,410,000	3 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
Adanya Peningkatan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan)				Persentase Kontribusi Sektor Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan) Terhadap Pertumbuhan PDRB dan Pendapatan Perkapita	29 %	30 %		31 %		32 %		33 %		34 %		34 %			
	Meningkatnya Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Pertanian			Persentase Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB	29 %	30 %		31 %		32 %		33 %		34 %		34 %			
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	80 %	80 %	3,646,424,300	85 %	4,011,066,730	85 %	4,412,173,403	90 %	4,853,390,743	90 %	5,338,729,818	90 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	20 Kegiatan	20 Kegiatan	3,646,424,300	30 Kegiatan	4,011,066,730	35 Kegiatan	4,412,173,403	40 Kegiatan	4,853,390,743	40 Kegiatan	5,338,729,818	40 Kegiatan	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	20 Kegiatan	20 Kegiatan	3,646,424,300	30 Kegiatan	4,011,066,730	40 Kegiatan	4,412,173,403	50 Kegiatan	4,853,390,743	60 Kegiatan	5,338,729,818	60 Kegiatan	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	80 %	80 %	19,066,499,000	80 %	20,973,148,900	85 %	23,070,463,790	85 %	25,377,510,169	90 %	27,915,261,186	90 %	0		
		3.27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	10 Kegiatan	10 Kegiatan	300,000,000	15 Kegiatan	330,000,000	20 Kegiatan	363,000,000	25 Kegiatan	399,300,000	30 Kegiatan	439,230,000	30 Kegiatan	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit	4,800,000,000	20 Unit	5,280,000,000	25 Unit	5,808,000,000	30 Unit	6,388,800,000	30 Unit	7,027,680,000	30 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	10 Unit	10 Unit	4,860,000,000	20 Unit	5,346,000,000	25 Unit	5,880,600,000	30 Unit	6,468,660,000	30 Unit	7,115,526,000	35 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	4 Unit	4 Unit	4,576,475,200	6 Unit	5,034,122,720	7 Unit	5,537,534,992	8 Unit	6,091,288,491	10 Unit	6,700,417,340	10 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	20 Unit	20 Unit	4,830,023,800	30 Unit	5,313,026,180	35 Unit	5,844,328,798	35 Unit	6,428,761,678	40 Unit	7,071,637,846	40 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel				Persentase pengelolaan Penunjang urusan pemerintahan daerah Kab. Muna	85 %	85 %		85 %		90 %		90 %		95 %		95 %			
	Meningkatnya pengelolaan kegiatan penunjang urusan pemerintahan			Presentase Pengelolaan Penunjang urusan pemerintahan daerah	85 %	85 %		85 %		90 %		90 %		95 %		95 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pengelolaan Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85 %	85 %	15,764,500,500	85 %	17,941,950,550	90 %	19,560,145,605	90 %	21,816,168,166	95 %	23,787,776,182	95 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	1 Dok	1 Dok	85,400,000	1 Dok	93,940,000	1 Dok	103,334,000	1 Dok	113,667,400	1 Dok	125,034,140	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA	1 Dok	1 Dok	5,800,000	1 Dok	6,380,000	1 Dok	7,018,000	1 Dok	7,719,800	1 Dok	8,491,780	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	1 Dok	7,500,000	1 Dok	8,250,000	1 Dok	9,075,000	1 Dok	9,982,500	1 Dok	10,980,750	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dok	1 Dok	5,500,000	1 Dok	6,050,000	1 Dok	6,655,000	1 Dok	7,320,500	1 Dok	8,052,550	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Lakip SKPD	1 Dok	1 Dok	55,000,000	1 Dok	60,500,000	1 Dok	66,550,000	1 Dok	73,205,000	1 Dok	80,525,500	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPD dan LKpj SKPD	1 Dok	1 Dok	35,000,000	1 Dok	38,500,000	1 Dok	42,350,000	1 Dok	46,585,000	1 Dok	51,243,500	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang / Bulan	195 Orang / Bulan	17,046,691,600	214 Orang / Bulan	18,751,360,760	220 Orang / Bulan	20,626,496,836	225 Orang / Bulan	22,689,146,520	230 Orang / Bulan	24,958,061,172	230 Orang / Bulan	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	1 Dok	85,000,000	1 Dok	93,500,000	1 Dok	102,850,000	1 Dok	113,135,000	1 Dok	124,448,500	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Lap	1 Lap	6,200,000	1 Lap	6,820,000	1 Lap	7,502,000	1 Lap	8,252,200	1 Lap	9,077,420	1 Lap	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Lap	1 Lap	3,100,000	1 Lap	3,410,000	1 Lap	3,751,000	1 Lap	4,126,100	1 Lap	4,538,710	1 Lap	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dok	1 Dok	55,000,000	1 Dok	60,500,000	1 Dok	66,550,000	1 Dok	73,205,000	1 Dok	80,525,500	1 Dok	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan pakaian Dinas ASN	1 Paket	1 Paket	30,000,000	1 Paket	96,000,000	1 Paket	105,600,000	1 Paket	116,160,000	1 Paket	127,726,000	1 Paket	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	14,364,500	1 Dokumen	14,500,000	1 Dokumen	15,950,000	1 Dokumen	17,545,000	1 Dokumen	19,299,500	1 Dokumen	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	949,375	1 Paket	1,044,313	1 Paket	1,148,744	1 Paket	1,263,618	1 Paket	1,389,980	1 Paket	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	24,298,205	1 Paket	27,000,000	1 Paket	29,700,000	1 Paket	32,670,000	1 Paket	35,937,000	1 Paket	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	8,920,000	1 Paket	9,800,000	1 Paket	10,780,000	1 Paket	11,858,000	1 Paket	13,043,800	1 Paket	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	45,000,000	1 Paket	49,500,000	1 Paket	54,450,000	1 Paket	59,895,000	1 Paket	65,884,500	1 Paket	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	5,400,000	1 Paket	5,940,000	1 Paket	6,534,000	1 Paket	7,187,400	1 Paket	7,906,140	1 Paket	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Lap	1 Lap	350,000,000	1 Lap	385,000,000	1 Lap	423,500,000	1 Lap	465,850,000	1 Lap	512,435,000	1 Lap	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	0 Unit	0	4 Unit	160,000,000	0 Unit	0	1 Unit	300,000,000	2 Unit	80,000,000	2 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Mebel yang Disediakan	3 Unit	0 Unit	0	3 Unit	30,800,000	3 Unit	33,880,000	3 Unit	37,268,000	3 Unit	40,994,800	3 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	85,000,000	3 Unit	85,000,000	3 Unit	93,500,000	3 Unit	102,850,000	3 Unit	113,135,000	3 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	140,000,000	1 Unit	154,000,000	1 Unit	169,400,000	1 Unit	186,340,000	1 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	5,600,000,000	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	3 Unit	5,600,000,000	3 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	140,000,000	1 Unit	154,000,000	1 Unit	169,400,000	1 Unit	186,340,000	1 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	18,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	60,500,000	1 Laporan	66,550,000	1 Laporan	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	162,960,000	1 Laporan	180,000,000	1 Laporan	198,000,000	1 Laporan	217,800,000	1 Laporan	239,580,000	1 Laporan	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit	3,140,000	1 Unit	30,000,000	1 Unit	33,000,000	1 Unit	36,300,000	1 Unit	39,930,000	1 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	0 Unit	0	1 Unit	24,200,000	1 Unit	26,620,000	1 Unit	29,282,000	1 Unit	32,210,200	1 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	5 Unit	5 Unit	1,500,000,000	5 Unit	1,650,000,000	5 Unit	1,815,000,000	5 Unit	1,996,500,000	5 Unit	2,196,150,000	5 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	25,000,000	2 Unit	27,500,000	2 Unit	30,250,000	2 Unit	33,275,000	2 Unit	40,000,000	2 Unit	0	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp										
Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang berkelanjutan dan keadilan serta berwawasan lingkungan seiring dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat lokal	meningkatkan status kesehatan hewan dan daya saing peternakan																		
		3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Penanggulangan Penyakit Hewan	70 %	75 %	2,250,000,000	80 %	2,475,000,000	85 %	2,722,500,000	90 %	2,994,750,000	95 %	3,294,225,000	100 %	0		
		3.27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terkendalinya dan Tertanggulangnya Penyakit Hewan dan Zoonosis	1 Set Obat dan 1 Set Peralatan set	1 Set Obat dan 1 Set Peralatan set	700,000,000	1 Set Obat dan 1 Set Peralatan set	770,000,000	1 Set Obat dan 1 Set Peralatan set	847,000,000	1 Set Obat dan 1 Set Peralatan set	931,700,000	1 Set Obat dan 1 Set Peralatan set	1,024,870,000	1 Set Obat dan 1 Set Peralatan set	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.2.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan Rumah Potong hewan dan Rumah potong unggas	78 frekuensi	78 frekuensi	200,000,000	78 frekuensi	220,000,000	78 frekuensi	242,000,000	78 frekuensi	266,200,000	78 frekuensi	292,820,000	78 frekuensi	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pemeriksaan sampel/Spesimen ternak dan Produk Asal Hewan	800 Sampel Hewan dan 100 Sampel Produk Hewan sampel	800 Sampel Hewan dan 100 Sampel Produk Hewan sampel	100,000,000	800 Sampel Hewan dan 100 Sampel Produk Hewan sampel	110,000,000	800 Sampel Hewan dan 100 Sampel Produk Hewan sampel	121,000,000	800 Sampel Hewan dan 100 Sampel Produk Hewan sampel	133,100,000	800 Sampel Hewan dan 100 Sampel Produk Hewan sampel	146,410,000	800 Sampel Hewan dan 100 Sampel Produk Hewan sampel	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.2.03	Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya pelayanan jasa medik veteriner dilapangan an UPTD Puskeswan	22 kecamatan	22 kecamatan	200,000,000	22 kecamatan	220,000,000	22 kecamatan	242,000,000	22 kecamatan	266,200,000	22 kecamatan	292,820,000	22 kecamatan	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya Pembinaan, Pengolahan Serta Promosi usaha Hewan dan Produk Pangan Asal Hewan	5 Kelompok	5 Kelompok	200,000,000	5 Kelompok	220,000,000	5 Kelompok	242,000,000	5 Kelompok	266,200,000	5 Kelompok	292,820,000	5 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.04.2.05	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Terlaksananya pemeriksaan Hewan Kurban Hewan	6 Kecamatan	6 Kecamatan	50,000,000	6 Kecamatan	55,000,000	7 Kecamatan	60,500,000	7 Kecamatan	66,550,000	8 Kecamatan	73,205,000	8 Kecamatan	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
meningkatkan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari sektor pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura dan perkebunan) dan Peternakan	Meningkatnya Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita Sektor Peternakan																		
		3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	29 %	30 %	5,300,000,000	31 %	7,150,000,000	32 %	7,865,000,000	33 %	8,651,500,000	34 %	9,516,650,000	100 %	0		
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya prasarana Budaya peternakan	1 Perbibitan dan HPT Ruminansia dan Unggas Set	1 Perbibitan dan HPT Ruminansia dan Unggas Set	2,550,000,000	1 Perbibitan dan HPT Ruminansia dan Unggas Set	2,805,000,000	1 Perbibitan dan HPT Ruminansia dan Unggas Set	3,085,500,000	1 Perbibitan dan HPT Ruminansia dan Unggas Set	3,394,050,000	1 Perbibitan dan HPT Ruminansia dan Unggas Set	3,733,455,000	1 Perbibitan dan HPT Ruminansia dan Unggas Set	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya Irigasi Air Tanah Peternakan	4 Sumur Bor 1 sumur Gali 1 Embung Unit	4 Sumur Bor 2 sumur Gali 1 Embung Unit	400,000,000	4 Sumur Bor 3 sumur Gali 1 Embung Unit	440,000,000	5 Sumur Bor 2 sumur Gali 1 Embung Unit	484,000,000	4 Sumur Bor 3 sumur Gali 2 Embung Unit	532,400,000	5 Sumur Bor 3 sumur Gali 2 Embung Unit	585,640,000	5 Sumur Bor 3 sumur Gali 2 Embung Unit	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	Terbangunnya jalan Produksi Peternakan UPT Perbibitan dan HPT, Padang Penggembalaan dan kelompok Ternak	5000 meter	5000 meter	1,000,000,000	5500 meter	1,100,000,000	6000 meter	1,210,000,000	6500 meter	1,331,000,000	7000 meter	1,464,100,000	7000 meter	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.03.2.02	Pembangunan Prasarana Pertanian	terlaksananya pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan RPH	1 RPH dan 1 RPU unit	1 RPH dan 1 RPU unit	750,000,000	1 RPH dan 1 RPU unit	825,000,000	1 RPH dan 1 RPU unit	907,500,000	1 RPH dan 1 RPU unit	998,250,000	1 RPH dan 1 RPU unit	1,098,075,000	1 RPH dan 1 RPU unit	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Terlaksananya pengelolaan Padang Penggembalaan Umum Peternakan UPT Perbibitan dan HPT dan Kelompok Ternak	50 Ha Milik Pemda dan 20 Ha Milik Peternak Ha	50 Ha Milik Pemda dan 20 Ha Milik Peternak Ha	400,000,000	55 Ha Milik Pemda dan 25 Ha Milik Peternak Ha	440,000,000	55 Ha Milik Pemda dan 25 Ha Milik Peternak Ha	484,000,000	60 Ha Milik Pemda dan 30 Ha Milik Peternak Ha	532,400,000	60 Ha Milik Pemda dan 30 Ha Milik Peternak Ha	585,640,000	60 Ha Milik Pemda dan 30 Ha Milik Peternak Ha	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.03.2.04	Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum	Terlaksananya Identifikasi dan Penetapan Lahan Penggembalaan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	242,000,000	1 Dokumen	266,200,000	1 Dokumen	292,820,000	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Kontribusi sektor Peternakan terhadap PDRB	85.6 %	88 %	500,000,000	91 %	550,000,000	94 %	605,000,000	97 %	665,000,000	100 %	732,050,000	100 %	0		
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	2 Kegiatan	2 Kegiatan	200,000,000	2 Kegiatan	220,000,000	2 Kegiatan	242,000,000	2 Kegiatan	266,200,000	2 Kegiatan	292,820,000	2 Kegiatan	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Berkembangnya Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000	1 Kegiatan	165,000,000	1 Kegiatan	181,500,000	1 Kegiatan	199,650,000	1 Kegiatan	219,615,000	1 Kegiatan	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				Target
		3.27.07.2.01	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Tersedianya serta termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	5 Saprasi Unit	5 Saprasi Unit	150,000,000	5 Saprasi Unit	165,000,000	5 Saprasi Unit	181,500,000	5 Saprasi Unit	199,650,000	5 Saprasi Unit	219,615,000	5 Saprasi Unit	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN																
		3.27.02.2.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya inseminasi Buatan dan Peningkatan Produktivitas Ternak Sapi	2000 ekor	2000 ekor	750,000,000	2000 ekor	825,000,000	2000 ekor	907,500,000	2000 ekor	998,250,000	2000 ekor	1,098,075,000	2000 ekor	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Terlaksananya Pengadaan Bibit Ternak (ayam buras, itik, ayam petelur, kambing dan sapi)	8500 ekor	8500 ekor	6,550,000,000	8500 ekor	7,205,000,000	8500 ekor	7,925,500,000	8500 ekor	8,718,050,000	8500 ekor	9,589,855,000	8500 ekor	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		3.27.02.2.06	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	Tersedianya Pengolahan Lahan Hijauan Pakan Ternak dan Bibit Hijauan Pakan Ternak	10 Kelompok	10 Kelompok	450,000,000	10 Kelompok	495,000,000	10 Kelompok	544,500,000	10 Kelompok	598,950,000	10 Kelompok	658,845,000	10 Kelompok	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
Mewujudkan Tata kelola pemerintahan dan Penegakan Supremasi Hukum																			
	Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintahan yang bersih, efisien, transparan, profesional dan akuntabel																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	presentase Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	90 %	90 %	2,682,000,000	95 %	2,450,200,000	95 %	2,277,220,000	95 %	2,804,942,000	100 %	2,835,436,200	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Renja	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	1 Dokumen	73,205,000	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Dana Transfer Daerah (Tugas Pembantuan/Dana Alokasi Khusus)	1 Dokumen	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	33,000,000	1 Dokumen	36,300,000	1 Dokumen	39,930,000	1 Dokumen	43,923,000	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,100,000	1 Dokumen	13,310,000	1 Dokumen	14,641,000	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	11,000,000	1 Dokumen	12,100,000	1 Dokumen	13,310,000	1 Dokumen	14,641,000	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,050,000	1 Dokumen	6,655,000	1 Dokumen	7,320,500	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD.	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,050,000	1 Dokumen	6,655,000	1 Dokumen	7,320,500	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LAKIP SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	27,500,000	1 Dokumen	30,250,000	1 Dokumen	33,275,000	1 Dokumen	36,602,500	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LPPD SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	6,000,000	1 Dokumen	6,050,000	1 Dokumen	6,655,000	1 Dokumen	7,320,500	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen LKPJ SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,050,000	1 Dokumen	6,655,000	1 Dokumen	7,320,500	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun.	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,050,000	1 Dokumen	6,655,000	1 Dokumen	7,320,500	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen laporan keuangan semesteran	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	5,500,000	1 Dokumen	6,050,000	1 Dokumen	6,655,000	1 Dokumen	7,320,500	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	12,000,000	1 Dokumen	13,200,000	1 Dokumen	14,520,000	1 Dokumen	15,972,000	1 Dokumen	17,569,200	1 Dokumen	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya gaji dan Tunjangan ASN	100 %	100 %	3,939,526,400	100 %	4,333,479,040	100 %	4,766,826,944	100 %	5,243,509,638	100 %	5,767,860,602	100 %	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengolahan Data Retribusi Daerah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	50,000,000	1 Kegiatan	55,000,000	1 Kegiatan	60,500,000	1 Kegiatan	66,550,000	1 Kegiatan	73,205,000	1 Kegiatan	0	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya investasi untuk menghidupkan kawasan pengembangan dan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi/unggulan			Capaian Sasaran Pembangunan Industri Persentase Pertumbuhan Industri secara Keseluruhan	80 % 80 %	85 % 80 %	85 % 82 %	87 % 83 %	87 % 83 %	88 % 85 %	88 % 85 %							
		3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIIM yang ditetapkan dalam RPIP	85 %	85 %	350,000,000	85 %	1,802,500,000	85 %	2,072,875,000	85 %	2,383,806,000	85 %	2,741,377,000	85 %	0	
		3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	85 %	85 %	350,000,000	85 %	1,802,500,000	85 %	2,072,875,000	85 %	2,382,806,000	85 %	2,741,377,000	85 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah IUP Kecil dan Menengah	0 %	0 %	0	85 %	170,000,000	85 %	195,500,000	88 %	224,825,000	90 %	258,549,000	90 %	0	
		3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI)	65 %	70 %	85,000,000	75 %	94,500,000	75 %	102,850,000	80 %	113,135,000	85 %	124,449,000	85 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Pengelolaan Sistem Inforamsin Industri Nasional	80 %	80 %	75,250,000	85 %	75,250,000	85 %	86,538,000	85 %	99,518,000	85 %	114,446,000	85 %	0	
		3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	80 %	80 %	75,250,000	85 %	75,250,000	85 %	86,538,000	85 %	99,518,000	85 %	114,446,000	1 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
	Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparana, profesional dan akuntabel			Persentase peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparana, profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
	Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparana, profesional dan akuntabel			Persentase peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparana, profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Pelayanan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	5,879,621,000	100 %	6,744,314,000	100 %	7,755,961,000	100 %	8,919,355,000	100 %	10,257,259,000	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen	232,250,000	9 Dokumen	267,088,000	9 Dokumen	307,151,000	9 Dokumen	353,223,000	9 Dokumen	406,207,000	9 Dokumen	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan Daerah	100 %	100 %	2,971,771,000	100 %	3,417,537,000	100 %	3,930,167,000	100 %	4,519,692,000	100 %	5,197,646,000	100 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	6,500,000	1 Dokumen	7,475,000	1 Dokumen	8,596,000	1 Dokumen	9,886,000	1 Dokumen	11,369,000	1 Dokumen	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	30,000,000	100 %	34,500,000	100 %	39,675,000	100 %	45,626,000	100 %	52,470,000	100 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Daerah	100 %	100 %	195,000,000	100 %	207,000,000	100 %	238,050,000	100 %	273,758,000	100 %	314,821,000	100 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pemenuhan Adminitrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	526,000,000	100 %	604,900,000	100 %	695,635,000	100 %	799,980,000	100 %	919,977,000	100 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pemenuhan Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12 Unit/Jenis	12 Unit/Jenis	725,000,000	12 Unit/Jenis	833,750,000	14 Unit/Jenis	958,813,000	14 Unit/Jenis	1,102,634,000	15 Unit/Jenis	1,268,030,000	15 Unit/Jenis	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	827,500,000	100 %	951,625,000	100 %	1,094,369,000	100 %	1,258,524,000	100 %	1,477,303,000	100 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	365,600,000	100 %	420,440,000	100 %	483,806,000	100 %	556,032,000	100 %	639,437,000	100 %	0	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran				Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,80 %	5,32 %		4,75 %		4,19 %		3,67 %		3,06 %		3,06 %			
	Meningkatkan Keterampilan Tenaga Kerja dan Menurunkan Tingkat Pengangguran			Angkatan Kerja Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Bekerja %	94.674 orang 63,21 % 93,55 %	97.277 orang 63,71 % 93,60 %		99.790 orang 64,23 % 94,00 %		102.303 orang 64,77 % 94,45 %		104.816 orang 65,32 % 95,00 %		107.329 orang 66,45 % 96,65 %		107.329 orang 66,45 % 96,65 %			
		2.07.02	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Jumlah Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	0 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	1 Dokumen	0		
		2.07.02.2.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tenaga Kerja	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	165,000,000	1 Dokumen	181,500,000	1 Dokumen	199,650,000	1 Dokumen	219,615,000	1 Dokumen	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Jumlah Pencari Kerja yang mendapat pelatihan keterampilan	380 Orang	580 Orang	1,275,000,000	780 Orang	1,582,500,000	980 Orang	2,100,750,000	1180 Orang	2,430,825,000	1380 Orang	2,673,907,000	1380 Orang	0		
		2.07.03.2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Terlatihnya Para Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	200 orang	200 orang	1,200,000,000	200 orang	1,500,000,000	200 orang	2,010,000,000	200 orang	2,331,000,000	200 orang	2,564,100,000	1000 orang	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terbinanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	4 Lembaga	4 Lembaga	50,000,000	6 Lembaga	55,000,000	6 Lembaga	60,500,000	6 Lembaga	66,550,000	6 Lembaga	73,205,000	6 Lembaga	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.03	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	0 Perusahaan	6 Perusahaan	50,000,000	6 Perusahaan	55,000,000	6 Perusahaan	60,550,000	6 Perusahaan	66,550,000	6 Perusahaan	73,205,000	6 Perusahaan	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	1 Kegiatan	1 Kegiatan	25,000,000	1 Kegiatan	27,500,000	1 Kegiatan	30,250,000	1 Kegiatan	33,275,000	1 Kegiatan	36,602,000	1 Kegiatan	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	27,500,000	1 Dokumen	30,250,000	1 Dokumen	33,275,000	1 Dokumen	36,602,000	1 Dokumen	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	66.28 %	66.28 %	1,425,000,000	66.35 %	1,562,500,000	66.50 %	1,718,750,000	66.75 %	1,890,625,000	67.00 %	2,079,687,500	67.00 %	0		
		2.07.04.2.01	Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/ Kota	1 Kegiatan	1 Kegiatan	700,000,000	1 Kegiatan	770,000,000	1 Kegiatan	847,000,000	1 Kegiatan	931,700,000	1 Kegiatan	1,024,870,000	1 Kegiatan	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Izin Pemanjangan IMTA	0 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,550,000	5 Dokumen	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Tersedianya Informasi Pasar Kerja	1 Kegiatan	1 Kegiatan	125,000,000	1 Kegiatan	137,500,000	1 Kegiatan	151,250,000	1 Kegiatan	166,375,000	1 Kegiatan	183,012,500	1 Kegiatan	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0 orang	50 orang	525,000,000	100 orang	577,500,000	120 orang	635,250,000	120 orang	698,775,000	140 orang	768,652,500	530 orang	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.04.2.05	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA	0 Dokumen	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	27,500,000	1 Dokumen	30,250,000	1 Dokumen	33,275,000	1 Dokumen	36,602,500	5 Dokumen	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	100 %	100 %	275,000,000	100 %	297,500,000	100 %	327,250,000	100 %	359,475,000	100 %	394,422,500	100 %	0		
		2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama	50 Dokumen	50 Dokumen	100,000,000	70 Dokumen	105,000,000	140 Dokumen	115,500,000	160 Dokumen	126,550,000	180 Dokumen	138,205,000	180 Dokumen	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
		2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Kasus Peselisihan Hubungan Industrial	2 Kasus	4 Kasus	175,000,000	3 Kasus	192,500,000	2 Kasus	211,750,000	2 Kasus	232,925,000	2 Kasus	256,217,500	2 Kasus	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	
Meningkatkan kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan mewujudkan integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan				Terwujudnya Percepatan Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kawasan Transmigrasi	2 SP	3 SP		4 SP		5 SP		6 SP		7 SP		7 SP			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
	Meningkatnya kemampuan dan produktivitas masyarakat transmigrasi, membangun kemandirian dan terwujudnya integrasi di permukiman transmigrasi sehingga ekonomi dan sosial budaya mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan			Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatnya Kesejahteraan Jumlah Satuan Permukiman yang difasilitasi Penempatan dan pembangunannya	360 KK 2 SP	460 KK 3 SP	560 KK 4 SP	660 KK 5 SP	760 KK 6 SP	860 KK 7 SP	860 KK 7 SP							
		3.32.02	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Transmigrasi	3 Dokumen	3 Dokumen	1,370,000,000	3 Dokumen	1,507,000,000	3 Dokumen	1,657,700,000	3 Dokumen	1,823,470,000	3 Dokumen	2,005,817,000	3 Dokumen	0	
		3.32.02.2.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas Areal Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	0 Ha	1200 Ha	1,370,000,000	1200 Ha	1,507,000,000	1200 Ha	1,657,000,000	1200 Ha	1,823,470,000	1200 Ha	2,005,817,000	6000 Ha	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		3.32.03	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang difasilitasi Penempatan dan Pembangunannya	2 SP	3 SP	6,412,000,000	4 SP	7,059,200,000	5 SP	7,765,120,000	6 SP	8,541,632,000	7 SP	9,395,795,200	7 SP	0	
		3.32.03.2.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Persebaran penduduk di Kawasan Transmigrasi	100 KK	100 KK	6,412,000,000	100 KK	7,059,200,000	100 KK	7,765,120,000	100 KK	8,541,632,000	100 KK	9,395,795,200	500 KK	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		3.32.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang dibina	2 SP	3 SP	15,750,000,000	4 SP	17,325,000,000	5 SP	19,057,500,000	6 SP	20,963,250,000	7 SP	23,059,575,000	7 SP	0	
		3.32.04.2.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	Jumlah Satuan Permukiman Transmigrasi yang berkembang	2 SP	3 SP	15,750,000,000	4 SP	17,325,000,000	5 SP	19,057,500,000	6 SP	20,963,250,000	7 SP	23,059,575,000	7 SP	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan Akuntabel				Persentase Peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel				Persentase Peningkatan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketersediaan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	4,368,728,600	100 %	4,949,881,460	100 %	5,085,719,606	100 %	5,517,491,567	100 %	6,034,290,723	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	160,000,000	9 Dok	175,000,000	9 Dok	191,500,000	9 Dok	209,650,000	9 Dok	229,615,000	9 Dok	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 Dokumen	2,583,548,600	6 Dokumen	2,841,903,460	6 Dokumen	3,126,093,806	6 Dokumen	3,438,703,187	6 Dokumen	3,782,573,505	6 Dokumen	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Barang Milik Daerah (BMD) SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	5,500,000	1 Laporan	6,050,000	1 Laporan	6,655,000	Laporan	7,320,500	1 Laporan	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	155,000,000	3 Dokumen	170,500,000	3 Dokumen	187,550,000	3 Dokumen	206,305,000	3 Dokumen	226,935,500	3 Dokumen	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Tahun	1 Tahun	475,980,000	1 Tahun	483,978,000	1 Tahun	532,375,800	1 Tahun	585,613,380	1 Tahun	644,174,718	1 Tahun	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5 Unit/Paket	22 Unit/Paket	338,000,000	13 Unit/Paket	605,300,000	15 Unit/Paket	323,330,000	9 Unit/Paket	302,163,000	9 Unit/Paket	321,879,300	67 Unit/Paket	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 Laporan	1 Laporan	346,200,000	1 Laporan	347,200,000	1 Laporan	382,320,000	1 Laporan	415,352,000	1 Laporan	451,587,200	1 Laporan	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kondisi Barang Milik Daerah	1 Tahun	1 Tahun	305,000,000	1 Tahun	320,500,000	1 Tahun	336,500,000	1 Tahun	353,050,000	1 Tahun	370,205,000	1 Tahun	0	DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																		
	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Hukum																	
		4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Rumusan Kebijakan Pemerintahan Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Yang Selaras Dengan Tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	18,589,200,000	100 %	19,518,660,000	100 %	20,494,593,000	100 %	21,519,322,650	100 %	22,595,288,783	100 %	0	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase Cakupan Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik	100 %	100 %	1,310,700,000	100 %	1,376,235,000	100 %	1,445,046,750	100 %	1,517,299,088	100 %	1,593,164,042	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Cakupan ketersediaan Arah Kebijakan Bidang Kesra Terhadap Tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	15,151,800,000	100 %	15,909,390,000	100 %	16,704,859,500	100 %	17,540,102,475	100 %	18,417,107,599	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Cakupan Fasilitasi Kualitas Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah Terhadap Tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,388,500,000	100 %	1,457,925,000	100 %	1,530,821,250	100 %	1,607,362,313	100 %	1,687,730,428	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Cakupan Fasilitasi MoU/PKS Perangkat Daerah Yang Dilaksanakan	100 %	100 %	738,200,000	100 %	775,110,000	100 %	813,865,500	100 %	854,558,775	100 %	897,286,714	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pembangunan dan tanggap bencana																			
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas pembangunan																		
		4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Rumusan Kebijakan Perekonomian dan Pembangunan Daerah Yang Selaras Dengan Tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	5,071,090,000	100 %	5,438,844,500	100 %	5,710,786,725	100 %	5,996,326,061	100 %	6,296,142,364	100 %	0		
		4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase Cakupan Terlaksananya Arah Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Daerah	100 %	100 %	1,455,300,000	100 %	1,642,265,000	100 %	1,724,378,250	100 %	1,810,597,163	100 %	1,901,127,021	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase Cakupan Terlaksananya administrasi Pembangunan Daerah Terhadap Tugas Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,374,000,000	100 %	1,442,700,000	100 %	1,514,835,000	100 %	1,590,576,750	100 %	1,670,105,588	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Sesuai Regulasi	60 %	85 %	1,615,620,000	85 %	1,696,401,000	85 %	1,781,221,050	85 %	1,870,282,103	100 %	1,963,796,208	85 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase Terlaksananya Rumusan Arah Kebijakan Pemerintah	100 %	100 %	626,170,000	100 %	657,478,500	100 %	690,352,425	100 %	724,870,046	100 %	761,113,549	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompetitif																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan Program Dukungan Sasaran Perangkat Daerah	100 %	100 %	54,784,298,775	100 %	57,523,513,714	100 %	60,399,689,399	100 %	63,419,673,869	100 %	66,590,657,563	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perbandingan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan & penyalaiannya tepat waktu	100 %	100 %	430,050,000	100 %	451,552,500	100 %	474,130,125	100 %	497,836,631	100 %	522,728,463	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perbandingan Jumlah Laporan Keuangan yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan & penyalaiannya tepat waktu	100 %	100 %	10,739,831,500	100 %	11,276,823,075	100 %	11,840,664,229	100 %	12,432,697,440	100 %	13,054,332,312	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perbandingan Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang telah sesuai dengan pedoman penyusunan & penyalaiannya tepat waktu	100 %	100 %	265,900,000	100 %	279,195,000	100 %	293,154,750	100 %	307,812,488	100 %	323,203,112	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Peningkatan Fasilitas Kapasitas Sumber Daya Aparatur Setda	100 %	100 %	366,000,000	100 %	384,300,000	100 %	403,515,000	100 %	423,690,750	100 %	444,875,288	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Cakupan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	9,002,600,000	100 %	9,414,480,000	100 %	9,885,204,000	100 %	10,379,464,200	100 %	10,898,437,410	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah Setda Yang Tepat Waktu	100 %	100 %	9,970,000,000	100 %	10,468,500,000	100 %	10,991,925,000	100 %	11,541,521,250	100 %	12,118,597,313	100 %	0	SEKRETARIAT DAERAH	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				0		0		0		0		0		0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen RKA perubahan, dokumen DPA, dokumen LKIP, dokumen RKA, Dokumen Renja, Dokumen Renstra	9 dokumen	9 dokumen	159,000,000	9 dokumen	201,000,000	9 dokumen	241,200,000	9 dokumen	289,440,000	9 dokumen	347,328,000	9 dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	2,750,000,000	100 %	3,000,000,000	100 %	3,250,000,000	100 %	3,500,000,000	100 %	3,750,000,000	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 %	100 %	300,000,000	100 %	400,000,000	100 %	500,000,000	100 %	600,000,000	100 %	700,000,000	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,750,000,000	100 %	2,000,000,000	100 %	2,250,000,000	100 %	2,500,000,000	100 %	2,750,000,000	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	3,700,000,000	100 %	3,900,000,000	100 %	4,200,000,000	100 %	4,500,000,000	100 %	4,700,000,000	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terwujudnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 tahun	1 tahun	710,000,000	1 tahun	1,750,000,000	1 tahun	2,148,000,000	1 tahun	2,546,000,000	1 tahun	2,900,000,000	1 tahun	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhiya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 tahun	1 tahun	5,000,000,000	1 tahun	7,000,000,000	1 tahun	8,400,000,000	1 tahun	10,080,000,000	1 tahun	12,096,000,000	1 tahun	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terwujudnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	1,970,000,000	100 %	2,000,000,000	100 %	2,500,000,000	100 %	3,000,000,000	100 %	4,000,000,000	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Adanya Laporan Anjab dan SOP	2 dokumen	2 dokumen	30,000,000	2 dokumen	40,000,000	2 dokumen	45,000,000	2 dokumen	50,000,000	2 dokumen	60,000,000	2 dokumen	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terwujudnya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	100 %	15,500,000,000	100 %	17,000,000,000	100 %	19,000,000,000	100 %	21,000,000,000	100 %	24,000,000,000	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD	
		X.XX.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Terpenuhiya Layanan Administrasi DPRD	100 %	100 %	12,000,000,000	100 %	14,000,000,000	100 %	16,000,000,000	100 %	18,000,000,000	100 %	20,000,000,000	100 %	0	SEKRETARIAT DPRD	
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel				Persentase Musrenbang yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	91 %	100 %	91,40 %	100 %	91,60 %	100 %	91,80 %	100 %	92 %	100 %	92 %		
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH																
		5.01.02.2.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Nilai evaluasi LAKIP Bappeda	B Skala	B Skala	550,000,000	B Skala	550,000,000	B Skala	560,000,000	B Skala	570,000,000	BB Skala	580,000,000	BB Skala	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.2.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan dan dokumen analisisnya	1 Dokumen	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	200,000,000	1 Dokumen	210,000,000	1 Dokumen	215,000,000	1 Dokumen	220,000,000	1 Dokumen	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan dokumen Renstra/Renja OPD yang selaras dengan RPJMD	97 %	98 %	410,000,000	99 %	410,000,000	100 %	415,000,000	100 %	420,000,000	100 %	425,000,000	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya Kualitas Kinerja Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah			Persentase Musrenbang yang Melibatkan Partisipasi Masyarakat Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perkantoran, Penyusunan Dokumen Perencanaan OPD dan Pelaporan Sistem Keuangan OPD	100 %	100 %	5,020,000,000	100 %	5,020,000,000	100 %	5,112,000,000	100 %	5,199,000,000	100 %	5,335,000,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan LKIP, Renja, RKA, DPA Laporan Keuangan, dan laporan Aset OPD tepat waktu	100 %	100 %	85,000,000	100 %	85,000,000	100 %	90,000,000	100 %	95,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pembayaran gaji dan pelaporan keuangan yang tepat waktu	100 %	100 %	3,700,000,000	100 %	3,700,000,000	100 %	3,750,000,000	100 %	3,800,000,000	100 %	3,900,000,000	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	78 %	78 %	45,000,000	79 %	45,000,000	80 %	47,000,000	81 %	49,000,000	82 %	50,000,000	82 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rata-rata pelayanan kebutuhan pegawai yang efektif dan efisien	75 %	76 %	30,000,000	77 %	30,000,000	78 %	35,000,000	79 %	40,000,000	80 %	45,000,000	81 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rata-rata Pelaksanaan Administrasi Perkantoran yang efektif dan efisien	100 %	100 %	450,000,000	100 %	450,000,000	100 %	460,000,000	100 %	470,000,000	100 %	480,000,000	100 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur	78 %	80 %	45,000,000	81 %	45,000,000	82 %	50,000,000	83 %	55,000,000	84 %	60,000,000	85 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rata-rata pelayanan jasa penunjang perkantoran yang efektif dan efisien	78 %	79 %	500,000,000	80 %	500,000,000	82 %	510,000,000	84 %	515,000,000	86 %	520,000,000	88 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	75 %	77 %	165,000,000	80 %	165,000,000	81 %	170,000,000	82 %	175,000,000	83 %	180,000,000	84 %	0	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas																			
	Kinerja keuangan dan aset daerah meningkat			Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	ersentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	92 %	93 %	7,382,130,000	94 %	8,120,343,000	95 %	8,932,377,000	96 %	9,825,615,000	97 %	10,808,176,000	100 %	0		
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Secara Efisien, Transparan dan Akuntabel	90 %	95 %	1,336,498,570	96 %	1,470,148,427	97 %	1,617,163,269	98 %	1,778,879,595	99 %	1,956,767,554	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Secara Efisien, Transparan dan Akuntabel	90 %	95 %	3,532,387,763	96 %	3,885,626,539	97 %	4,274,189,192	98 %	4,701,608,111	99 %	5,171,768,922	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terlaksananya Akuntansi Dan Pelaporan keuangan Daerah Secara Efisien, Transparan dan Akuntabel	85 %	90 %	1,223,199,670	92 %	1,345,519,637	94 %	1,480,071,600	96 %	1,628,078,760	98 %	1,790,886,636	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan penyaluran/penyerapan Dana Pinjaman Keuangan Daerah Secara Efisien, efektif, Transparan dan Akuntabel	90 %	95 %	17,898,050,191	96 %	17,898,050,191	97 %	17,898,050,191	98 %	17,898,050,191	99 %	17,898,050,191	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terlaksananya Pengelolaan DATA dan sistem informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Secara Efisien, Transparan dan Akuntabel	90 %	95 %	329,681,000	96 %	362,649,100	97 %	3,989,141,010	98 %	438,805,411	99 %	482,685,952	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase laporan Aset Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	80 %	85 %	852,450,000	87 %	937,750,000	89 %	1,031,524,000	91 %	1,134,676,000	93 %	1,248,144,000	95 %	0		
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengelolaan BMD Secara Efisien, Transparan dan Akuntabel	85 %	87 %	852,450,000	89 %	937,750,000	91 %	1,031,524,000	93 %	1,134,676,000	95 %	1,248,144,000	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
Mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang berkualitas																			
	Meningkatkan pelayanan Terhadap pengelolaan Keuangan SKPD sesuai sistem Pengendalian Interen (SPI)			Persentase Pelayanan pengelolaan Keuangan SKPD sesuai Sistem pengendalian Interen (SPI) Pemerintah	85 %	87 %		89 %		91 %		93 %		95 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	85 %	87 %	28,742,586,839	89 %	31,616,845,522	91 %	34,778,530,074	93 %	38,256,383,081	95 %	42,082,021,389	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi kinerja Perangkat daerah secara Baik, Efektif Dan Maksimal	90 %	100 %	154,739,475	100 %	170,213,422	100 %	187,234,764	100 %	205,958,240	100 %	226,554,064	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Belanja gaji dan Tunjangan dan Penataan Keuangan kantor secara Optimal, efektif dan efisien	90 %	95 %	4,526,445,580	96 %	4,979,090,138	97 %	5,476,999,151	98 %	6,024,699,066	99 %	6,627,168,972	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi BMD SKPD Secara Efisien, Transparan dan Akuntabel	90 %	91 %	55,000,000	93 %	60,500,000	95 %	66,550,000	97 %	73,205,000	99 %	80,525,500	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Pendidikan Dan Pelatihan Formal	90 %	95 %	48,840,000	96 %	53,724,000	97 %	59,096,400	98 %	65,006,040	99 %	71,506,644	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum SKPD Secara Efisien, optimal dan Akuntabel	90 %	95 %	1,005,808,650	96 %	1,106,389,515	97 %	1,217,028,466	98 %	1,338,731,312	99 %	1,472,604,443	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah	90 %	95 %	567,458,375	96 %	624,204,212	97 %	686,624,633	98 %	755,287,096	99 %	830,815,805	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	tersedianya Jasa Penunjang Urusan Kantor secara optimal dan memadai	90 %	95 %	1,445,904,490	96 %	1,590,494,939	97 %	1,749,544,432	98 %	1,924,498,875	99 %	2,116,948,762	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dengan Baik	90 %	95 %	533,379,000	96 %	586,716,900	97 %	645,388,590	98 %	709,927,449	99 %	780,920,193	100 %	0	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	1. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan dan akuntabel efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah			1. Persentase realisasi PAD berdasarkan potensi PAD 2. Persentase realisasi PAD berdasarkan potensi PAD	70 % 70 %	70 % 70 %		75 % 75 %		76 % 76 %		78 % 78 %		80 % 80 %		80 % 80 %			
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	1. Program pengelolaan keuangan daerah 2. Program pengelolaan pendapatan daerah	70 % 70 %	70 % 70 %	30,000 6,058,000	75 % 75 %	33,000 6,497,741	76 % 76 %	36,300 6,553,000	78 % 78 %	39,430 7,967,048	80 % 80 %	44,000 8,155,000	80 % 80 %	0 0		
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	100 %	100 %	20,000,000	100 %	22,000,000	100 %	24,200,000	100 %	26,620,000	100 %	29,282,000	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	2. Analisa dan pengembangan pajak daerah serta penyusunan kebijakan pajak daerah	100 %	100 %	55,000,000	100 %	60,500,000	100 %	66,550,000	100 %	73,205,000	100 %	80,525,500	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	3. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	100 %	100 %	99,999,900	100 %	109,999,890	100 %	120,999,879	100 %	133,099,867	100 %	146,409,854	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	4. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	100 %	100 %	24,999,800	100 %	27,499,780	100 %	30,249,758	100 %	33,274,734	100 %	36,602,207	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5. Pendaftaran dan pendaftaran objek pajak daerah	100 %	100 %	384,499,900	100 %	422,949,890	100 %	465,244,879	100 %	511,769,367	100 %	562,946,304	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	6. Pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data pajak daerah	100 %	100 %	659,999,800	100 %	725,999,780	100 %	798,599,758	100 %	878,459,734	100 %	966,305,707	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	7. Penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBPP) serta Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)	100 %	100 %	89,999,725	100 %	98,999,698	100 %	108,899,667	100 %	119,789,634	100 %	131,768,597	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	8. Penetapan wajib pajak daerah	100 %	100 %	245,000,000	100 %	269,500,000	100 %	296,450,000	100 %	326,095,000	100 %	358,704,500	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	9. Pelayanan dan konsultasi pajak daerah	100 %	100 %	62,000,000	100 %	68,200,000	100 %	75,020,000	100 %	82,522,000	100 %	90,774,200	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	10. Penagihan pajak daerah	100 %	100 %	34,999,850	100 %	38,499,835	100 %	42,349,819	100 %	46,584,800	100 %	51,243,280	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	11. Penyelesaian keberatan pajak daerah	100 %	100 %	45,000,000	100 %	49,500,000	100 %	54,450,000	100 %	59,895,000	100 %	65,884,500	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	12. Pengendalian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah	100 %	100 %	184,999,800	100 %	203,499,780	100 %	223,849,758	100 %	246,234,734	100 %	270,858,207	100 %	0	BADAN PENDAPATAN DAERAH	
Mewujudkan Sumber Daya Aparatur yang Profesional dan Kompetitif																			
	Peningkatan Mutu Pelayanan Penyelenggaraan dan Pengembangan dan Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi																		
		5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Capaian Administrasi dan Manajemen Kepegawaian	70 %	70 %	4,345,000,000	75 %	4,779,500,000	80 %	5,257,500,000	85 %	5,783,195,000	90 %	6,361,514,000	100 %	0		
		5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Terlaksananya Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,630,000,000	1 Kegiatan	1,793,000,000	1 Kegiatan	1,972,300,000	1 Kegiatan	2,169,530,000	1 Kegiatan	2,386,483,000	1 Kegiatan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
		5.03.02.2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Terlaksananya Mutasi dan Promosi ASN	1170 Jabatan	299 Jabatan	360,000,000	301 Jabatan	396,000,000	200 Jabatan	435,600,000	270 Jabatan	479,160,000	200 Jabatan	527,076,000	1170 Jabatan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5						
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp					
		5.03.02.2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Terlaksananya Pengembangan Kompetensi ASN	1 Kegiatan	1 Kegiatan	675,000,000	1 Kegiatan	742,500,000	1 Kegiatan	816,750,000	1 Kegiatan	898,425,000	1 Kegiatan	988,267,500	1 Kegiatan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		5.03.02.2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,680,000,000	1 Kegiatan	1,848,000,000	1 Kegiatan	20,328,000,000	1 Kegiatan	2,236,080,000	1 Kegiatan	2,459,688,000	1 Kegiatan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Profesional dan Kompetitif				Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	7 Dokumen	7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen		7 Dokumen				
	Terciptanya Sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Daerah																			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8 Kegiatan	8 Kegiatan	7,491,500,000	8 Kegiatan	4,517,650,000	8 Kegiatan	4,969,415,000	8 Kegiatan	5,542,056,500	8 Kegiatan	6,021,442,150	8 Kegiatan	0			
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	225,000,000	1 Dokumen	247,500,000	1 Dokumen	272,250,000	1 Dokumen	299,475,000	1 Dokumen	329,422,500	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	95,000,000	1 Dokumen	105,500,000	1 Dokumen	114,950,000	1 Dokumen	126,445,000	1 Dokumen	139,089,500	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi barang milik daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	820,000,000	1 Dokumen	462,000,000	1 Dokumen	508,200,000	1 Dokumen	559,020,000	1 Dokumen	614,922,000	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	4,970,000,000	1 Dokumen	2,154,000,000	1 Dokumen	2,369,400,000	1 Dokumen	2,683,340,000	1 Dokumen	2,866,974,000	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	516,500,000	1 Dokumen	568,150,000	1 Dokumen	624,965,000	1 Dokumen	687,461,500	1 Dokumen	756,207,650	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6 Unit	6 Unit	355,000,000	6 Unit	420,500,000	6 Unit	462,550,000	8 Unit	508,305,000	10 Unit	568,135,500	12 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	510,000,000	12 Bulan	561,000,000	12 Bulan	617,100,000	12 Bulan	678,810,000	12 Bulan	746,691,000	12 Bulan	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	2 Unit	2 Unit	420,000,000	2 Unit	462,000,000	2 Unit	508,000,000	2 Unit	558,800,000	2 Unit	603,800,000	2 Unit	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	Tertatanya Organisasi Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	50,000,000	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,500,000	1 Dokumen	66,500,000	1 Dokumen	72,500,000	1 Dokumen	0	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA		
Efektifnya hasil penelitian dan pengembangan sebagai bahan perumusan kebijakan pembangunan daerah				Nilai Indeks Inovasi Daerah Nilai Indeks Daya Saing Daerah Meningkatnya pemanfaatan hasil kelibngan oleh OPD dan stakeholder	Inovatif Kategori Sedang Kategori 80 %	Inovatif Kategori Sedang Kategori 80 %		Inovatif Kategori Sedang Kategori 85 %		Inovatif Kategori Tinggi Kategori 90 %		Inovatif Kategori Tinggi Kategori 95 %		Sangat Inovatif Kategori Sangat Tinggi Kategori 100 %		Sangat Inovatif Kategori Sangat Tinggi Kategori 100 %				
	Tercapainya kelibngan daerah yang inovatif dan bermanfaat			Nilai Indeks Inovasi Daerah Indeks Daya Saing Daerah Pemanfaatan hasil kelibngan	Inovatif Kategori Sedang Kategori 80 %	Inovatif Kategori Sedang Kategori 80 %		Inovatif Kategori Sedang Kategori 85 %		Inovatif Kategori Sedang Kategori 90 %		Inovatif Kategori Tinggi Kategori 95 %		Sangat Inovatif Kategori Sangat Tinggi Kategori 100 %		Sangat Inovatif Kategori Sangat Tinggi Kategori 100 %				
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Presentase hasil kelibngan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	45 %	45 %	4,617,000,000	50 %	5,078,700,000	55 %	5,586,570,000	60 %	6,145,227,000	65 %	6,759,749,700	65 %	0			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		5.05.02.2.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	2 Dokumen	2 Dokumen	755,000,000	3 Dokumen	780,500,000	3 Dokumen	808,550,000	4 Dokumen	839,405,000	4 Dokumen	873,345,500	4 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.05.02.2.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	4 Dokumen	4 Dokumen	800,000,000	4 Dokumen	880,000,000	5 Dokumen	968,000,000	5 Dokumen	1,064,800,000	6 Dokumen	1,171,280,000	6 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.05.02.2.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5 Dokumen	5 Dokumen	1,200,000,000	6 Dokumen	1,320,000,000	6 Dokumen	1,452,000,000	6 Dokumen	1,597,200,000	7 Dokumen	1,756,920,000	7 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		5.05.02.2.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Teknologi dan Inovasi yang disusun	4 Dokumen	4 Dokumen	2,362,000,000	4 Dokumen	2,598,200,000	4 Dokumen	2,858,020,000	5 Dokumen	3,143,822,000	5 Dokumen	3,458,204,200	5 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel				Persentase tercapainya sistem kelembagaan dari ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional dan akuntabel	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD			Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan pelayanan Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	2,792,586,640	100 %	3,071,845,304	100 %	3,379,029,834	100 %	3,683,657,818	100 %	4,048,030,600	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang dihasilkan	8 Dokumen	8 Dokumen	121,000,000	8 Dokumen	133,100,000	8 Dokumen	146,410,000	8 Dokumen	110,510,000	8 Dokumen	177,156,100	8 Dokumen	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	1,576,586,640	12 Bulan	1,734,245,304	12 Bulan	1,907,669,834	12 Bulan	2,098,436,818	12 Bulan	2,308,280,500	12 Bulan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan terselenggaranya kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	135,000,000	12 Bulan	148,500,000	12 Bulan	163,350,000	12 Bulan	146,410,000	12 Bulan	157,058,000	12 Bulan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	12 Bulan	12 Bulan	242,000,000	12 Bulan	266,200,000	12 Bulan	292,820,000	12 Bulan	322,102,000	12 Bulan	354,312,200	12 Bulan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	14 Unit	14 Unit	603,000,000	14 Unit	663,300,000	14 Unit	729,630,000	14 Unit	802,593,000	14 Unit	882,852,300	14 Unit	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	40,000,000	12 Bulan	44,000,000	12 Bulan	48,400,000	12 Bulan	53,240,000	12 Bulan	58,564,000	12 Bulan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	12 Bulan	12 Bulan	75,000,000	12 Bulan	82,500,000	12 Bulan	90,750,000	12 Bulan	99,825,000	12 Bulan	10,807,500	12 Bulan	0	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	
Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel				Persentase Kesempurnaan Sistem Pengawasan	100 %	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya Kesempurnaan Sistem Pengawasan			Persentase Hasil Temuan BPK yang Telah Diselesaikan Peningkatan Level SPIP Peningkatan Nilai PMPRB Persentase Capaian MCP Peningkatan Kapabilitas APIP	85 % 2 Level C Nilai 55 % 2 Level	85 % 2+ Level CC Nilai 60 % 2 Level		90 % 3 Level B Nilai 70 % 2+ Level		90 % 3 Level B Nilai 80 % 2+ Level		95 % 3 Level BB Nilai 80 % 3 Level		95 % 3 Level A Nilai 80 % 3 Level		95 % 3 Level A Nilai 80 % 3 Level			
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Perangkat Daerah	80 %	80 %	5,605,000,000	82 %	6,005,000,000	85 %	7,155,000,000	90 %	7,955,000,000	95 %	9,250,000,000	95 %	0		
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase Peningkatan Kualitas Sistem Pengawasan Internal	80 %	80 %	4,755,000,000	82 %	4,830,000,000	85 %	5,690,000,000	90 %	6,280,000,000	95 %	7,250,000,000	95 %	0	INSPEKTORAT	
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Peningkatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	80 %	80 %	850,000,000	82 %	1,175,000,000	85 %	1,465,000,000	90 %	1,675,000,000	95 %	2,000,000,000	95 %	0	INSPEKTORAT	
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Terlaksananya Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi Pengawasan	80 %	80 %	788,000,000	82 %	938,000,000	85 %	995,000,000	90 %	1,410,000,000	95 %	1,640,000,000	95 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Tersusunnya Dokumen Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	2 Dokumen	2 Dokumen	288,000,000	2 Dokumen	288,000,000	2 Dokumen	290,000,000	2 Dokumen	370,000,000	2 Dokumen	450,000,000	2 Dokumen	0	INSPEKTORAT	
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Terwujudnya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi	2 Dokumen	3 Dokumen	500,000,000	7 Dokumen	650,000,000	7 Dokumen	705,000,000	7 Dokumen	1,040,000,000	7 Dokumen	1,190,000,000	7 Dokumen	0	INSPEKTORAT	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	5,241,000,000	100 %	6,100,000,000	100 %	12,900,000,000	100 %	8,485,000,000	100 %	9,307,000,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100 %	200,000,000	100 %	240,000,000	100 %	335,000,000	100 %	415,000,000	100 %	490,000,000	100 %	0	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Tepat Waktu	100 %	100 %	70,000,000	100 %	95,000,000	100 %	155,000,000	100 %	170,000,000	100 %	210,000,000	100 %	0	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,660,000,000	100 %	1,820,000,000	100 %	2,600,000,000	100 %	2,840,000,000	100 %	3,350,000,000	100 %	0	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	1,017,000,000	100 %	1,087,000,000	100 %	1,875,000,000	100 %	1,945,000,000	100 %	2,050,000,000	100 %	0	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	1,000,000,000	100 %	1,468,000,000	100 %	7,000,000,000	100 %	2,000,000,000	100 %	2,000,000,000	100 %	0	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	564,000,000	100 %	640,000,000	100 %	725,000,000	100 %	845,000,000	100 %	877,000,000	100 %	0	INSPEKTORAT	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	730,000,000	100 %	750,000,000	100 %	210,000,000	100 %	270,000,000	100 %	330,000,000	100 %	0	INSPEKTORAT	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	80 %	85 %	1,000,000,000	90 %	1,100,000,000	95 %	1,200,000,000	100 %	1,300,000,000	100 %	1,400,000,000	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Peningkatan pelayanan publik	100 %	100 %	1,100,000,000	100 %	1,200,000,000	100 %	1,300,000,000	100 %	1,400,000,000	100 %	1,500,000,000	100 %	0	Kecamatan Katobu	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Presentase Peningkatan Kegiatan	100 %	100 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	300,000,000	100 %	300,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Kecamatan Katobu	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan	100 %	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan pemberdayaan Kelurahan	100 %	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	6,500,000,000	100 %	0	Kecamatan Katobu	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Peningkatan pelayanan tingkat Kecamatan	100 %	100 %	7,000,000,000	100 %	7,000,000,000	100 %	7,000,000,000	100 %	7,000,000,000	100 %	7,000,000,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	110,000,000	1 Dokumen	120,000,000	1 Dokumen	130,000,000	1 Dokumen	140,000,000	1 Dokumen	0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	100 %	400,000,000	100 %	410,000,000	100 %	420,000,000	100 %	430,000,000	100 %	440,000,000	100 %	0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		0	Kecamatan Katobu	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Supremasi Hukum																			
	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Kualitas Pelayanan Publik																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	95 %	100 %	23,000,000	100 %	25,300,000	100 %	27,830,000	100 %	30,613,000	100 %	33,674,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tingkat Pemberdayaan Kelurahan	90 %	92 %	23,000,000	95 %	25,300,000	97 %	27,830,000	100 %	30,613,000	100 %	33,674,000	100 %	0	Kecamatan Lohia	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95 %	95 %	80,000,000	100 %	88,000,000	100 %	96,800,000	100 %	106,480,000	100 %	117,128,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 %	93 %	80,000,000	95 %	88,000,000	97 %	96,800,000	100 %	106,480,000	100 %	117,128,000	100 %	0	Kecamatan Lohia	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	80 %	85 %	1,795,000,000	90 %	1,974,500,000	95 %	2,171,950,000	100 %	2,389,145,000	100 %	2,628,059,500	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	80 %	85 %	67,000,000	90 %	73,700,000	95 %	81,070,000	100 %	89,177,000	100 %	98,094,700	100 %	0	Kecamatan Lohia	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan	80 %	85 %	1,500,000,000	90 %	1,650,000,000	95 %	1,815,000,000	100 %	1,996,500,000	100 %	2,196,150,000	100 %	0	Kecamatan Lohia	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terlaksananya program administrasi umum perangkat daerah	80 %	85 %	110,000,000	90 %	121,000,000	95 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	616,051,000	100 %	0	Kecamatan Lohia	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya program penunjang pemerintahan daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	30,000,000	85 %	33,000,000	90 %	36,300,000	95 %	39,930,000	100 %	43,923,000	100 %	0	Kecamatan Lohia	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan	75 %	80 %	71,000,000	85 %	78,100,000	90 %	85,910,000	95 %	94,501,000	100 %	103,951,100	100 %	0	Kecamatan Lohia	
		X.XX.01.2.13	Penataan Organisasi	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan	75 %	80 %	17,000,000	85 %	18,700,000	90 %	20,570,000	95 %	22,627,000	100 %	24,889,700	100 %	0	Kecamatan Lohia	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	90 %	92 %	900,000,000	96 %	990,000,000	98 %	1,089,000,000	100 %	1,197,900,000	100 %	1,317,700,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	95 %	100 %	900,000,000	100 %	990,000,000	100 %	1,089,000,000	100 %	1,197,900,000	100 %	1,317,900,000	100 %	0	Kecamatan Kabawo	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,500,000	100 %	66,550,000	100 %	74,000,000	100 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	95 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,500,000	100 %	66,550,000	100 %	74,000,000	100 %	0	Kecamatan Kabawo	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	2,710,128,035	80 %	2,981,140,000	85 %	3,279,254,000	90 %	3,607,179,000	95 %	3,967,896,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	65,000,000	90 %	71,500,000	95 %	78,650,000	100 %	86,515,000	100 %	95,166,000	100 %	0	Kecamatan Kabawo	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	2,453,055,960	80 %	2,698,361,000	85 %	2,968,197,000	90 %	3,651,016,000	95 %	4,015,171,000	100 %	0	Kecamatan Kabawo	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	93,930,250	85 %	103,323,000	90 %	113,655,000	95 %	125,020,000	100 %	137,522,000	100 %	0	Kecamatan Kabawo	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	35,792,840	85 %	39,372,000	90 %	43,309,000	95 %	47,639,000	100 %	52,402,000	100 %	0	Kecamatan Kabawo	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	62,348,985	85 %	68,583,000	90 %	75,441,000	95 %	82,985,000	100 %	91,283,000	100 %	0	Kecamatan Kabawo	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintah desa dalam mewujudkan kualitas pelayanan publik																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	2,700,000,000	100 %	2,970,000,000	100 %	3,267,000,000	100 %	3,593,700,000	100 %	3,953,070,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	terlaksananya program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	2,800,000,000	100 %	2,970,000,000	100 %	3,267,000,000	100 %	3,593,700,000	100 %	3,953,070,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 %	90 %	260,000,000	95 %	286,000,000	100 %	314,600,000	100 %	346,060,000	100 %	380,666,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80 %	85 %	260,000,000	90 %	286,000,000	95 %	314,600,000	100 %	346,060,000	100 %	380,666,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	3,835,876,152	85 %	4,219,463,000	90 %	4,641,409,000	95 %	5,105,549,000	100 %	5,616,103,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan	75 %	80 %	61,000,000	85 %	67,100,000	90 %	73,810,000	95 %	81,191,000	100 %	83,310,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase program pmnjung urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	3,010,876,152	85 %	3,311,963,000	90 %	3,643,159,000	95 %	4,007,474,000	100 %	4,408,221,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase program pmnjung urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	465,500,000	85 %	512,050,000	90 %	563,255,000	95 %	619,580,000	100 %	681,538,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	terlaksananya program urusan penunjang pemerintahan kabupaten/kota	75 %	80 %	50,000,000	85 %	60,000,000	90 %	70,000,000	95 %	80,000,000	100 %	90,000,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase program pmnjung urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	30,000,000	85 %	40,000,000	90 %	50,000,000	95 %	60,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase program pmnjung urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	240,000,000	85 %	264,000,000	90 %	290,400,000	95 %	319,440,000	100 %	351,384,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum				Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80 %	85 %		90 %		95 %		100 %		100 %		100 %			

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80 %	85 %	1,627,000,000	90 %	1,789,700,000	95 %	1,968,670,000	100 %	2,165,537,000	100 %	2,382,090,700	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	75 %	10,000,000	80 %	12,000,000	85 %	14,000,000	90 %	16,000,000	95 %	18,000,000	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	80 %	85 %	1,627,000,000	90 %	1,789,700,000	95 %	1,968,670,000	100 %	2,165,537,000	100 %	2,185,537,000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 %	75 %	50,000,000	80 %	55,000,000	85 %	60,000,000	90 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Pemberdayaan masyarakat kelurahan	100 %	75 %	2,000,000	80 %	2,100,000	85 %	2,200,000	90 %	2,300,000	95 %	2,400,000	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	pembinaan dan pengawasa pemerintah desa	100 %	75 %	50,000,000	80 %	55,000,000	85 %	60,000,000	90 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	80 %	85 %	1,610,000,000	90 %	1,771,000,000	95 %	1,984,100,000	100 %	2,182,510,000	100 %	2,400,716,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	80 %	85 %	67,000,000	90 %	73,700,000	95 %	81,070,000	100 %	89,177,000	100 %	98,094,700	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	tercapainya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	95 %	100 %	1,410,000,000	100 %	1,551,000,000	100 %	1,706,100,000	100 %	1,876,710,000	100 %	2,064,381,000	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	tercapainya program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	80 %	85 %	89,000,000	90 %	97,900,000	95 %	107,690,000	100 %	118,459,000	100 %	130,304,900	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	100 %	75 %	4,000,000	80 %	4,100,000	85 %	4,200,000	90 %	4,300,000	95 %	4,500,000	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	80 %	85 %	19,000,000	90 %	20,900,000	95 %	22,990,000	100 %	25,289,000	100 %	27,817,900	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	80 %	85 %	23,000,000	90 %	25,300,000	95 %	27,830,000	100 %	30,613,000	100 %	33,674,300	100 %	0	Kecamatan Napabalano	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000	100 %	121,000,000	100 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	95 %	100 %	100,000,000	100 %	110,000,000	100 %	121,000,000	100 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0	Kecamatan Lasalepa	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	2,150,000,000	85 %	2,365,000,000	90 %	2,601,500,000	95 %	2,861,650,000	100 %	3,147,815,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	1,800,000,000	85 %	1,980,000,000	90 %	2,178,000,000	95 %	2,395,800,000	100 %	2,635,380,000	100 %	0	Kecamatan Lasalepa	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	195,000,000	85 %	214,500,000	90 %	235,950,000	95 %	259,545,000	100 %	285,499,000	100 %	0	Kecamatan Lasalepa	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	65,000,000	85 %	71,500,000	90 %	78,650,000	95 %	86,515,000	100 %	95,166,000	100 %	0	Kecamatan Lasalepa	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	20,000,000	85 %	22,000,000	90 %	24,200,000	95 %	26,620,000	100 %	29,282,000	100 %	0	Kecamatan Lasalepa
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Penyelenggaran Pemerintahan dan Pelayanan Publik	75 %	80 %	1,200,000,000	85 %	1,200,000,000	90 %	1,200,000,000	95 %	1,200,000,000	100 %	1,200,000,000	100 %	0	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	erlaksananya Penyelenggaraan kegiatan pemerintah tingkat kecamatan	75 %	80 %	195,000,000	85 %	214,500,000	90 %	235,950,000	95 %	259,545,000	100 %	285,499,500	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	75 %	80 %	1,800,000,000	85 %	1,800,000,000	90 %	1,800,000,000	95 %	1,800,000,000	100 %	1,800,000,000	100 %	0	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tercapainya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75 %	80 %	1,800,000,000	85 %	1,800,000,000	90 %	1,800,000,000	95 %	1,800,000,000	100 %	1,800,000,000	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	78,000,000	100 %	95,000,000	100 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	200,000,000	100 %	0	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase meningkatnya pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Penyelenggaraan pelayanan Publik																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah daerah Kabupaten/kota	100 %	100 %	3,200,000,000	100 %	3,300,000,000	100 %	3,300,000,000	100 %	3,400,000,000	100 %	4,000,000,000	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten/ kota	75 %	80 %	20,000,000	85 %	25,000,000	90 %	27,000,000	95 %	28,000,000	100 %	30,000,000	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75 %	80 %	1,970,000,000	85 %	2,167,000,000	90 %	2,383,700,000	95 %	2,622,070,000	100 %	2,884,277,000	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pmerintahan Darah kabupaten/kota	75 %	80 %	72,000,000	85 %	85,000,000	90 %	90,000,000	95 %	100,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kabupaten/ kota	100 %	100 %	150,000,000	100 %	185,000,000	100 %	225,000,000	100 %	289,000,000	100 %	350,000,000	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tercapainya Pelaksanaan Pemeliharaan Milik Daerah Penunjang urusan pemerintahan	75 %	80 %	228,000,000	85 %	250,800,000	90 %	275,880,000	95 %	303,468,000	100 %	333,814,800	100 %	0	Kecamatan Bhata Laiworu
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan pelayanan publik																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	80 %	85 %	50,000,000	90 %	55,000,000	95 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	75 %	80 %	100,000,000	85 %	120,000,000	90 %	130,000,000	95 %	140,000,000	100 %	150,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	75 %	80 %	15,000,000	85 %	20,000,000	90 %	22,000,000	95 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	75 %	80 %	25,000,000	85 %	28,000,000	90 %	30,000,000	95 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	75 %	80 %	10,000,000	85 %	15,000,000	90 %	20,000,000	95 %	25,000,000	100 %	30,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	800,000,000	100 %	880,000,000	100 %	968,000,000	100 %	1,064,800,000	100 %	1,171,280,000	100 %	0	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75 %	75 %	100,000,000	80 %	125,000,000	85 %	150,000,000	95 %	175,000,000	98 %	200,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	75 %	80 %	800,000,000	85 %	880,000,000	90 %	968,000,000	95 %	1,064,800,000	100 %	1,171,280,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	75 %	80 %	70,000,000	85 %	75,000,000	90 %	80,000,000	95 %	85,000,000	100 %	90,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	80 %	20,000,000	85 %	22,000,000	90 %	24,200,000	95 %	26,620,000	100 %	29,282,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	80 %	50,000,000	85 %	55,000,000	90 %	60,000,000	95 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75 %	80 %	2,555,500,000	85 %	2,811,050,000	90 %	3,092,155,000	95 %	3,401,370,000	100 %	3,741,507,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75 %	80 %	100,000,000	85 %	125,000,000	90 %	150,000,000	95 %	175,000,000	100 %	200,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota	75 %	80 %	2,100,000,000	85 %	2,310,000,000	90 %	2,541,000,000	95 %	2,795,100,000	100 %	3,074,610,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	75 %	80 %	50,000,000	85 %	55,000,000	90 %	60,000,000	95 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75 %	80 %	100,000,000	85 %	110,000,000	90 %	120,000,000	95 %	130,000,000	100 %	140,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75 %	80 %	200,000,000	85 %	250,000,000	90 %	300,000,000	95 %	350,000,000	100 %	400,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75 %	80 %	100,000,000	85 %	130,000,000	90 %	150,000,000	95 %	175,000,000	100 %	200,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75 %	80 %	200,000,000	85 %	250,000,000	90 %	300,000,000	95 %	350,000,000	100 %	400,000,000	100 %	0	Kecamatan Duruka	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	80 %	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	%	20,000,000	%	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	20,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa Dan kelurahan	75 %	80 %	20,000,000	85 %	22,000,000	90 %	24,200,000	95 %	26,620,000	100 %	29,282,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan kelurahan	75 %	80 %	20,000,000	85 %	22,000,000	90 %	24,200,000	95 %	26,620,000	100 %	29,282,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	80 %	40,000,000	85 %	44,000,000	90 %	48,400,000	95 %	53,240,000	100 %	58,564,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	90 %	92 %	40,000,000	95 %	44,000,000	100 %	48,400,000	100 %	53,240,000	100 %	58,564,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan Pelayanan Publik																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	1,101,000,000	85 %	1,211,100,000	90 %	1,332,210,000	95 %	1,465,431,000	100 %	1,611,974,100	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	63,000,000	85 %	69,300,000	90 %	76,230,000	95 %	83,853,000	100 %	92,238,300	100 %	0	Kecamatan Kontunaga
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	726,000,000	85 %	798,600,000	90 %	878,460,000	95 %	966,306,000	100 %	1,062,936,600	100 %	0	Kecamatan Kontunaga
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	96,000,000	85 %	105,600,000	90 %	116,160,000	95 %	127,776,000	100 %	140,553,600	100 %	0	Kecamatan Kontunaga
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	105,500,000	85 %	127,650,000	90 %	140,415,000	95 %	154,456,000	100 %	169,901,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	110,000,000	85 %	121,000,000	90 %	133,100,000	95 %	146,410,000	100 %	161,051,000	100 %	0	Kecamatan Kontunaga
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan Pelayanan Publik																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa Dan Kelurahan	75 %	80 %	1,850,000,000	85 %	2,035,000,000	90 %	2,238,500,000	95 %	2,462,350,000	100 %	2,708,585,000	100 %	0	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Terlaksananya Pemberdayaan kelurahan	75 %	80 %	1,850,000,000	85 %	2,035,000,000	90 %	2,238,500,000	95 %	2,462,350,000	100 %	2,708,585,000	100 %	0	Kecamatan Watopute
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	80 %	35,000,000	85 %	38,500,000	90 %	42,350,000	95 %	46,585,000	100 %	51,243,500	100 %	0	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	80 %	35,000,000	85 %	38,500,000	90 %	42,350,000	95 %	46,585,000	100 %	51,243,500	100-	0	Kecamatan Watopute
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan Pelayanan Publik																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	90 %	95 %	66,000,000	100 %	72,600,000	100 %	79,860,000	100 %	87,846,000	100 %	96,630,000	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	66,000,000	85 %	72,600,000	90 %	79,860,000	95 %	87,846,000	100 %	96,630,000	100 %	0	Kecamatan Watopute
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	2,000,000,000	85 %	2,200,000,000	90 %	2,420,000,000	95 %	2,662,000,000	100 %	2,928,200,000	100 %	0	Kecamatan Watopute
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	112,582,750	80 %	123,841,000	85 %	136,225,000	90 %	149,847,000	95 %	164,831,000	100 %	0	Kecamatan Watopute
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	31,500,000	85 %	34,650,000	90 %	38,115,000	95 %	41,926,000	100 %	46,118,000	100 %	0	Kecamatan Watopute
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	25,000,000	90 %	27,500,000	95 %	30,250,000	100 %	33,275,000	100 %	36,602,000	100 %	0	Kecamatan Watopute
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan Pelayanan Publik																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	80 %	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	%	50,000,000	%	50,000,000	0 %	0	Kecamatan Parigi

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Terlaksananya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan masyarakat Desa Dan kelurahan	75 %	80 %	3,560,000,000	85 %	3,916,000,000	90 %	4,307,600,000	95 %	4,738,360,000	100 %	5,212,196,000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Desa	90 %	92 %	117,000,000	95 %	118,000,000	97 %	119,000,000	98 %	120,000,000	99 %	121,000,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Terlaksananya Pemberdayaan Kelurahan	90 %	92 %	3,400,000,000	94 %	3,400,000,000	95 %	3,600,000,000	97 %	3,800,000,000	99 %	4,000,000,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pembinaan Dan pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	80 %	3,260,000,000	85 %	3,586,000,000	90 %	3,944,600,000	95 %	4,339,060,000	100 %	4,772,966,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	90 %	92 %	50,000,000	95 %	55,000,000	97 %	60,000,000	98 %	65,000,000	99 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	2,759,730,000	85 %	3,035,703,000	90 %	3,339,730,000	95 %	3,673,703,000	100 %	40,410,730,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	65,000,000	85 %	71,500,000	90 %	78,650,000	95 %	86,515,000	100 %	95,166,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	2,500,000,000	85 %	2,750,000,000	90 %	3,025,000,000	95 %	3,327,500,000	100 %	3,660,250,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	112,000,000	85 %	123,200,000	90 %	135,520,000	95 %	149,072,000	100 %	163,979,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	35,000,000	85 %	38,500,000	90 %	42,350,000	95 %	46,585,000	100 %	51,243,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	53,000,000	85 %	58,300,000	90 %	64,130,000	95 %	70,543,000	100 %	77,597,000	100 %	0	Kecamatan Parigi	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase pelaksanaan pemberdayaan desa	90 %	92 %	50,000,000	95 %	55,000,000	97 %	60,000,000	99 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95 %	100 %	70,000,000	100 %	75,000,000	100 %	80,000,000	100 %	85,000,000	100 %	90,000,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	95 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	2,266,000,000	85 %	2,492,600,000	90 %	2,741,860,000	95 %	3,016,046,000	100 %	3,317,650,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	65,000,000	90 %	71,500,000	95 %	78,650,000	100 %	86,515,000	100 %	95,166,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	2,000,000,000	85 %	2,200,000,000	90 %	2,420,000,000	95 %	2,662,000,000	100 %	2,928,000,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	89,000,000	85 %	97,900,000	85 %	107,690,000	90 %	118,459,000	95 %	130,304,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya barang milik daerah	100 %	80 %	50,000,000	85 %	85,000,000	90 %	90,000,000	95 %	95,000,000	100 %	100,000,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	30,000,000	85 %	35,000,000	90 %	40,000,000	95 %	50,000,000	100 %	60,000,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	100,000,000	90 %	150,000,000	95 %	200,000,000	100 %	250,000,000	100 %	300,000,000	100 %	0	Kecamatan Kabangka
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan Pelayanan Publik																	
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	80 %	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0	
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya Koordinasi Tingkat Kecamatan dengan Baik	100 %	75 %	15,000,000	80 %	17,000,000	85 %	19,000,000	92 %	20,000,000	100 %	21,000,000	100 %	0	Kecamatan Bone
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tercapainya kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dengan baik	100 %	75 %	50,000,000	80 %	55,000,000	85 %	60,000,000	92 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Bone
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	persentase program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	75 %	80 %	170,000,000	85 %	187,000,000	90 %	205,700,000	95 %	226,270,000	100 %	248,900,000	100 %	0	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan	75 %	80 %	50,000,000	85 %	55,000,000	92 %	60,000,000	100 %	70,000,000	100 %	75,000,000	100 %	0	Kecamatan Bone
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan Pelayanan Publik																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	1,228,000,000	85 %	1,350,800,000	90 %	1,485,880,000	95 %	1,634,468,000	100 %	1,797,914,000	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	75 %	80 %	58,000,000	85 %	63,800,000	90 %	70,180,000	95 %	77,198,000	100 %	84,920,000	100 %	0	Kecamatan Bone
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	75 %	80 %	680,000,000	85 %	748,000,000	90 %	822,000,000	95 %	904,000,000	100 %	994,000,000	100 %	0	Kecamatan Bone
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	terselenggaranya program penunjang urusan pemerinyah daerah	75 %	80 %	200,000,000	85 %	220,000,000	90 %	242,000,000	95 %	266,200,000	100 %	292,820,000	100 %	0	Kecamatan Bone
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	terlaksananya program penunjang urusan pemerintah daerah	75 %	80 %	17,000,000	85 %	18,700,000	90 %	20,570,000	95 %	22,627,000	100 %	24,889,000	100 %	0	Kecamatan Bone
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya program penunjang urusan pemerintahan daerah	75 %	80 %	290,000,000	85 %	319,000,000	90 %	350,900,000	95 %	385,900,000	100 %	424,500,000	100 %	0	Kecamatan Bone
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Peningkatan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan Pelayanan Publik																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	: Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	75 %	80 %	930,000,000	85 %	1,023,000,000	90 %	1,125,300,000	95 %	1,237,830,000	100 %	1,361,613,000	100 %	0	
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Peningkatan Pemberdayaan Desa	90 %	92 %	25,000,000	94 %	30,000,000	96 %	35,000,000	97 %	40,000,000	99 %	45,000,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Kelurahan	90 %	95 %	850,000,000	96 %	875,000,000	97 %	900,000,000	98 %	925,000,000	99 %	950,000,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	75 %	80 %	25,000,000	85 %	27,500,000	90 %	30,250,000	95 %	33,275,000	100 %	36,602,000	100 %	0	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	50 %	60 %	25,000,000	70 %	30,000,000	80 %	35,000,000	90 %	45,000,000	95 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan pelayanan publik																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	2,043,954,100	85 %	2,248,349,000	90 %	2,473,183,000	95 %	2,720,501,000	100 %	2,992,551,000	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	69,000,000	90 %	75,900,000	95 %	83,490,000	95 %	91,839,000	100 %	101,022,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	959,804,100	80 %	1,055,784,000	85 %	1,161,362,000	90 %	1,277,498,000	95 %	1,405,247,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	392,700,000	80 %	431,970,000	85 %	475,167,000	90 %	522,683,000	95 %	574,951,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	70 %	75 %	342,000,000	80 %	376,200,000	85 %	413,820,000	90 %	455,202,000	95 %	500,722,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	43,000,000	90 %	47,300,000	95 %	52,030,000	100 %	57,233,000	100 %	62,956,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	237,450,000	85 %	261,195,000	90 %	287,314,000	95 %	316,045,000	100 %	347,649,000	100 %	0	Kecamatan Wakorumba Selatan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan pelayanan publik																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	39,000,000	100 %	42,900,000	100 %	47,190,000	100 %	51,909,000	100 %	57,099,000	100 %	0	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	90 %	100 %	39,000,000	100 %	42,900,000	100 %	47,190,000	100 %	51,909,000	100 %	57,099,000	100 %	0	Kecamatan Maligano
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	95 %	100 %	17,500,000	100 %	19,250,000	100 %	21,175,000	100 %	23,292,000	100 %	25,621,000	100 %	0	
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	95 %	100 %	17,500,000	100 %	19,250,000	100 %	21,175,000	100 %	23,292,000	100 %	25,621,000	100 %	0	Kecamatan Maligano
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan pelayanan publik																	
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	1,125,981,680	85 %	1,238,579,000	90 %	1,362,436,000	95 %	1,498,679,000	100 %	1,648,546,000	100 %	0	
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	65,000,000	90 %	71,500,000	95 %	78,650,000	100 %	86,515,000	100 %	95,166,000	100 %	0	Kecamatan Maligano
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	949,981,680	85 %	1,044,979,000	90 %	1,149,476,000	95 %	1,264,423,000	100 %	1,390,865,000	100 %	0	Kecamatan Maligano
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	74,000,000	90 %	81,400,000	95 %	89,540,000	100 %	98,494,000	100 %	108,343,000	100 %	0	Kecamatan Maligano
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	80 %	85 %	21,000,000	90 %	23,100,000	95 %	25,410,000	100 %	27,951,000	100 %	30,746,000	100 %	0	Kecamatan Maligano
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	90 %	95 %	16,000,000	100 %	17,600,000	100 %	19,360,000	100 %	21,296,000	100 %	23,425,000	100 %	0	Kecamatan Maligano
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																		
	Peningkatan pelayanan publik																	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	95 %	100 %	26,000,000	100 %	28,600,000	100 %	31,460,000	100 %	34,606,000	100 %	38,066,000	100 %	0	
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	95 %	100 %	26,000,000	100 %	28,600,000	100 %	31,460,000	100 %	34,606,000	100 %	38,066,000	100 %	0	Kecamatan Pasir Putih

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi	
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target			Rp
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	95 %	100 %	76,000,000	100 %	83,600,000	100 %	101,156,000	100 %	111,271,000	100 %	122,398,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	95 %	100 %	76,000,000	100 %	83,600,000	100 %	91,960,000	100 %	101,156,000	100 %	111,271,000	100 %	0	Kecamatan Pasir Putih	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75 %	80 %	1,226,600,000	85 %	1,349,260,000	90 %	1,484,186,000	95 %	1,632,604,000	100 %	1,795,864,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80 %	85 %	1,000,000,000	90 %	1,100,000,000	95 %	1,210,000,000	100 %	1,331,000,000	100 %	1,464,100,000	100 %	0	Kecamatan Pasir Putih	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Admintrasi Perangkat Daerah	75 %	80 %	109,000,000	85 %	119,900,000	90 %	131,890,000	95 %	131,890,000	100 %	145,079,000	100 %	0	Kecamatan Pasir Putih	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor Tersedianya Jasa Surat menyurat	75 %	80 %	28,600,000	85 %	31,460,000	90 %	34,606,000	95 %	38,066,000	100 %	41,872,000	100 %	0	Kecamatan Pasir Putih	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Dinas	80 %	85 %	24,000,000	90 %	26,400,000	95 %	29,040,000	100 %	31,944,000	100 %	35,138,000	100 %	0	Kecamatan Pasir Putih	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	80 %	85 %	0	90 %	0	95 %	0	100 %	0	100 %	0	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	100 %	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	persentase pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan	100 %	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	100 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	persentase pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %	100 %	30,000,000	100 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	50,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	6,000,000	100 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanan Pemberdayaan Masyarakat Desa	100 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	100 %	60,000,000	100 %	66,000,000	100 %	72,600,000	100 %	79,860,000	100 %	87,846,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	100 %	100 %	60,000,000	100 %	66,000,000	100 %	72,600,000	100 %	79,860,000	100 %	87,846,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	1,377,842,608	100 %	1,515,626,000	100 %	1,667,188,000	100 %	1,833,906,000	100 %	2,017,296,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	61,000,000	100 %	67,100,000	100 %	73,810,000	100 %	81,191,000	100 %	89,310,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	1,111,288,608	100 %	1,222,417,000	100 %	1,344,658,000	100 %	1,479,123,000	100 %	1,627,035,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	102,700,000	100 %	112,970,000	100 %	124,267,000	100 %	136,693,000	100 %	150,362,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	32,854,000	100 %	36,139,000	100 %	39,752,000	100 %	43,727,000	100 %	48,099,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100 %	100 %	70,000,000	100 %	77,000,000	100 %	84,700,000	100 %	93,170,000	100 %	102,487,000	100 %	0	Kecamatan Kontukowuna	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80 %	92 %	40,000,000	95 %	44,000,000	100 %	53,240,000	100 %	58,564,000	100 %	64,420,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	90 %	95 %	40,000,000	100 %	44,000,000	100 %	53,240,000	100 %	58,564,000	100 %	64,420,000	100 %	0	Kecamatan Marobo	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	85 %	92 %	91,000,000	95 %	100,100,000	100 %	110,110,000	100 %	121,121,000	100 %	133,233,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	80 %	90 %	91,000,000	95 %	100,100,000	100 %	110,110,000	100 %	121,121,000	100 %	133,233,000	100 %	0	Kecamatan Marobo	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	896,000,000	80 %	985,600,000	85 %	1,084,160,000	90 %	1,192,576,000	95 %	1,311,833,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	90 %	95 %	14,000,000	100 %	15,400,000	100 %	16,940,000	100 %	18,634,000	100 %	20,497,000	100 %	0	Kecamatan Marobo	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	600,000,000	80 %	660,000,000	85 %	726,000,000	90 %	798,600,000	95 %	878,460,000	100 %	0	Kecamatan Marobo	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	70 %	75 %	145,500,000	80 %	160,050,000	85 %	176,055,000	90 %	193,660,000	95 %	213,026,000	100 %	0	Kecamatan Marobo	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	36,500,000	85 %	40,150,000	90 %	44,165,000	95 %	48,581,000	100 %	53,439,000	100 %	0	Kecamatan Marobo	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	75 %	80 %	100,000,000	85 %	110,000,000	90 %	121,000,000	100 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0	Kecamatan Marobo	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase terpenuhinya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan	80 %	85 %	10,000,000	90 %	12,000,000	95 %	14,000,000	100 %	16,000,000	100 %	18,000,000	100 %	0		
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	terlaksananya kegiatan pemerintah dengan baik	100 %	75 %	10,000,000	80 %	12,000,000	85 %	14,000,000	90 %	16,000,000	95 %	18,000,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno Selatan	
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase peningkatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan	80 %	85 %	100,000,000	90 %	110,000,000	92 %	121,000,000	95 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0		
		7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Tingkat Pemberdayaan kelurahan	80 %	85 %	100,000,000	90 %	110,000,000	92 %	121,000,000	95 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno Selatan	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA																
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	90 %	92 %	20,000,000	100 %	22,000,000	100 %	24,200,000	100 %	26,620,000	100 %	29,282,000	100 %	0	Kecamatan Tongkuno Selatan	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Supremasi Hukum																			
	Peningkatan pelayanan publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah kabupaten	75 %	80 %	1,730,500,000	85 %	1,903,550,000	90 %	2,093,905,000	95 %	2,303,295,000	100 %	2,533,624,000	100 %	0		

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	persentase Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Persentase Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA Persentase Laporan Pencapaian Ikhtisar Ralisasi Kinerja OPD	70 %	75 %	910,000,000	80 %	1,001,000,000	85 %	1,101,100,000	90 %	1,211,210,000	95 %	1,332,331,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 %	92 %	65,000,000	95 %	71,500,000	100 %	78,650,000	100 %	86,515,000	100 %	95,166,000	100 %	0	Kecamatan Batukara	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Admistrasi Keuangan Perangkat Daerah	70 %	75 %	700,000,000	80 %	770,000,000	85 %	847,000,000	90 %	931,700,000	95 %	1,024,870,000	100 %	0	Kecamatan Batukara	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan aderah kabupaten / kota	90 %	92 %	95,000,000	95 %	104,500,000	100 %	114,950,000	100 %	126,445,000	100 %	139,089,000	100 %	0	Kecamatan Batukara	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90 %	95 %	38,000,000	100 %	41,800,000	100 %	45,980,000	100 %	50,578,000	100 %	55,635,000	100 %	0	Kecamatan Batukara	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa Pemeliharaan dan pajak kendaraan Dinas Daerah	90 %	95 %	12,000,000	100 %	13,200,000	100 %	14,520,000	100 %	15,975,000	100 %	17,572,000	100 %	0	Kecamatan Batukara	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang di berdayakan	100 %	100 %	50,000,000	100 %	55,000,000	100 %	60,000,000	100 %	65,000,000	100 %	70,000,000	100 %	0		
		7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	90 %	92 %	25,000,000	95 %	30,000,000	98 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	0	Kecamatan Towea	
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase pelaksanaan pembinaan dan pengawasan perangkat desa	80 %	85 %	25,000,000	90 %	30,000,000	95 %	35,000,000	100 %	40,000,000	100 %	45,000,000	100 %	0		
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 %	90 %	75,000,000	93 %	80,000,000	95 %	85,000,000	98 %	90,000,000	100 %	10,000,000	100 %	0	Kecamatan Towea	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan penegakan supremasi hukum																			
	Peningkatan Pelayanan Publik																		
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase penataan Admistrasi Perkantoran Keuangan Persentase Penyediaan Dokumen Perencanaan OPD Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana	70 %	75 %	1,310,085,224	80 %	1,441,093,000	85 %	1,585,202,000	90 %	1,743,722,000	95 %	1,918,094,000	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya, Perencanaan Dan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	70 %	75 %	78,000,000	80 %	85,800,000	85 %	94,380,000	90 %	103,818,000	95 %	114,199,000	100 %	0	Kecamatan Towea	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Telaksananya pelayanan administrasi Perkantoran Terlaksananya Penataan Administrasi Keuangan OPD Terlaksananya Penyediaan Dokumen Perencanaan OPD Terlaksananya penyediaan Sarana Prasarana OPD	70 %	80 %	897,085,224	85 %	986,793,000	90 %	1,085,472,000	95 %	1,194,019,000	100 %	1,313,420,000	100 %	0	Kecamatan Towea	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Admistrasi Perangkat Umum Daerah	70 %	75 %	130,000,000	80 %	143,000,000	85 %	157,300,000	90 %	173,030,000	95 %	110,333,000	100 %	0	Kecamatan Towea	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedinya Jsa Penunjasng urusan Pemerintahan Daerah	80 %	85 %	100,000,000	90 %	110,000,000	92 %	121,000,000	95 %	133,100,000	100 %	146,410,000	100 %	0	Kecamatan Towea	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Dinas Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilias Gedung Kantor	75 %	80 %	105,000,000	85 %	115,500,000	90 %	127,050,000	92 %	139,755,000	95 %	153,730,000	100 %	0	Kecamatan Towea	
Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima				Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	100 %	100 %		100 %	100 %										
	Meningkatnya Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, Pemilukada, Pilkades, serta kegiatan politik lainnya.			Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu, Pemilukada, Pilkades, serta kegiatan politik lainnya.	70 %	70 %		73 %	75 %	77 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %				

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Partisipasi politik masyarakat dalam pemilu, Pemilukada, Pilkades, serta kegiatan politik lainnya	80 %	80 %	1,200,000,000	86 %	1,320,000,000	91 %	1,452,000,000	100 %	1,597,200,000	100 %	1,756,920,000	100 %	0		
		8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik yang dirumuskan	4 Dokumen	4 Dokumen	1,200,000,000	4 Dokumen	1,370,000,000	4 Dokumen	1,452,000,000	4 Dokumen	1,597,200,000	4 Dokumen	1,756,920,000	4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian seluruh stakeholder dalam menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kenyamanan di daerah			Persentase potensi gangguan/ konflik yang teratasi	80 %	80 %		85 %		90 %		95 %		100 %		100 %			
		8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Meningkatnya pemahaman tentang Nilai - Nilai Ideologi Negara dan Wawasan Kebangsaan di masyarakat	80 %	83 %	1,200,000,000	86 %	1,320,000,000	88 %	1,452,000,000	91 %	1,597,200,000	95 %	1,756,920,000	100 %	0		
		8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan yang dirumuskan	4 Dokumen	4 Dokumen	1,200,000,000	4 Dokumen	1,320,000,000	4 Dokumen	1,452,000,000	4 Dokumen	1,597,200,000	4 Dokumen	1,756,920,000	4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang aktif dalam mendapatkan pembinaan dan pengawasan	80 %	85 %	400,000,000	88 %	440,000,000	90 %	484,000,000	95 %	532,400,000	100 %	585,640,000	100 %	0		
		8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan yang dirumuskan	4 Dokumen	4 Dokumen	400,000,000	4 Dokumen	440,000,000	4 Dokumen	484,000,000	4 Dokumen	532,400,000	4 Dokumen	585,640,000	4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Meningkatnya Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, dan agama	78 %	80 %	550,000,000	86 %	605,000,000	91 %	665,500,000	95 %	732,050,000	100 %	805,255,000	100 %	0		
		8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya yang dirumuskan	4 Dokumen	4 Dokumen	550,000,000	4 Dokumen	605,000,000	4 Dokumen	665,500,000	4 Dokumen	732,050,000	4 Dokumen	805,255,000	4 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Jumlah Pengawasan dan Pemeliharaan Kantrantibmas	80 %	85 %	1,200,000,000	90 %	1,320,000,000	95 %	1,452,000,000	100 %	1,597,200,000	100 %	1,756,920,000	100 %	0		
		8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Kebijakan Teknis dan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang dirumuskan	5 Dokumen	5 Dokumen	1,200,000,000	5 Dokumen	1,350,000,000	5 Dokumen	1,452,000,000	5 Dokumen	1,597,200,000	5 Dokumen	1,756,920,000	5 Dokumen	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel				Persentase pelaksanaan tata kelola administrasi dan pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel	80 %	85 %		85 %		90 %		90 %		100 %		100 %			
	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja OPD			Nilai AKIP	A	A		A		A		AA		AA		AA			
		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Tata Kelola Administrasi dan Pelaporan OPD yang Akuntabel	90 %	93 %	2,817,000,000	95 %	3,266,700,000	98 %	3,343,370,000	100 %	3,669,707,000	100 %	4,068,677,700	100 %	0		
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 %	100 %	100,000,000	100 %	145,000,000	100 %	150,000,000	100 %	155,000,000	100 %	160,000,000	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu	100 %	100 %	2,000,000,000	100 %	2,115,000,000	100 %	2,200,000,000	100 %	2,210,791,000	100 %	2,431,870,100	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penataan Administrasi Barang Milik Daerah yang tertib, teratur dan efektif	100 %	100 %	6,000,000	100 %	6,600,000	100 %	7,260,000	100 %	7,986,000	100 %	8,784,600	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

**Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
Kabupaten Muna**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat kepuasan layanan administrasi kepegawaian SKPD	100 %	100 %	240,000,000	100 %	264,000,000	100 %	290,400,000	100 %	319,440,000	100 %	351,384,000	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	423,000,000	100 %	465,300,000	100 %	511,830,000	100 %	563,013,000	100 %	619,314,300	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik Daerah yang menunjang pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah	100 %	100 %	260,000,000	100 %	500,000,000	100 %	300,000,000	100 %	330,000,000	100 %	363,000,000	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	195,000,000	100 %	214,500,000	100 %	235,950,000	100 %	259,545,000	100 %	285,499,500	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik	100 %	100 %	130,000,000	100 %	143,000,000	100 %	157,300,000	100 %	173,030,000	100 %	190,333,000	100 %	0	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
PELAYANAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN KABUPATEN MUNA TAHUN 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima		Terwujudnya Kinerja Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan pada masyarakat secara prima	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan rakyat						

MUNA, 15 Maret 2023

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Muna

ARWIN, S.Pd.
NIP. 196804022006041001

**RUMUSAN VISI, MISI, TUJUAN SASARAN DAN INDIKATOR RPJMD
KABUPATEN MUNA
TAHAPAN : RANCANGAN AKHIR RPJMD 20212026**

NO	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA										
Meningkatkan Daya Saing Perekonomian Daerah										
		Mengembangkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	58,58 %	59,18 %	59,5 %	59,82 %	60,14 %	60,46 %	299,1 %
		Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan Keadilan serta Berwawasan Lingkungan Seiring dengan Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Lokal	Produksi sektor pertanian	64.105,2 Ton	8.000 Ton	9.000 Ton	10.000 Ton	11.000 Ton	12.000 Ton	12.000 Ton
		Adanya Peningkatan Pengelolaan/ Pemanfaatan Sumber Daya Lahan dan Air Melalui Perluasan Areal Budidaya yang Berwawasan Lingkungan	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB	35 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	65 %
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup yang Sesuai dengan Baku Mutu yang Ditetapkan	Presentase pengendalian kawasan bebas pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			76 %				0 %
		Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berorientasi Kerakyatan	Pertumbuhan Ekonomi	3,18 %	3,2 %	3,41 %	4,2 %	5,1 %	6,1 %	22,01 %
		Adanya Peningkatan Kontribusi PDRB dan Pendapatan Perkapita dari Sektor Pertanian (Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan) dan Peternakan	Pertumbuhan PDRB sub sektor pertanian dan Peternakan	29,5 %	30 %	30,5 %	31 %	31,5 %	32 %	32 %
		Peningkatan Kapasitas Usaha dan akses Pembiayaan Bagi Wirausaha	Persentase UMKM produktif dan mandiri	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		Adanya Peningkatan Penciptaan Peluang Usaha dan Start -up, Serta Melakukan Pengembangan Kewirausahaan,UMKM, dan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Berkualitas dan Berprestasi	78 %	82 %	86 %	90 %	94 %	98 %	98 %
			Jumlah UMKM yang mengikuti Pelatihan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Daya Saing Destinasi dan Industri Pariwisata Daerah	Persentase Jumlah obyek wisata yang di kembangkan	92 %	94 %	96 %	98 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Daerah	Persentase pengembangan destinasi wisata	81 %	84 %	87 %	95 %	100 %	100 %	100 %
		Semakin Mantapnya Struktur Perekonomian Daerah yang Didukung oleh Semakin Meningkatnya Peran dan Fungsi UMKM dan Koperasi	Persentase UMKM produktif dan mandiri	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
		Meningkatkan Iklim Investasi Daerah yang Kompetitif	Persentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA dan PMDN	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	400 %
		Peningkatan Keterampilan Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	5,8 %	5,32 %	4,75 %	4,19 %	3,67 %	3,06 %	3,06 %

NO	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Kemampuan dan Produktivitas Masyarakat Transmigrasi, Membangun Kemandirian dan Mewujudkan Integrasi di Permukiman Transmigrasi	Jumlah Pusat Pertumbuhan Wilayah di Kawasan Transmigrasi Yang Tumbuh	2 Kawasan	3 Kawasan	4 Kawasan	5 Kawasan	6 Kawasan	7 Kawasan	7 Kawasan
			Jumlah Transmigran dan Masyarakat Sekitarnya di Kawasan Transmigrasi yang Meningkatkan Kesejahteraan	360 KK	460 KK	560 KK	660 KK	760 KK	860 KK	860 KK
		Mengintensifkan Investasi untuk Menghidupkan Kawasan Pengembangan dan Pusat -pusat Pertumbuhan yang Telah di Identifikasi Sesuai Dengan Potensi/ Komoditas Unggulan	Persentase jumlah investasi	75 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Surplus Perdagangan di Kabupaten Muna, Baik Perdagangan Antar Wilayah Maupun Ekspor	Persentase Tingkat inflasi diatas inflasi Propinsi sulawesi tenggara	5 %	4 %	3 %	3 %	2 %	2 %	2 %
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk UMKM dan Koperasi	Income Perkapita (harga berlaku)	30,2 %	34 %	37 %	40 %	43 %	48 %	48 %
Meningkatkan Kapasitas dan Pemerataan Infrastruktur										
		Meningkatkan Jangkauan dan Kualitas Infrastruktur Pendukung Konektifitas Wilayah Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi dan Pemukiman Masyarakat	Cakupan kualitas layanan transportasi	45 %	45,5 %	50,1 %	53,35 %	56,32 %	60 %	265,27 %
		Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Dasar Pendukung Aksesibilitas Kawasan Perkotaan dan Perdesaan	Presentase kualitas jalan dalam kondisi mantap	79,33 %	82,12 %	85,14 %	88,7 %	90,8 %	93 %	93 %
		Meningkatnya Kualitas Perumahan dan Lingkungan Permukiman yang Layak dan Produktif Serta Penurunan Persentase Kawasan Kumuh Kota Raha	Persentase rumah layak huni	61 %	73 %	83 %	93 %	100 %	100 %	100 %
		Tersedianya Ruang Terbuka Hijau dan Ruang Terbuka Publik di Kota Raha serta Pusat Permukiman Lainnya di masing -masing Wilayah Kecamatan	Persentase Jumlah Ruang Terbuka Hijau	65 %	70 %	75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
		Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup yang Baik dan Kompetensi Lingkungan Hidup yang Berdaya Saing	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68 %	71 %	74 %	78 %	83 %	85 %	85 %
		Tersedianya Jaringan Jalan dan Jembatan dengan Mengedepankan Aspek Pemerataan Diseluruh Kecamatan Wilayah Kabupaten Muna	Presentase kualitas jalan dalam kondisi mantap	79,33 %	82,12 %	85,14 %	88,7 %	90,8 %	93 %	93 %
		Upaya peningkatan konservasi sumber daya air melalui revitalisasi dan optimalisasi fungsi sungai dan jaringan irigasi	Persentase Panjang jaringan irigasi yang dibuat/terhabilitasi	74 %	78 %	82 %	86 %	90 %	94 %	94 %
		Terwujudnya Tata Ruang yang baik dengan Adanya Pemerataan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Cita-cita RTRW Kabupaten Muna	Rata-rata tingkat penggunaan lahan yang sesuai tata ruang	80,44 %	83 %	87 %	71 %	73 %	78 %	78 %

NO	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terpenuhinya Fasilitas Sarana dan Prasarana Layanan Kesehatan	Persentase kondisi unit-unit pelayanan kesehatan dalam kondisi baik dan sedang	86,07 %	88,07 %	90,07 %	92,07 %	94,07 %	96 %	96 %
		Tersedianya Akses Air Bersih dan Pelayanan Jaringan Air Minum Secara Merata Melalui Pembangunan yang Berkelanjutan	Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	88 %	90 %	92 %	94 %	96 %	98 %	98 %
			Persentase Akses Air Minum Layak dan Berkelanjutan	68 %	72 %	75 %	78 %	82 %	86 %	86 %
		Terwujudnya Sarana dan Prasarana Dermaga/Pelabuhan Rakyat yang Sesuai Standar	Presentase kualitas akses dan mobilitas barang dan orang bagi wilayah-wilayah	38,7 %	42,7 %	46,89 %	50,6 %	54 %	57,7 %	57,7 %
Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya										
		Memperkuat Kehidupan Beragama dan Nilai-Nilai Budaya Muna Dalam Pengelolaan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan	Lembaga Adat Daerah	Tidak Ada Lembaga Adat	Ada Lembaga Adat	Ada Lembaga Adat	Ada Lembaga Adat	Ada Lembaga Adat	Ada Lembaga Adat	Ada Lembaga Adat
		Menguatnya Modernisasi Beragama Untuk Mewujudkan Kerukunan Umat dan Membangun Harmoni Sosial Dalam Kehidupan Masyarakat	Persentase Desa yang memiliki kelembagaan Adat	75 %	83,2 %	87 %	90,25 %	94,35 %	98,7 %	98,7 %
		Terlaksananya Inventarisasi Aspek-Aspek Tradisi Untuk Menggali Kearifan Tradisional yang Dimiliki oleh Masyarakat Kab. Muna serta Inventarisasi Masyarakat Adat, Tempat Spritual dan Reinventarisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di Lestarikan	30 %	36 %	50 %	55 %	60 %	65 %	65 %
		Mewujudkan Pelayanan Dasar Masyarakat Secara Prima	Indeks Pembangunan Manusia	69,17 Angka	69,27 Angka	69,41 Angka	69,59 Angka	71,23 Angka	71,32 Angka	350,82 Angka
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Puas Indeks (Skala 0-100)	Puas Indeks (Skala 0-100)					
		Meningkatkan pendidikan yang baik dan bermutu	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Puas Indeks (Skala 0-100)	Sangat Puas Indeks (Skala 0-100)	Sangat Puas Indeks (Skala 0-100)				
		Meningkatnya Penerima Jaminan Sosial Utamanya Masyarakat yang Usia Lanjut yang Tidak Potensial Maupun Penyandang Disabilitas	Persentase Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga Miskin	63,73 %	68,73 %	72,73 %	77,73 %	82,73 %	87,58 %	87,58 %
		Terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan rakyat								0
Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Manusia										
		Mewujudkan Sumberdaya Aparatur yang Professional dan Kompetitif	Nilai SAKIP	B Predikat	B Predikat	B Predikat	BB Predikat	BB Predikat	A Predikat	390 Predikat
		Peningkatan mutu Pelayanan, penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sertifikasi kompetensi	Nilai SAKIP perangkat daerah dengan kategori B	B Nilai	B Nilai	B Nilai	B Nilai	BB Nilai	BB Nilai	BB Nilai

NO	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatkan Daya Saing Masyarakat dan Pemuda serta Kesetaraan Gender	Indeks Pembangunan Gender	20 %	21 %	22 %	23 %	24 %	25 %	25 %
		Penerapan Anggaran Responsif Gender (ARG)	Indeks Pemberdayaan Gender	62,5 Indeks	65 Indeks	70 Indeks	75 Indeks	80 Indeks	85 Indeks	85 Indeks
		Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Angka Kemiskinan	13,54 Angka	12,67 Angka	12,23 Angka	11,87 Angka	10,78 Angka	10 Angka	10 Angka
			Persentase peningkatan kesejahteraan sosial	77 %	81 %	84 %	87 %	90 %	93 %	93 %
		Meningkatnya Pengendalian Pertumbuhan Penduduk Serta Meningkatnya Upaya Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan Keadilan Gender	Laju Pertumbuhan penduduk	1,19 %	1,19 %	1,19 %	1,1 %	1,9 %	1,9 %	1,9 %
		Meningkatnya Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak	Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan bantuan hukum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya Peran Pemuda dan Berkembangnya Olahraga	Persentase organisasi pemuda yang aktif	85 %	87 %	90 %	93 %	96 %	96 %	96 %
			Cakupan pembinaan olahraga	75 %	80 %	85 %	90 %	95 %	100 %	100 %
Mengembangkan Inovasi Pembangunan dan Pelayanan Publik										
		Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pembangunan dan Tanggap Bencana	Persentase Desa Tanggap Bencana	35 %	45 %	50 %	55 %	60 %	65 %	65 %
		Terintegrasinya Pengurangan Risiko Bencana Dalam Perencanaan Pembangunan di Pusat dan Daerah	Persentase Infrastruktur Daerah terkena bencana yang direhabilitasi/ rekonstruksi	60 %		84 %				0 %
		Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana	Keberadaan media center kebencanaan	Tidak Ada Angka	Tidak Ada Angka	Ada Angka	Ada Angka	Ada Angka	Ada Angka	Ada Angka
		Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata Kelola Penanggulangan Bencana	Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang menerima bantuan kebutuhan dasar fisik dan psikis			75 %	80 %	85 %	90 %	90 %
		Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Penegakan Supremasi Hukum	Indeks Reformasi Birokrasi	C Predikat	C Predikat	CC Predikat	CC Predikat	B Predikat	B Predikat	310 Predikat
		Terciptanya Pelayanan Publik pada Setiap Unit Pelayanan Pemerintah yang Didasarkan pada Standar Pelayanan	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Puas Indeks (Skala 0-100)	Cukup Puas Indeks (Skala 0-100)	Cukup Puas Indeks (Skala 0-100)				
		Terciptanya Sistem Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah yang Bersifat Efisien, Efektif, Transparan dan Akuntabel	Persentase Kesempurnaan Sistem Pengawasan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase Kesempurnaan Sistem Pengawasan Opini BPK	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Efektifnya Hasil Penelitian dan Pengembangan Sebagai Bahan Perumusan Kebijakan Pembangunan Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Kurang Inovatif Indeks	Inovatif Indeks	Inovatif Indeks	Inovatif Indeks	Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks	Sangat Inovatif Indeks

NO	Visi & Misi	Tujuan/ Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target tahun					Kondisi Akhir
					2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Terhapusnya Aturan, Peraturan dan Praktek yang Bersifat Diskriminatif Terhadap Warga, Kelompok atau Golongan Masyarakat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Puas Indeks (Skala 0-100)						
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kualiatas Pelayanan Publik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Puas Indeks (Skala 0-100)						

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MUNA YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, DAN SEJAHTERA			
Misi : Meningkatkan Pembangunan Sosial Budaya			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan pelayanan dasar masyarakat secara prima	Terciptanya ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan rakyat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan response time yang belum tercapai 2. Membangun dan memelihara sarana dan prasarana yang mendukung 3. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur 4. Mengembangkan sistem informasi dan komunikasi terkait pengaduan kebakaran 5. Mengoptimalkan pembentukan satlakar dan balakar 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan mitigasi bencana kebakaran 2. Membangun jumlah pos pemadam kebakaran sesuai dengan luas kabupaten Muna 3. Peningkatan kapasitas aparatur dan layanan 4. Penyediaan sistem pelayanan penanganan bencana kebakaran berbasis wilayah 5. Peningkatan penyediaan sarana dan prasarana penanganan kebakaran

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN
KABUPATEN MUNA PERIODE 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		-	-	-	-	3.559.000.000	-	6.884.900.000	-	7.376.390.000	-	7.907.029.000	-	25.727.319.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	-	100 %	85.000.000	100 %	93.500.000	100 %	102.850.000	100 %	113.135.000	100 %	394.485.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	25.000.000	2 Dokumen	27.500.000	2 Dokumen	30.250.000	2 Dokumen	33.275.000	2 Dokumen	116.025.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	46.410.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	11.000.000	1 Dokumen	12.100.000	1 Dokumen	13.310.000	1 Dokumen	46.410.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	1 Dokumen	23.205.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.500.000	1 Dokumen	6.050.000	1 Dokumen	6.655.000	1 Dokumen	23.205.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	22.000.000	1 Laporan	24.200.000	1 Laporan	26.620.000	1 Laporan	92.820.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	-	3 Laporan	10.000.000	3 Laporan	11.000.000	3 Laporan	12.100.000	3 Laporan	13.310.000	3 Laporan	46.410.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	100 %	100 %	-	100 %	2.030.000.000	100 %	2.233.000.000	100 %	2.456.300.000	100 %	2.701.930.000	100 %	9.421.230.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	21 Orang/bulan	21 Orang/bulan	-	21 Orang/bulan	2.000.000.000	21 Orang/bulan	2.200.000.000	21 Orang/bulan	2.420.000.000	21 Orang/bulan	2.662.000.000	21 Orang/bulan	9.282.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	-	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	22.000.000	2 Dokumen	24.200.000	2 Dokumen	26.620.000	2 Dokumen	92.820.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.500.000	2 Laporan	6.050.000	2 Laporan	6.655.000	2 Laporan	23.205.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	5.000.000	2 Laporan	5.500.000	2 Laporan	6.050.000	2 Laporan	6.655.000	2 Laporan	23.205.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	100 %	85.000.000	100 %	93.500.000	100 %	102.850.000	100 %	113.135.000	100 %	394.485.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	20.000.000	1 Unit	22.000.000	1 Unit	24.200.000	1 Unit	26.620.000	1 Unit	92.820.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	65.000.000	1 Paket	71.500.000	1 Paket	78.650.000	1 Paket	86.515.000	1 Paket	301.665.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	100 %	-	100 %	417.000.000	100 %	458.700.000	100 %	504.570.000	100 %	555.027.000	100 %	1.935.297.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.500.000	1 Paket	6.050.000	1 Paket	6.655.000	1 Paket	23.205.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	50.000.000	1 Paket	55.000.000	1 Paket	60.500.000	1 Paket	66.550.000	1 Paket	232.050.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	150.000.000	1 Paket	165.000.000	1 Paket	181.500.000	1 Paket	199.650.000	1 Paket	696.150.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	-	1 Paket	10.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	12.100.000	1 Paket	13.310.000	1 Paket	46.410.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.200.000	1 Dokumen	2.420.000	1 Dokumen	2.662.000	1 Dokumen	9.282.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	2 Laporan	-	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	220.000.000	2 Laporan	242.000.000	2 Laporan	266.200.000	2 Laporan	928.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	100 %	-	100 %	200.000.000	100 %	3.170.000.000	100 %	3.292.000.000	100 %	3.416.200.000	100 %	10.078.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	750.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	-	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	2.000.000.000	1 Unit	6.000.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20 Unit	20 Unit	-	20 Unit	50.000.000	20 Unit	55.000.000	20 Unit	60.500.000	20 Unit	66.550.000	20 Unit	232.050.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit	150.000.000	2 Unit	165.000.000	2 Unit	181.500.000	2 Unit	199.650.000	2 Unit	696.150.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	-	2 Unit	-	2 Unit	500.000.000	2 Unit	600.000.000	2 Unit	700.000.000	2 Unit	1.800.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	300.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit	10 Unit	-	10 Unit	-	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	100.000.000	10 Unit	300.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	100 %	462.000.000	100 %	528.200.000	100 %	579.020.000	100 %	634.922.000	100 %	2.204.142.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	12.000.000	1 Laporan	13.200.000	1 Laporan	14.520.000	1 Laporan	15.972.000	1 Laporan	55.692.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	-	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	60.000.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	-	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	495.000.000	1 Laporan	544.500.000	1 Laporan	598.950.000	1 Laporan	2.088.450.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	-	100 %	280.000.000	100 %	308.000.000	100 %	338.800.000	100 %	372.680.000	100 %	1.299.480.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	
		1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	-	3 Unit	180.000.000	3 Unit	198.000.000	3 Unit	217.800.000	3 Unit	239.580.000	3 Unit	835.380.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	-	1 Unit	100.000.000	1 Unit	110.000.000	1 Unit	121.000.000	1 Unit	133.100.000	1 Unit	464.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	KAB. MUNA
		1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		-	-	-	-	250.000.000	-	275.000.000	-	302.500.000	-	312.750.000	-	1.140.250.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATA	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan (output) dan Subkegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		target	Rp		
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
		1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran	100 %	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	100 %	-	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	
		1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	100 %	100 %	-	100 %	50.000.000	100 %	55.000.000	100 %	60.500.000	100 %	66.550.000	100 %	232.050.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	
		1.05.04.2.02.01	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	-	-	-	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	55.000.000	1 Dokumen	60.500.000	1 Dokumen	66.550.000	1 Dokumen	232.050.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	KAB. MUNA
		1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Persentase Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100 %	100 %	-	100 %	200.000.000	100 %	220.000.000	100 %	242.000.000	100 %	246.200.000	100 %	908.200.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	
		1.05.04.2.04.01	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	-	-	-	95 Orang	100.000.000	104 Orang	110.000.000	114 Orang	121.000.000	124 Orang	113.100.000	437 Orang	444.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	KAB. MUNA
		1.05.04.2.04.02	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	-	-	-	20 Desa/Kelurahan	100.000.000	22 Desa/Kelurahan	110.000.000	24 Desa/Kelurahan	121.000.000	26 Desa/Kelurahan	133.100.000	92 Desa/Kelurahan	464.100.000	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN KESELAMATAN	KAB. MUNA
							-		3.809.000.000		7.159.900.000		7.678.890.000		8.219.779.000		26.867.569.000		